

PERSPEKTIF KOMUNIKASI RITUAL MENGENAI PEMANFAATAN NATONI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT ADAT BOTI DALAM DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Petrus Ana Andung

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Nusa Cendana, Kupang

Telp. 0380-881873 / e-mail: petrus_sdm@yahoo.com

Abstract

Boti Dalam tribe is a traditional tribe which had never changed. The tribe inherits their ancestor's way of communication. For instance, the tribe uses "natonni" as the traditional media almost in every sacred ceremony. The objectives of this research are to know how the tribe's way of doing ritual communication through "natonni". Another objective was to identify the function of using "natonni" in ritual communication perspective. This research used a qualitative method. Etnomethodology is the method of the research that had been used to gather information. The theoretical frame work that the researcher used to focus this problem was ritual communication theory. Based on the observation and in-depth interview, it founded that the tribe is still uses "natonni" as their traditional communication medias. This media is used by verbally talk in traditional poetry almost in every formal occasion. Although inserting some messages, the processes of performing natonni is a reflection of ritual communication. As a result, this traditional art is not intentionally to transfer messages but rather to share culture, to make association, and to fellowship in order to have a community intact.

Key words : *Boti Dalam, Natonni, Ritual Communication*

Pendahuluan

Natonni adalah salah satu bentuk kesenian pertunjukan tradisional yang dimiliki oleh Suku Timor yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan sebagian Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hakekatnya, *natonni* dipahami sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur (*atonni*) yang kemudian ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping/pengikut (*na he' en*) yang ditujukan baik kepada sesama manusia maupun kepada para arwah orang mati atau dewa. *Natonni* biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat (upacara adat perkawinan dan kematian) dan juga acara-acara seremonial lainnya (misalnya saat penyambutan dan pelepasan tamu). Menurut Taum (2004:10), isi *natonni* secara umum menyangkut

dua aspek yakni *natonni* yang isinya berkaitan dengan alam (*pah*) dan *natonni* yang berkaitan dengan masalah manusia atau sosial kemasyarakatan (*natonni lasi*).

Meskipun *natonni* ini tergolong sangat akrab di telinga masyarakat Timor Barat, namun keberadaannya sudah mengalami berbagai perubahan atau modifikasi seiring dengan perkembangan zaman. *Natonni* yang masih asli dan utuh hanya terdapat pada masyarakat Boti Dalam dimana mereka masih tetap memegang agama suku/kepercayaan nenek moyang mereka, yang dikenal dengan sebutan *halaiika*. Sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan, *natonni* dipergunakan sebagai media komunikasi tradisional dalam masyarakat adat Boti Dalam dari dulu hingga kini. *Natonni* ini diterima, dipelihara, dan diwariskan secara turun-temurun. Bentuk pelaksanaannya tidak pernah berubah dari

generasi ke generasi.

Dilihat dari cara dan proses penyampaiannya, *natoni* memiliki kemampuan dalam membawakan pesan/informasi. Mengingat bahwa tidak semua bentuk/jenis kesenian tradisional atau seni pertunjukan rakyat dapat dikategorikan sebagai media komunikasi tradisional. Sebagaimana ditegaskan Siswayasa, dkk, tidak semua kesenian rakyat itu dapat dikelompokkan sebagai media komunikasi tradisional. Kesenian tradisional hanya dapat digolongkan sebagai media komunikasi tradisional bila memenuhi unsur-unsur berikut: ada komunikator/sender, ada pesan yang disampaikan sehingga terjadi proses komunikasi, dan ada penerima pesan/receiver (Siswayasa, 1993:8-9). Adapun media tradisional yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alat atau saluran yang dimiliki masyarakat secara turun-temurun dan dipergunakan untuk menyampaikan pesan/lambang secara lisan atau pun bukan lisan baik ditujukan kepada sesama warga masyarakat maupun pihak luar yang umumnya nampak dalam wujud pertunjukan atau tontonan.

Keunikan-keunikan lain dari komunitas adat ini terlihat pada komitmen mereka dalam menghargai alam, diri sendiri dan orang lain. Mereka tidak akan menebang pepohonan secara sembarangan karena diyakini sebagai salahsatu pemberi/sumber kehidupan. Setiap lelaki dewasa yang sudah menikah akan membiarkan rambutnya memanjang dan disanggul. Sebagaimana situs Kompas.com melaporkan, “lelaki dewasa suku Boti yang rambutnya berkonde, itu pertanda ia sudah menikah. Sebaliknya kalau belum menikah, lelaki Suku Boti Dalam masih bebas memotong rambutnya” (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/18/daerah/ista25.htm>, edisi 18 Agustus 2001, dalam artikel “Istana Boti Tak Pernah Sepi”). Rambut yang dibiarkan panjang dan disanggul pun merupakan salah satu isyarat atau simbol bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama atau berpenganut *halaiika* (Nope, 2002:25).

Pada kaum perempuan, mereka hanya diijinkan menyanggul rambutnya bila sudah mampu menenun selebar kain. Bila perempuan Boti Dalam belum menyanggul rambutnya, pertanda ia belum bisa menenun kain, sarung atau selendang

Boti. Sementara itu, sang ayah akan mencukur kepala anak-anak laki-lakinya bila ibu mereka tengah mengandung. Sebagaimana dijelaskan Rumung (1998:23), “apabila kita melihat seorang anak dari Suku Boti rambutnya dicukur, itu pertanda bahwa ibunya sedang hamil”

Berpijak pada uraian-uraian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Boti Dalam merupakan salah satu komunitas adat yang tidak berubah dalam hal falsafah dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, termasuk cara-cara mereka menyampaikan pesan/informasi baik kepada sesama anggota warganya maupun pihak/orang luar. Tidak berubahnya masyarakat ini terlihat jelas melalui pemberlakuan dan pewarisan adat-istiadat mereka turun-temurun secara utuh.

Berdasarkan akan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penelitian telah dilakukan guna menjawab masalah penelitian yakni: “bagaimanakah praktek komunikasi ritual masyarakat adat Boti Dalam melalui *natoni*”? . Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: pertama, untuk mengetahui bagaimana praktek komunikasi ritual dilangsungkan melalui pertunjukan *natoni*. Kedua, untuk mengetahui fungsi *natoni* dalam komunikasi ritual masyarakat adat Boti Dalam.

Metode Penelitian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat adat Boti Dalam tidak berubah dalam hal falsafah/nilai-nilai hidup bermasyarakat mereka. Komunitas ini sangat berkomitmen menjaga kelestarian tradisi yang diterimanya sebagai warisan nenek moyang mereka berabad-abad. Demikian pula halnya dengan tradisi mereka memanfaatkan saluran-saluran komunikasi tradisional.

Sebagai suatu komunitas yang tidak berubah, peneliti tertarik melakukan kajian akan bagaimana tata cara dan praktek komunikasi ritual dari masyarakat ini dalam menggunakan *natoni* sebagai media tradisional. Guna mencapai tujuan penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah metode Etnometodologi.

Lindlof & Taylor (2002:37) mengatakan,

etnometodologi adalah studi untuk memahami bagaimana karakter kehidupan sehari-hari teraktualisasi dengan baik dalam masyarakat. Metodologi dalam konteks etnometodologi tidak merujuk pada variasi ilmiah, namun mengacu pada metode-metode dan prosedur yang digunakan masyarakat dalam mengkonstruksi apa yang bisa dirasakan dan cara-cara yang teratur dalam melakukan sesuatu.

Penelitian ini dilakukan di Dusun A (identik dengan sebutan Boti Dalam), Desa Boti, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui *in-depth interview* dan pengamatan/observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Raja Boti/ketua adat, tokoh-tokoh adat, dan penutur *naton*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis domain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktek Komunikasi Ritual dalam *Naton*

Sebelum melakukan interpretasi akan bagaimana praktek komunikasi ritual yang terbangun melalui pemanfaatan *naton* sebagai media tradisional, maka berikut ini disajikan karakteristik-karakteristik mendasar dari komunikasi ritual dalam *naton* itu sendiri:

(1). Komunikasi sebagai Kegiatan Berbagi, Berpartisipasi, Berkumpul, dan Bersahabat, Komunikasi ritual dipahami sebagai kegiatan berbagi, berpartisipasi, berkumpul, bersahabat, dan kepemilikan akan keyakinan yang sama (Carey, 1992:18). Dalam praktek komunikasi ritual, keberadaan *naton* ditempatkan sebagai salah satu upacara ritual yang dilakukan untuk berkumpul di antara sesama warga suku Boti Dalam. Warga akan selalu berusaha sedapat mungkin menghadiri dan merayakan *naton* secara bersama-sama. *Naton* telah benar-benar menjadi salah satu tradisi budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini terlihat bahwa hampir setiap peristiwa kehidupan mereka selalu dilakukan *naton*. Elemen-elemen sebagaimana disebutkan Radford yakni *communication* (dalam hal ini penyampaian *naton*), *communion* (pesta rakyat/perayaan), dan *common* (bersama-sama) tidak bisa dipisah-pisahkan dalam

naton. Ketiga unsur dari komunikasi ritual ini merupakan persyaratan terjadinya *naton*.

Sebagai budaya yang dianut turun-temurun, *naton* pun memiliki kemampuan mengikat dan mempererat tali persahabatan/kekerabatan di antara warga suku Boti Dalam. Karena itulah, ketika terjadi masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti konflik saat perkawinan atau kematian maka *naton* digunakan sebagai sarana untuk saling memaafkan dan akhirnya dapat berdamai dan hidup rukun. Serumit apa pun perselisihan di antara warga, dapat diredam hanya dengan melakukan *naton*. Masalah dengan sendirinya dianggap selesai bila sudah dilakukan *naton*. Karena itulah warga Boti Dalam menghayati *naton* sebagai salah satu ritual budaya yang kekuatannya sangat ampuh dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat.

Kebiasaan ber-*naton* ini dipraktekkan secara turun-temurun. Sebagaimana diungkapkan Suli Neolaka berikut ini:

Naton lek na in moinainkun es lek fe pah pinan na la' lif mansian. Lasi natoon lek na in muinainkun es la' fe hai nai am hai be'

(*Naton* sudah kami jalankan sejak dahulu kala. Nenek moyang kami telah melakukan hal seperti itu jauh sebelum kami ada secara turun-temurun).

Tradisi seperti ini berhubungan erat dengan keyakinan mereka sebagai penganut *halaika*. Hal mana bahwa mereka diwajibkan untuk mempraktekkan *lais ma nekat* (hukum kasih, yakni mengasihi sesama manusia, alam, dan tuhan).

(2). Proses Komunikasi Ritual, Rothenbuhler dan Coman (2005:4), dengan merujuk pada pandangan James W. Carey, menekankan bahwa sebagai salah satu bentuk dan model dari komunikasi sosial (*social communication*), proses komunikasi yang terjadi dalam komunikasi ritual bukanlah berpusat pada transfer (pemindahan) informasi. Sebaliknya, lebih mengutamakan sharing (berbagi) mengenai common culture (budaya bersama). Hal ini berarti bahwa walaupun terjadi proses transmisi pesan namun bukanlah menjadi tekanan utama dalam proses komunikasi ritual. Karena itulah

Rothenbuhler (1998:23) kemudian menekankan, “*ritual has more to do with performing than with informing, more to do with transcendent patterns of order than with particularities, sometimes more to do with acceptance than with change*” .

Natoni dalam konteks praktek komunikasi ritual pun demikian. Ia lebih banyak menonjolkan upaya berbagi budaya bersama (yakni *natoni* sebagai budaya orang Boti Dalam) ketimbang proses transmisi pesan dari satu kelompok kepada kelompok *natoni* yang lain ataupun dari penutur *natoni* kepada khalayak. Walaupun pada prinsipnya terdapat unsur transmisi pesan yang diutarakan melalui *natoni* namun itu bukanlah esensi dasar dari *natoni*. Proses yang terjadi dalam *natoni* lebih banyak mementingkan aspek pertunjukan budayanya ketimbang transmisi pesan dari *atonis* (dalam hal ini pengirim atau sender) kepada *nahe' en* (dalam hal ini bertindak sebagai penerima pesan atau *reciever*).

Karena itulah, dalam setiap *natoni*, pesan yang diutarakan tidaklah seberapa dalam seluruh rangkaian upacara *natoni*. Dibutuhkan pergelaran *natoni* selama 30 menit hanya untuk menyatakan bahwa mereka senang dan berterimakasih atas kunjungan tamu dari luar. Keberadaan *natoni* dalam setiap pementasannya lebih cenderung menekankan aspek pergelaran atau pertunjukan *natoni* sebagai budaya masyarakat dibandingkan dengan muatan pesan yang terselip di dalam *natoni* tersebut. Dengan kata lain, aspek pertunjukan (*performance*) lebih dominan dan menonjol ketimbang muatan pesan/informasi yang dibawakan melalui *natoni*.

(3). Komunikasi sebagai sebuah kegiatan sakral dan keramat, Pola komunikasi dalam perspektif ritual ibarat sebuah upacara suci atau *sacred ceremony* dimana setiap orang ikut mengambil bagian secara bersama dalam bersekutu dan berkumpul. Yang lebih diutamakan adalah soal kebersamaan masyarakat dalam melakukan doa, bernyanyi dan seremonialnya (Radford, 2005:15).

Natoni adalah salah satu budaya masyarakat Boti Dalam yang paling disakralkan. Masyarakat Boti Dalam memberi nilai lebih yang sangat tinggi pada *natoni*. Heka Benu menuturkan:

Natoin lek na uab lek ma upa' neu monit mansian. Es le' atoin Boti in mes henokan bin. Kalo atoni lek na tiun fa alat, lek na atoin kana' hin fa alat.

(*Natoni* merupakan sesuatu upacara adat yang sangat sakral dan berarti sehingga setiap orang Boti harus menghadirinya. Kalau tidak ikut maka sama dengan orang yang tidak tahu adat atau tidak berbudaya)

Suku Boti Dalam juga menganggap *natoni* sebagai doa bersama masyarakat. Doa-doa ini menurut mereka, dinaikkan sebagai permohonan warga kepada dewa langit (*uis neno*) termasuk di dalamnya para arwah orang mati dan dewa bumi (*uis pah*). Sebagai doa kepada para dewa, kekuatan *natoni* sangat sakral dalam kehidupan masyarakat suku Boti Dalam. Mereka percaya bahwa penuturan *natoni* dalam konteks tertentu sebagai bagian dari upacara pemujaan, memiliki kekuatan yang cukup ampuh memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Sebaliknya, malapetaka dapat menjadi ancaman bilamana tidak dilakukan *natoni*. Misalnya saat terjadi kematian, bila tidak dilakukan *natoni amates* (*natoni* kematian) maka bisa berakibat fatal berupa kematian yang akan menimpa anggota keluarga lainnya karena roh orang yang meninggal diyakini belum tenang.

Natoni oleh warga suku Boti Dalam dianggap sakti atau keramat. Akibatnya warga suku Boti Dalam kemudian menggunakan *natoni* sebagai alat untuk melakukan sumpah warga. Ini terutama saat terjadi perebutan atau konflik berkaitan dengan batas wilayah. Warga Boti Dalam dapat melakukan *natoni pah* sebagai sumpah yang ditujukan kepada pihak lawan yang bersengketa dengan mereka. Dipercaya bahwa saat melakukan *natoni* jenis ini, pihak yang bersalah akan ditimpa kematian dalam waktu tidak kurang dari satu tahun. Karena itu, bila ada salah seorang atau lebih dari pihak yang bersengketa meninggal dunia dalam kurun waktu itu maka dianggap sebagai pihak yang kalah dalam konflik tersebut.

(4). Penggunaan bahasa, Penggunaan bahasa dalam komunikasi ritual dilakukan secara

artifisial dan simbolik. Hal mana dapat terlihat dalam wujud tarian, permainan, kisah, dan tutur lisan (Carey, 1992:19).

Natoni merupakan media tradisional yang ditampilkan dalam wujud tutur lisan. Penuturan lisan ini dilakukan dengan menggunakan bahasa adat dalam skala tinggi dan halus. Bahasa kiasan adat tersebut sangat berbeda dengan bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Para penutur akan berupaya menterjemahkan inti pesan yang disampaikan dalam bentuk bahasa kiasan adat. Konsekuensinya, dibutuhkan kemampuan dalam mencerna setiap bahasa adat lisan yang diutarakan dalam setiap pertunjukan *natoni*.

Dalam penyampaian *natoni*, si penutur tidak menyampaikan apa yang menjadi inti pesannya secara eksplisit. Ia kemudian akan menterjemahkan inti pesannya dengan menggunakan rentetan bahasa kiasan adat untuk disampaikan dalam seluruh acara *natoni*. Atas fakta yang demikian, kemudian masyarakat Boti Dalam mengakui bahwa penuturan *natoni* sangat berbelit-belit. Setiap bahasa *natoni* tidak dapat diterjemahkan secara kata per kata dalam Bahasa Indonesia. Untuk memahaminya harus diketahui rentetan kata-kata yang mengikutinya. Singkatnya, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dalam menginterpretasikan bahasa yang disampaikan dalam *natoni*.

(5). Keterlibatan komunikan, Komunikasi dalam perspektif ritual diibaratkan sebagai sebuah upacara suci dan mengharuskan komunikan untuk ikut mengambil bagian secara bersama. Keterlibatan komunikan seperti halnya bermain di dalam suatu drama suci (Radford, 2005:15).

Keterlibatan komunikan dalam setiap pelaksanaan *natoni* bukan/tidak saja sebagai pengamat atau penonton. Komunikan juga terlibat dalam acara ritual *natoni*. Hal ini ada kaitannya dengan pemahaman masyarakat Boti Dalam terhadap *natoni* sebagai suatu doa bersama. *Natoni* sebagai doa bersama ini paling nampak saat *natoni* kematian. Pemimpin *natoni* (*atonis*) dalam *natoni* kematian sekaligus berperan sebagai pemimpin doa. Kehadiran masyarakat lainnya pada acara *natoni* kematian ibarat “jemaat/umat” yang sedang mengikuti doa bersama. Warga Boti Dalam hadir dan berkumpul untuk menaikkan doa

untuk arwah yang meninggal. Doa ini bertujuan agar arwah tersebut dapat tenang di alam baka serta diterima oleh *uis neno*.

Natoni kematian selain menonjolkan doa warga, juga terdapat unsur pemujaan terhadap para dewa. *Atonis* sebagai pemimpin upacara pemujaan akan memimpin warga guna melakukan *natoni*. *Atonis* akan mengucapkan bahasa-bahasa ritual adat dalam bentuk *natoni* yang isinya sanjungan kepada *uis neno* dan *uis pah*. Salah satu tujuannya adalah agar keluarga dan masyarakat yang hadir tidak diganggu oleh arwah orang yang telah meninggal tersebut.

Walaupun warga tidak secara langsung menaikkan doa-doa mereka, namun kehadiran mereka menandakan keterlibatan mereka dalam upacara untuk doa tersebut. Kehadiran warga dalam konteks *natoni* berperan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *natoni*. Masyarakat Boti Dalam melakukan upacara pemujaan tersebut bukan secara individual melainkan dilakukan korporat. Doa-doa dan pemujaan yang dituturkan oleh *atonis* adalah doa-doa dan pemujaan kelompok.

(6). Pemilihan simbol komunikasi, Penggunaan simbol-simbol komunikasi yang unik atau khas merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam komunikasi ritual. Simbol-simbol komunikasi yang digunakan tersebut tidak dipilih oleh partisipan, melainkan sudah tersedia sejak turun-temurun berdasarkan tradisi budaya yang bersangkutan (Carey, 1992:54).

Ada beberapa simbol komunikasi yang digunakan dalam *natoni*. Simbol-simbol tersebut antara lain: tempat sirih pinang (*okomama*), selendang Boti, uang (uang logam atau golden dan uang kertas), dan perlengkapan prajurit (*meo*) seperti ikat kepala (*pilu*), sebilah parang (*kelewang*), sebuah tas sirih pinang bertali perak (*aul ais noni*), dan *fut noni* (ikat pinggang dari perak). Simbol-simbol tersebut selalu dipakai dalam setiap penyelenggaraan *natoni* khususnya *natoni* yang dilakukan secara berbalas-balasan (*natoni* perkawinan dan *natoni* kematian).

Setiap simbol-simbol komunikasi tersebut mengandung makna tersendiri bagi masyarakat suku Boti Dalam. *Okomama* melambangkan persatuan di antara dua kelompok yang sedang

melakukan *naton* secara berbalas-balasan. Disebut sebagai pemersatu karena biasanya dalam setiap penyelenggaraan *naton* secara berbalas-balasan sering terjadi ketersinggungan di antara kedua kelompok tersebut. Karena itulah bilamana salah satu kelompok merasa tersinggung karena bahasa yang digunakan oleh kelompok lawannya maka *okomama* itulah yang dianggap sebagai alat pemaaf. Saat disuguhkan *okomama* maka kelompok yang tersinggung dengan sendirinya memaafkan kelompok lawan.

Selain *okomama*, uang logam atau uang kertas juga memiliki makna yang berbeda. Masyarakat suku Boti Dalam biasanya meletakkan uang logam di dalam *okomama* pada setiap kali *naton* berbalas-balasan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai korban persembahan yang diperuntukkan bagi dewa-dewa orang Boti Dalam. Korban persembahan ini diperlukan karena dalam keyakinan suku Boti Dalam, *naton* itu memiliki dua sasaran yakni sesama manusia dan dewa-dewa.

Perlengkapan perang seorang prajurit (*meo*) juga menjadi salah satu simbol komunikasi dalam setiap penyelenggaraan *naton*. Masyarakat suku Boti Dalam memosisikan *meo* sebagai prajurit dalam kerajaan Boti sejak pemerintahan kolonial Belanda. Para *meo* bertanggungjawab dalam mengamankan situasi kampung Boti. Selanjutnya dalam konteks *naton*, *meo* dipilih sebagai pelaku *naton* karena dalam tradisi orang Boti Dalam semua realisasi kesepakatan atau janji-jani dan keputusan dalam *naton* diawasi atau dikontrol oleh para *meo*. Merekalah yang membangun mengingatkan kedua belah pihak untuk menepati hal-hal yang telah dibicarakan atau diputuskan dalam *naton*. Selain itu, *meo* dalam istana kerajaan Boti dilambangkan sebagai juru bicara kerajaan. Para *meo*-lah yang diperintahkan raja Boti untuk menyampaikan berbagai informasi seputar kerajaan baik kepada pihak internal maupun eksternal kerajaan.

(7). Ambiguitas Pesan, Pesan yang disampaikan dalam komunikasi ritual biasanya tersembunyi (*latent*), membingungkan dan bermakna ganda atau ambigu (Carey, 1992: 54). Ambiguitas pesan sebagaimana dimaksudkan Carey tersebut nampak pula dalam pelaksanaan

naton. Bahasa yang digunakan dalam setiap *naton* adalah bahasa kiasan adat yang berbeda jauh sekali dengan bahasa sehari-hari. Dalam hal ini penutur *naton* tidak menggunakan bahasa Dawan sehari-hari, melainkan memakai bahasa Dawan kiasan yang dirangkai menyerupai syair pantun. Singkatnya, penutur tidak secara terang-terangan mengemukakan apa yang menjadi maksudnya melalui *naton* yang dituturkan. Dalam konteks inilah yang disebut Carey sebagai pesan yang latent (tersembunyi).

Setiap orang yang mendengar bahasa *naton* perlu mencerna dan menginterpretasikannya ke dalam bahasa Dawan sehari-hari sebab penggunaan bahasa bersifat konotatif. Karena itu dibutuhkan kemampuan menginterpretasikan setiap rangkaian kata-kata yang dituturkan saat *naton* berlangsung. Akibatnya setiap orang dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap apa yang disampaikan. Hanya saja, inti pesannya bisa dipahami walaupun melalui interpretasi yang berbeda-beda. Setiap orang yang bisa berkomunikasi dalam bahasa Dawan pasti dapat menginterpretasikan makna yang pesan yang terdapat di balik kata-kata *naton*.

Begitu pula dengan pesan yang terdapat dalam simbol-simbol komunikasi yang digunakan. Bila *naton* ditujukan kepada pihak luar atau orang di luar suku Boti Dalam, ia tidak akan mudah memahami makna yang terkandung di dalam setiap simbol-simbol tersebut. Apalagi, tidak akan dijelaskan dalam bahasa *naton*. Karena itulah saat *naton* ditujukan kepada pihak luar melalui *naton sium kap mafleu dan naton tafetin kap mafleu*, ada beberapa orang tokoh adat atau Kepala Desa yang mendampingi tamu-tamu guna menjelaskan maksud *naton* di akhir *naton*. Setelah *naton* selesai, kepala desa atau pendamping tamu kehormatan akan dijelaskan pesan-pesan apa yang disampaikan melalui *naton*.

(8). Media adalah Pesan, Dalam komunikasi ritual, McQuail (2000:54) mengatakan bahwa "*medium and message are usually hard to separate*". Pandangan McQuail ini nampak pula dalam pelaksanaan *naton*. Pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam *naton* menjadi sangat kuat dan mengikat secara adat hanya ketika disampaikan dalam upacara *naton*. Sebaliknya,

bila pesan yang dimaksudkan dalam *naton* disampaikan pada momentum yang lain diluar acara *naton*, maka maknanya menjadi tidak *powerful*. Dengan demikian dipahami bahwa kehadiran upacara *naton*-lah (dalam hal ini sebagai media) yang memberi andil bagi kuatnya pesan-pesan yang disampaikan (berupa syair-syair pantun lisan secara berbalas-balasan).

Hubungan antara kuatnya media (*naton*) terhadap isi pesan tersebut di atas, terlihat melalui persepsi masyarakat terhadap karakteristik dan bentuk-bentuk *naton* itu sendiri. Menurut Kristofel Benu, pesan yang dikomunikasikan dalam *naton pah* mempunyai kekuatan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan bentuk *naton lainnya*. Pada *naton pah* (*naton* tentang alam), pesan yang disampaikan berisikan sumpah dari penutur kepada komunikan yang isinya diyakini akan mendatangkan hukuman keras berupa kematian.

Pada konteks seperti ini, maka benarlah apa yang dikatakan Marshall McLuhan (1999:7) bahwa “*the medium is the message*”. Setiap bentuk media (*naton*) yang berbeda-beda akan mewakili pesan yang berbeda-beda. *Naton amates* (*naton* kematian) misalnya, sangat khas untuk menyampaikan pesan-pesan dengan arwah nenek moyang akibat kematian salah seorang petinggi desa. *Naton sium kap mafle’ u* (*naton* penerimaan tamu) juga sangat khas memberikan informasi dan harapan terhadap tamu yang hadir. Demikian pula dengan *naton* perkawinan (*naton ma fet ma monet*), yang secara khusus mengkomunikasikan pesan-pesan seputar isu perkawinan antara mempelai laki-laki dan perempuan serta kedua keluarga besar mereka. Berdasarkan uraian tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa ternyata media (upacara *naton*) menjadi lebih ‘penting’ dan lebih ‘powerful’ ketimbang pesan yang disampaikan di dalam *naton* itu sendiri. Hal mana, kuatnya isi pesan yang disampaikan juga sangat tergantung pada bentuk dan karakteristik *naton* yang akan dipentaskan.

Fungsi *Naton* sebagai Media Tradisional dalam Praktek Komunikasi Ritual

Naton sebagai salah satu seni pertunjukan tradisional dimanfaatkan sebagai media komunikasi tradisional. Karena itu, sang penutur *naton*

(*atonis*) menyelipkan pesan-pesan tertentu untuk dikomunikasikan. Namun dalam kenyataan dan proses pelaksanaannya, *naton* mempertunjukkan praktek komunikasi ritual.

Sebagai salah satu bentuk dari media tradisional, *naton* menjalankan beberapa fungsi. Sebagaimana disebutkan Rachmadi (1988:112) bahwa media tradisional secara umum memiliki fungsi ritual dimana merupakan salah satu dari rangkaian upacara kepercayaan rakyat yang bernilai magis-religius. Selain fungsi ritual, media tradisional pun digunakan untuk mendidik, dan menguatkan atau mengubah nilai-nilai dan adat kebiasaan yang ada.

Naton dalam pemanfaatannya sebagai salah satu bentuk media tradisional dalam masyarakat Boti Dalam memperlihatkan beberapa fungsi:

(1). Fungsi Membawakan Pesan/Informasi, Eapen (dalam Lent, 1972) menyebutkan bahwa media tradisional dapat berfungsi sebagai pembawa pesan yang cukup efektif. Dengan demikian salah satu fungsi media tradisional adalah membawa pesan (Gunardi, 1988:104).

Walaupun dalam *naton* lebih banyak unsur ritual dan adat yang sangat kental, dapat pula diselipkan pesan-pesan atau informasi tertentu sesuai konteks dimana ia dilakukan atau dipertunjukkan. Karena ada selipan pesan yang demikianlah maka *naton* dalam pemanfaatannya sebagai media tradisional juga menjalankan fungsi pembawa pesan.

Adapun pola komunikasi untuk kepentingan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima dalam *naton* terbagi atas dua jenis. Pola komunikasi satu arah dimana tidak terjadi *naton* berbalas-balasan atau komunikasi timbal balik terjadi dalam *naton pah*, *naton* kematian, *naton sium kap mafle’ u* dan *naton tafetin kap mafle’ u*. Sebaliknya komunikasi timbal balik di antara dua kelompok *naton* terjadi khususnya saat acara perkawinan (*naton ma fet ma monet*). Pada acara ini, kedua kelompok *naton* dari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) akan saling memberi informasi secara timbal balik.

Semua informasi yang disampaikan oleh *atonis* dan *na he’ en* walaupun dikemas sedemikian rupa dalam bentuk bahasa kiasan adat,

umumnya dapat ditafsirkan, dipahami dan dimengerti oleh sesama warga Boti Dalam. Pihak luar yang dapat berkomunikasi dalam bahasa daerah dawan (*uab meto*) pun dapat menafsirkan makna pesan yang terdapat di dalam *naton*. Segera setelah selesai *naton* diucapkan, umumnya orang berdiskusi secara informal apa yang dimaksudkan oleh *atonis*.

(2). Fungsi Mendidik, *Naton* perkawinan mengandung pula pesan-pesan didikan khususnya kepada suami isteri yang menggelar upacara perkawinan. Unsur mendidik tersebut nampak dalam wujud pesan-pesan agar membangun rumah tangga dengan baik, mengusahakan kebun dan ternak dengan berhasil, serta memelihara dan mengasuh anak-anak dengan baik.

Pesan-pesan didikan dituangkan dalam bentuk nasehat kepada pasangan suami isteri penyelenggara pesta perkawinan adat. *Naton* perkawinan tersebut juga menurut warga Boti Dalam merupakan motivasi bagi warga lainnya agar menggelar acara adat yang sama. Dalam tradisi Boti Dalam, pasangan suami isteri hanya diijinkan melakukan pesta perkawinan adat bila ekonomi rumah tangga sudah mapan. Pesta adat bertujuan memberitahu warga lainnya bahwa mereka telah berhasil. Diharapkan warga lainnya dapat terpacu untuk membuat upacara perkawinan adat yang sejenis. Apalagi setiap keluarga dalam tradisi budaya Boti Dalam wajib menyelenggarakan pesta perkawinan adat. Bila keduanya tidak sanggup membuat acara tersebut maka akan menjadi beban bagi anak cucunya untuk melakukannya di kemudian hari. Karena itu, setiap pasangan suami isteri akan berupaya untuk berkebun dan beternak dengan baik sehingga dapat memperoleh penghasilan yang memadai. Dengan demikian, suatu waktu akan dilangsungkan acara pesta perkawinan tersebut. Sebelum perkawinan adat tersebut, pasangan suami isteri dalam suku Boti Dalam, hanyalah menjalani usaha membangun rumah tangga bersama. Mereka belum resmi secara adat sebagai pasangan suami isteri. Melalui *naton* perkawinan diharapkan dapat memacu setiap pasangan suami isteri untuk mencapai tingkat kemapanan secara ekonomi.

(3). Fungsi Transmisi Warisan Sosial, Salah satu fungsi komunikasi dalam masyarakat

sebagaimana disebutkan Lasswell (1960:118) yakni *the transmission of the social heritage from one generation to the next* juga nampak dalam pelaksanaan *naton*. Fungsi ini berkaitan erat dengan fungsi *to educate*. Hal ini nampak ketika upacara ritual *naton* dilangsungkan, secara tidak langsung terjadi proses pembelajaran dari generasi tua yang umumnya sebagai pelaku *naton* kepada generasi muda.

Dalam tradisi Boti Dalam, *naton* merupakan salahsatu upacara adat yang diterima dan diwariskan dari generasi sebelumnya secara turun-temurun. Nenek moyang orang Boti Dalam telah menurunkan kebiasaan ber-*naton* ini sehingga tidak punah hingga saat ini.

Proses pewarisan *naton* sebagai salah satu nilai sosial yang dipelihara warga Boti Dalam berlangsung secara alamiah. Tidak terjadi proses pembelajaran dalam melakukan *naton*. Multiplikasi *atonis* hanya terjadi ketika seseorang semakin lama terlibat dan menonton pertunjukkan *naton*.

Melalui pertunjukkan *naton* dalam hampir setiap upacara adat Boti Dalam, diharapkan akan terjadi proses pewarisan dari generasi tua kepada generasi muda. Pewarisan secara alamiah ini akan mampu mengalihkan seluruh kemampuan ber-*naton* dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, bila generasi tua sekarang ini telah tiada maka generasi muda yang ada saat inilah yang akan menggantikan untuk menuturkan *naton*.

Simpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, ditemukan bahwa *naton* masih dipelihara oleh masyarakat suku Boti Dalam secara turun-temurun. *Naton* dalam prakteknya digunakan sebagai sarana atau saluran tradisional untuk berkomunikasi. Bentuk seni pertunjukan tradisional ini dalam pergelarnya telah memenuhi semua elemen mendasar dari suatu komunikasi. Karena itulah, *naton* juga dimanfaatkan sebagai media tradisional untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu.

Walaupun *naton* dimanfaatkan sebagai media tradisional, dalam proses pelaksanaannya, kesenian tradisional ini mempraktekkan bentuk

komunikasi ritual. *Natoni* dalam praktek komunikasi ritual lebih cenderung menampilkan aspek pertunjukan atau seremonial yang sakral dan keramat dibandingkan dengan transmisi pesan. Dengan kata lain, walaupun terjadi transmisi pesan dalam proses komunikasi melalui *natoni*, namun yang paling menonjol adalah *sharing culture* dan pergelaran budaya. Terdapat beberapa karakteristik komunikasi ritual yang dipraktekkan dalam setiap pertunjukan *natoni*. Warga Boti Dalam melakukan *natoni* ibarat sebuah perayaan dimana semua warga berkumpul, dan terlibat secara langsung di dalamnya. Sementara itu, sebagai salah satu bentuk media tradisional, *natoni* menggunakan bahasa yang oleh Carey disebut artifisial dan simbolik. Hal mana bahwa seluruh bahasa yang digunakan sangat bertolak belakang dengan bahasa dalam komunikasi sehari-hari warga masyarakat. Karena itu, komunikasi yang diciptakan dalam *natoni* ditujukan untuk saling berbagi guna memupuk persahabatan atau kekerabatan baik terhadap alam, sesama manusia, arwah orang mati, maupun *uis neno* dan *uis pah* sebagai dewa yang mereka sembah. Selain itu juga tujuan utama dari komunikasi ritual dalam *natoni* adalah mewujudkan keutuhan sebagai sebuah komunitas adat, serta menghadirkan kembali keyakinan-keyakinan masyarakat yang bersifat *religiøs magis*.

Sementara itu, karena *natoni* diselipkan pesan maka dimanfaatkan sebagai sarana dalam berkomunikasi baik di antara sesama masyarakat suku Boti Dalam, berkomunikasi dengan pihak luar, maupun dengan arwah orang mati serta para dewa. Pemanfaatan *natoni* sebagai sarana menyampaikan pesan menjalankan beberapa fungsi. *Natoni* saat digunakan sebagai media tradisional memiliki fungsi mendidik (*to educate*), fungsi membawakan pesan (*to inform*), dan fungsi transmisi warisan sosial (*transmission of the social heritage*) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Daftar Pustaka

Buku:

Carey, James W, 1992, *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. Routledge, Newyork.

Couldry, Nick, 2005, *Media Rituals; Beyond Functionalism.*, dalam *Media Anthropology*, Editor: Eric W. Rothenbuhler dan Mihai Coman, SAGE Publications, Thousand Oaks.

Effendy, Onong Uchjana, 2000, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gunardi, 1988, *Media Tradisional dan Pembangunan*, dalam *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Penyunting: Amri Jahi, PT Gramedia, Jakarta.

Lasswell, Harold, 1960, *The Structure and Function of Communication in Society*, dalam *Mass Communications, a Book of Readings Selected and Edited by the Director of the Institute for Communication Research at Stanford University*, Editor: Wilbur Schramm, University of Illinois Press, Urbana.

Littlejohn, Stephen, 2001, *Theories of Human Communication, Seventh Edition*, Wadsworth.

McLuhan, Marshall, 1999, *Understanding Media: The Extension of Man*, The MIT Press, London.

McQuail, Denis, dan Windahl, Sven, 1993, *COMMUNICATION MODELS For the study of mass communications (Second edition)*, Longman, London and Newyork.

McQuail, Denis, 2000, *McQuail's Mass Communication Theory*, SAGE Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.

Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rachmadi, F, 1988, *Manfaat Media Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat dalam Media Rakyat; Komunikasi Pengembangan Masyarakat*, Editor: Manfred Oepen, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Jakarta.

Radford, Gary, 2005, *On The Philosophy of Communication*, Wadsworth, Belmont.

Rothenbuhler, Eric W, 1998, *Ritual Communi-*

cation: From Everyday Conversation to Mediated Ceremony, SAGE Publications, Thousand Oaks.

Rothenbuhler, Eric W, dan Mihai Coman, 2005, *The Promise of Media Anthropology*, dalam *Media Anthropology*, Editor: Eric W. Rothenbuhler dan Mihai Coman, SAGE Publications, Thousand Oaks.

Rumung, Wens John, 1998, *Misteri Kehidupan Suku Boti*, Karya Guna, Kupang.

Karya Akademis

Siswayasa, Engking., dkk, 1993, *Manfaat Kegiatan Pertunjukan Upacara Ngaruat dalam Pantun Sunda sebagai Media Komunikasi Tradisional untuk Menunjang Keberhasilan Program Kesehatan Masyarakat di Desa Manggunghardja Kecamatan Ciparay*, Laporan Penelitian, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Artikel, Makalah dan Prosiding

Hamad, Ibnu, 2006, *Communication as Dis-*

course, Makalah, Tidak Diterbitkan, Jakarta.

Taum, Yoseph Yapi, 2004, *Tradisi Fua Pah: Ritus dan Mitos Agraris Masyarakat Dawan di Timor (Fua Pah Tradition: Agricultural Rite and Myth of Dawanese of Timor Island)*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Media Massa

http://www.indosiar.com/v2/culture/culture_read.htm?id=28422&tp=teropong, edisi 19 Juli 2005, dalam artikel *TEROPONG Jati Diri dari Puncak Bukit*.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/18/daerah/ista25.htm>, edisi 18 Agustus 2001, dalam artikel *Istana Boti Tak Pernah Sepi*.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0510/11/utama/2121014.htm>/Edisi Selasa, 11 Oktober 2005, dalam Artikel berjudul *Kampung Boti nan Sakti*.

KEMISKINAN STRUKTURAL INFORMASI

Tuti Widiastuti

Ilmu Komunikasi FEIS Universitas Bakrie

Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro

Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan

Telp (021) 5261448, Fax (021) 5263191/e-mail: tuti.widiastuti@bakrie.ac.id

Abstract

This article is based on research of social network and structural poverty at Dusun Wanasari, Desa Karangsong, Indramayu, and West Java. For people who are identified in under poverty line, they have limited access to information such as education and training program, financial supporting program, and information that delivered through communication social networking. These phenomena will be analyzed with social exchange theory from Richard M. Emerson said that people will have limited access in their social network and who has good resources will be powerful than others.

Key words: *information, structural poverty, social exchange*

Pendahuluan

Informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Kegiatan pembangunan yang manapun juga hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran yang dikehendaki, apabila dalam setiap tahapannya –perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan –didasarkan pada informasi yang memadai (Dahlan, 1997 : 2). Informasi tersebut diperoleh melalui berbagai kegiatan komunikasi, tetapi yang pada akhirnya menentukan apakah komunikasi tersebut bermakna adalah informasi yang dibawanya.

Dalam hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia, informasi memainkan peranan penting. Misalnya informasi harga, cuaca, transaksi perdagangan, perkiraan biaya, pelaksanaan anggaran, pendidikan, kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya sangat tergantung pada kelengkapan, kebenaran dan keakuratan informasi. Bahkan untuk berbagai bidang atau profesi, informasi menduduki posisi yang begitu penting sehingga dapat menentukan keberadaan bidang yang bersangkutan. Contohnya kuliah,

penelitian, ceramah, diskusi, pidato, ditentukan oleh ketersediaan informasi.

Pemerataan pembangunan hanya dimungkinkan apabila dilakukan seiring dengan pemerataan informasi dan komunikasi (Dahlan, 1997 : 5). Karena upaya pemerataan apapun tanpa disertai pemerataan informasi dan komunikasi, yang tercapai justru sebaliknya yaitu kesenjangan. Kesenjangan ini pada akhirnya berdampak pada kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa intervensi pembangunan sering kali tidak sampai kepada sasaran sebab informasi hanya dimiliki dan dimanfaatkan oleh golongan yang bukan sasaran.

Kebanyakan informasi tidak bisa mencapai khalayak di tingkat terbawah dari struktur masyarakat karena menggunakan jaringan formal, karena orang yang duduk di jaringan formal memiliki jaringan sosialnya sendiri dan jaringan sosial ini dianggapnya lebih penting. Misalnya informasi mengenai bantuan yang mestinya ditujukan kepada warga desa ternyata tertahan di tingkat elit desa. Pada kenyataannya jaringan formal tidak jalan, misalnya ketika sang Lurah mengetahui tentang kredit, informasi tersebut tidak

dia salurkan kepada kalangan miskin di daerahnya, melainkan kepada kerabatnya (Setiawan, 1989). Dan apabila ada proyek pembangunan fisik di desa, maka yang akan mengetahui terlebih dahulu adalah elit desa. Setelah itu informasi dimanfaatkan oleh elit desa untuk kepentingan diri dan kelompoknya (Setiawan, 1989 : 3).

Contoh di atas merupakan salah satu bukti bahwa mereka yang kuat dalam perekonomian biasanya sekaligus juga merupakan golongan informasi kuat. Karena mereka lebih tahu cara mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi dalam waktu lebih cepat, sehingga dapat lebih memperkuat posisi ekonominya. Diterjemahkan ke dalam bahasa populer, yaitu “informasi adalah uang” , yang dapat dipakai lagi menambah kekayaan informasi – yang perlu untuk menghimpun kekayaan riil lebih banyak (Dahlan, 1997 : 5). “Informasi adalah komoditi” , kata Daniel Bell (1973; dalam Dahlan, 1997) dalam bukunya *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. Komoditi yang paling berharga dalam masyarakat pasca industri adalah pengetahuan, oleh karena itu yang menjadi super elit dalam masyarakat yaitu produsen informasi pengetahuan.

Informasi memungkinkan orang untuk mengembangkan gagasan, memperoleh peluang-peluang baru, dan berbagai pembelajaran dari orang lain. Dengan kata lain, kemiskinan terjadi secara timbal balik antara miskin karena kurangnya informasi dan sulitnya memperoleh informasi karena miskin (Dahlan, 1997). Hal ini terjadi karena adanya hambatan struktural arus informasi kepada kalangan miskin.

Pemerataan informasi dan komunikasi diperlukan dalam berbagai bidang pengentasan kemiskinan, seperti bidang ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat. Kesenjangan informasi di bidang ekonomi dapat mengurangi peluang mendapatkan usaha dan penghasilan yang baik. Di bidang politik, kesenjangan informasi dapat menghambat pelaksanaan demokrasi, mengembangkan kecurigaan antar golongan, membuka peluang isu yang menyesatkan atau bahkan menutup saluran pendapat dan aspirasi masyarakat. Di bidang kesejahteraan rakyat, kesenjangan informasi dapat menghambat keefektifan berbagai

jasa pelayanan masyarakat yang menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Sebagai upaya keluar dari kemiskinan berarti harus lepas dari kendala struktural dimana arus informasi tidak menjangkau masyarakat yang tidak punya akses. Struktur yang menghambat harus diidentifikasi dan dicarikan jalan penyelesaianannya, sehingga memungkinkan penyaluran informasi ke dalam jaringan-jaringan komunikasi sosial di masyarakat. Komunikasi sosial diartikan sebagai proses interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih partisipan di dalam konteks peristiwa-peristiwa sosial, dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku individu dalam berinteraksi.

Jaringan komunikasi sosial adalah suatu rangkaian yang menghubungkan orang-orang dalam suatu masyarakat yang menunjukkan siapa-siapa yang berkomunikasi secara teratur, berapa besar jaringan itu atau berapa banyak anggota yang dihubungkannya, bagaimana arus komunikasinya “mengalir” melalui jaringan itu serta bagaimana kedudukan masing-masing orang di dalamnya (Dahlan, 1976/1977 : 13-14).

Sebagai sekumpulan orang-orang, masyarakat merupakan kumpulan hubungan-hubungan berupa hubungan darah atau keturunan, pertemanan, bertetangga, pekerjaan, dan banyak hubungan lainnya. Hubungan-hubungan ini hanya akan terjadi dan bermakna apabila ada proses komunikasi, karena tanpa komunikasi sebuah hubungan darah sekalipun kurang berarti apabila antar anggota seketurunan tersebut tidak terjadi kontak satu dengan yang lain. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memahami perilaku manusia adalah dengan mengamati atau memahami hubungan-hubungan sosialnya yang tercipta karena adanya proses komunikasi.

Dalam masyarakat terdapat banyak jaringan komunikasi, namun masing-masing jaringan komunikasi ini mempunyai kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Makin penting suatu jenis informasi bagi suatu anggota masyarakat tertentu, maka makin cepat perkembangan dan makin luas jangkauan dari jaringan informasinya. Jaringan komunikasi yang berhubungan dengan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan primer bagi suatu masyarakat akan

mempunyai jangkauan yang tercepat dan terluas. Misalnya, bagi masyarakat petani maka informasi mengenai pertanian mestinya akan merupakan informasi yang terpenting. Lain halnya dengan masyarakat nelayan, maka informasi mengenai kondisi cuaca dan lokasi penangkapan ikan akan menjadi informasi terpenting bagi mereka.

Dalam program pembangunan pengentasan kemiskinan, selalu ada proses komunikasi pembangunan yang sering disebut dengan “sosialisasi” melalui berbagai saluran informasi. Namun mengapa problem kemiskinan belum juga berhasil diselesaikan secara berarti? Mengapa informasi program pembangunan cenderung tidak sampai pada sasarannya, atau karena informasi itu tidak dimengerti oleh penerimanya? Jika tidak sampai pada sasarannya, apakah karena ada yang dengan sengaja menghentikannya di tengah jalan atau karena saluran komunikasi yang digunakan salah atau tidak tepat sasaran?

Sehingga banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, tetapi pada akhirnya pengadaan sumber-sumber daya dan pelayanan sosial dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan tidak sampai kepada golongan miskin mutlak yang diidentikkan memiliki kebudayaan kemiskinan. Kenyataan ini memaksa penulis untuk lebih memfokuskan penelitian pada dimensi kemiskinan struktural, karena kesulitan untuk mencapai golongan yang paling miskin ada hubungannya dengan kekurangan pengetahuan mengenai jaringan komunikasi sosial di masyarakat. Sehingga, kemiskinan di desa nelayan menyajikan sisi yang menarik untuk dicermati dari perspektif ilmu komunikasi dengan menggunakan analisis jaringan komunikasi.

Kemiskinan Struktural dan Jaringan Komunikasi Sosial dalam Konteks Teori Relasi Pertukaran Sosial

Menurut Selo Soemardjan (1980 : 5), kemiskinan yang dialami oleh seorang individu oleh karena dia malas bekerja atau oleh karena dia terus-menerus sakit maka kemiskinan yang demikian adalah bersifat individual, sedangkan ‘kemiskinan struktural’ adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut

menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Berbagai konsep mengenai kemiskinan yang ditawarkan dan perdebatan yang berlangsung memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Pendekatan struktural yang lebih dominan kuantifikasi terhadap kemiskinan memiliki kekuatan pada pengangkaan dan kemampuan prediksi terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan gejala kemiskinan dalam kehidupan suatu masyarakat. Tetapi konseptualisasi kemiskinan struktural seperti ini memiliki kelemahan karena mengabaikan proses-proses kehidupan yang dijalani oleh “orang yang didefinisikan” miskin itu sendiri. Sehingga muncul kemudian pendekatan yang lebih melihat kemiskinan sebagai proses-proses hidup yang dijalani oleh orang miskin itu sendiri. Budaya kemiskinan menjelaskan bagaimana orang secara proses dan budaya menjadi miskin. Namun pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab permasalahan mengapa orang berperilaku dan memiliki budaya kemiskinan tertentu sebagai akibat dari ketimpangan dan ketidakadilan yang justru datang dari luar diri mereka.

Dalam ilmu sosial berlangsung debat mengenai kemiskinan dan bagaimana mengurangi angka kemiskinan di dunia. Berbagai debat itu berlangsung, tetap perlu ada patokan dalam melihat kemiskinan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini tampaknya pendekatan kemiskinan yang bersifat struktural menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah dan pencapaian tujuan dari proses pembangunan yang berlangsung.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, maupun akses. Hal ini mengakibatkan orang miskin tersingkir dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Lebih dari itu, segala pekerjaan/usaha yang mereka lakukan tidak punya akses, termasuk informasi yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara layak.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah program penanggulangan kemiskinan yang dipandu oleh semangat demokrasi, yaitu

dengan memberikan peluang dan mekanisme yang memungkinkan komunitas untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan itu terutama yang akan mempengaruhi nasib mereka di masa mendatang. Peluang dan mekanisme partisipasi yang melekat di dalam desain program, dibangun atas dasar asumsi bahwa keterlibatan komunitas khususnya kelompok miskin akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan signifikan yang sesuai dengan persoalan, kebutuhan dan kepentingan mereka.

Perubahan sosial akan berjalan dengan lancar atau diterima dengan baik bilamana perubahan tersebut mendukung kebutuhan dan kepentingan masing-masing kelompok. Sebuah kelompok masyarakat tidak akan tertarik dengan suatu gejala perubahan bilamana perubahan tersebut tidak menguntungkan dirinya. Bahkan suatu program peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali merupakan sebuah kepentingan kelompok yang terselubung.

Dalam implementasinya, pemerintah menggunakan satu asumsi bahwa struktur negara merupakan satu struktur yang sejalan, dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sehingga dalam implementasi program tersebut pemerintah menggunakan jalur formal mengikut pada struktur formal negara. Mulai dari departemen, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun. Program-program pengentasan kemiskinan dijalankan dan disalurkan melalui jalur formal ini.

Salah satu kegiatan pengkomunikasian program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah adalah apa yang disebut dengan sosialisasi dan diseminasi program pembangunan pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain ada proses komunikasi dan penyebaran informasi dari lembaga pemerintah ke masyarakat yang mengikut jalur formal atau saluran resmi menurut mekanisme yang diyakini pemerintah berlangsung benar dan normal hingga ke targetnya yaitu orang miskin. Namun dalam kenyataannya, asumsi pemerintah ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diasumsikan. Bahwa secara teoritis, baik secara sosiologis maupun berdasarkan ilmu komunikasi, bahwa masyarakat punya struktur dan jaringan

komunikasinya sendiri. Sering bahkan tidak sama dengan definisi formal pemerintah itu sendiri. Tiap kelompok masyarakat memiliki struktur dan jaringan sosial, dan setiap masyarakat punya struktur dan jaringan komunikasinya sendiri.

Hal demikian pada gilirannya akan menghambat kelancaran arus komunikasi, di mana masing-masing orang atau kelompok membuat semacam aturan siapa berkomunikasi dengan siapa. Adanya nilai, norma, dan kebiasaan yang mengatur pola komunikasi dalam masyarakat, akan menyebabkan terpusatnya kepemilikan informasi pada pihak-pihak tertentu dalam lapisan/ stratifikasi masyarakat. Sumbatan-sumbatan arus komunikasi berakibat pada tidak sampainya informasi kepada khalayak sasaran yang tepat. Dengan kata lain ada sebagian orang atau kelompok yang tidak mendapatkan akses pada suatu informasi karena struktur sosial yang mempersulitnya.

Dalam konteks teori relasi pertukaran sosial, sebuah interaksi di antara anggota-anggota dalam jaringan komunikasi merupakan suatu bentuk dari pertukaran sosial yang dipahami dalam level mikro dan makro (Emerson, 1976). Level mikro menganalisis bagaimana suatu hubungan diadik dapat tercipta di antara dua orang yang saling bertukar (informasi) dan pada level makro mengkaitkan struktur sosial masyarakat yang mempengaruhi pola interaksi diadik tersebut. Teori relasi pertukaran berasumsi bahwa orang saling berinteraksi karena ada sumber daya yang dibutuhkan dan dicari yang bisa dipenuhi oleh orang-orang tertentu. Pola interaksi yang terpelihara merupakan gambaran dari tarik ulur *reciprocal power* untuk mengendalikan *power advantage* sehingga relasi yang kohesif dapat terbina dengan baik. Tarik ulur kekuatan yang ada menimbulkan ketergantungan dan keseimbangan yang salah satunya dilakukan dalam proses pertukaran informasi, selain hal-hal yang bersifat materi tentunya.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan komunikasi (*social network analysis*), dalam upaya memperoleh pemahaman mengenai jaringan komunikasi sosial di masyarakat pedesaan pada saat ini. Analisis

jaringan komunikasi adalah sebuah metode riset untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam sebuah sistem, dimana *relational data* mengenai arus-arus komunikasi dianalisis dengan menggunakan beberapa tipe hubungan interpersonal sebagai unit analisis (Rogers & Kincaid, 1981 : 75).

Eksklusi Sosial dan Keterbatasan Akses

Eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu atau kelompok dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat.

Kemiskinan merupakan penyebab terbesar yang membuat orang berpeluang mengalami eksklusi sosial. Karena miskin maka seseorang tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, makanan bergizi, pakaian yang layak, perumahan yang memadai, dan tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja. Bahkan, kemiskinan juga dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memasuki jaringan komunikasi sosial karena perbedaan status sosial-ekonomi dari anggota lainnya dalam jaringan.

Orang-orang yang mengalami eksklusi sosial, juga mengalami keterbatasan akses berbagai informasi. Bisa dibayangkan orang yang

tidak masuk pada jaringan komunikasi mencari pekerjaan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya, orang yang tidak masuk pada jaringan komunikasi bantuan modal usaha akan kesulitan untuk mengakses berbagai sumber permodalan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, orang yang tidak masuk jaringan komunikasi keuangan akan kesulitan mengakses layanan jasa lembaga keuangan. Bahkan apabila seseorang tidak dapat masuk pada jaringan komunikasi sosialnya, maka orang tersebut akan terpinggirkan dari lingkungan sosialnya.

Kriteria yang menentukan tingkatan kemiskinan informasi atau kekayaan informasi seseorang adalah informasi itu sendiri, infostruktur, dan tingkat pemahaman informasi (*information literacy*). Mereka yang miskin informasi tidak memiliki cukup informasi atau tidak memiliki kesempatan mendapatkan informasi yang tepat. Informasi bukan hanya sumber pengetahuan tetapi juga sumber daya spesial yang bisa memajukan kebebasan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bisa dikatakan bahwa akses dan pemanfaatan informasi dan komunikasi adalah kondisi dasar untuk pembangunan karena memberikan dampak pada setiap dimensi kehidupan. Demikian juga, kemiskinan informasi dan komunikasi hanya satu dimensi dari kemiskinan tetapi memberikan dampak pada semua dimensi lainnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, eksklusi social dialami oleh nelayan kecil karena keterbatasan yang mereka miliki. Untuk gambaran mengenai pengelolaan potensi sumber daya laut dapat dilihat dari karakteristik alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Dusun Wanasari, sebagai berikut:

Tabel: Jenis Peralatan Tangkap Perikanan Laut

No.	Keterangan	Jenis Perahu		
		Kecil (1 - 10) GT	Sedang (11 - 30) GT	Besar (31 & lebih) GT
1.	Jenis perijinan	Dinas Perhubungan dan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi	Departemen Perikanan dan Kelautan (Pusat)
2.	Biaya perijinan	Rp 100.000 - 250.000	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
3.	Jenis kayu	Jati	Jati & Merbo	Merbo

4. Harga perahu	Rp 25- 50 juta	Rp 60 - 200juta	Rp 200- 500juta
5. Lunas (panjang perahu)	5 - 8 Meter	9 - 11 Meter	12 - 15 Meter
6. Jenis alat tangkap	Jaring, Arad,Bubu	Gill Net	Gill Net
7. Panjang jaring	0,5 - 2 mil	2 - 4 mil	5 - 7 mil
8. Harga jaring	Sampai Rp 50juta	Rp 90 - 180 juta	Rp 180 juta lebih
9. Jenis ruangan yang ada dalam perahu	0 - 1 Palka (tempat penyimpanan ikan)	1.Cerubung 2.Kamar mesin 3.Palka (tempat ikan) sebanyak 2 - 3 buah	1.Cerubung 2.Kamar mesin 3.Palka (tempat ikan) sebanyak 4 - 5 buah
10. Jumlah awak/ nelayan dalam satu perahu	2 - 5 orang	6 - 12 orang	12 orang lebih
11. Kapasitas tangkapan yang bisa dibawa	50 - 200 kg ikan per hari (pulang pergi)	5.000 - 10.000 kg ikan per sekali melaut (15 - 30 hari)	10.000 kg ke atas per sekali melaut (1- 2 bulan)
12. Ketersediaan tempat pendingin/ pengawet ikan	Ada yang memakai 1 palka atau membawa fiber atau membawa box	2 - 3 palka (peti ikan)	4 - 5 palka atau ada yang memakai frizer
13. Kapasitas es yang dibawa	2 - 10 Balok	100 - 300 balok (1 palka = 100 balok)	400 - 500 balok
14. Kapasitas solar yang dibutuhkan	30 liter	500 - 2.000 liter	3.000 - 6.000 liter
15. Kapasitas beras yang dibawa	10 kilogram	1 - 2 kwintal	2 - 4 kwintal
16. Jenis lauk-pauk yang dibawa sebagai bekal	Mie, telur, daging, dll. Kurang lebih 1 juta	Kurang lebih Rp 5 juta	Kurang lebih Rp 10 juta
17. Ketersediaan GPRS	Tidak ada	Ada	Ada
18. Ketersediaan kompas	Ada	Ada	Ada
19. Ketersediaan sonar ikan	Tidak ada	Ada	Ada
20. Ketersediaan SSB	Tidak ada	Ada	Ada
21. Jenis alat masak	Kompor minyak tanah	Kompor minyak tanah	Kompor minyak tanah
22. Lamanya di laut	1 - 2 hari	1 minggu 1 bulan	1- 2 bulan
23. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi perbekalan	1 - 5 jam	3 hari	6 hari
24. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki perahu	5 hari	10 hari	1 bulan
25. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaring	Tidak ada waktu khusus, sambil pulang, memperbaiki perahu, dan ketika mengisi perbekalan digunakan untuk memperbaiki jaring	Tidak ada waktu khusus, sambil pulang, memperbaiki perahu, dan ketika mengisi perbekalan digunakan untuk memperbaiki jaring	Tidak ada waktu khusus, sambil pulang, memperbaiki perahu, dan ketika mengisi perbekalan digunakan untuk memperbaiki jaring

Keterangan

(1). 1 mil = 1.852 km, (2). 1 palka = 100 es balok (3). Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki perahu (no. 24) adalah waktu efektif pengerjaan perbaikan perahu, sedangkan waktu galang (waktu dibiarkan di atas tanggul atau tanah) tergantung dari pemilik perahu, (4). Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaring (no. 25) biasanya tidak ada waktu khusus karena perbaikan jaring dikerjakan setelah jaring dipakai sambil pulang, saat memperbaiki perahu, dan ketika sedang mengisi perbekalan, (5). Harga jaring menggunakan satuan berat. Harga 1 kilogram = Rp 100.000 sampai Rp 125.000. Biasa satuannya kwintal, (6). Perbedaan GT dengan PK dalam menentukan jenis perahu: GT = Gross Ton atau bobot kotor perahu, PK = Power Horse (PH) atau Tenaga Kuda adalah ukuran untuk mengukur tenaga mesin. Tenaga Mesin untuk menjalankan perahu. Hubungannya untuk menjalankan perahu dengan bobot kotor yang berat tentu harus menggunakan mesin dengan kekuatan tenaga yang tinggi. Perahu Kecil, Ukuran 1 sampai 10 GT, dapat dijalankan oleh mesin diesel dengan kekuatan 7 – 12 PH (ada perahu yang menggunakan satu mesin ada juga yang dua, untuk perahu arad kebanyakan menggunakan dua mesin). Perahu Sedang, Ukuran 11 sampai 30 GT, dapat dijalankan oleh mesin diesel dengan kekuatan 30 – 70 PH atau dengan mesin mobil dengan kekuatan 135 PS. Perahu Besar, Ukuran 30 GT ke atas, dapat dijalankan oleh mesin mobil ukuran 220 PS. Catatan: Mesin diesel perahu ukurannya PH, sementara mesin mobil ukurannya PS, 1 PS = 0,7 PH. Mesin mobil yang digunakan untuk perahu biasanya dibeli berupa ex mesin mobil dari Singapura. Mesin direnovasi kembali disesuaikan dengan penggunaan untuk perahu.

Berdasarkan spesifikasi jenis peralatan tangkap di atas, maka bisa dibayangkan betapa sulit aktivitas menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan perahu 1-10 GT. Dengan peralatan seadanya dan daya tempuh perahu yang terbatas, para nelayan kecil berjuang untuk mendapatkan ikan di sekitar perairan pantai. Selain itu, untuk nelayan kecil juga tidak tersedia informasi mengenai daerah tangkapan, berbeda dengan nelayan-nelayan yang beroperasi menggunakan

perahu di atas 10 GT.

Untuk perahu di atas 10 GT yang mempunyai daya tempuh bermil-mil disediakan informasi lokasi tangkapan. Informasi mengenai lokasi penangkapan ikan diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) melalui satelit pendeteksi jarak jauh, disampaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan untuk kemudian disalurkan kepada nelayan dengan daerah tangkapan di lingkaran dua ke atas yaitu lebih dari 4 mil. Dinas ini telah memiliki program penyaluran informasi lokasi penangkapan ikan melalui layanan SMS di no HP 0813 9550 3330. Hanya saja, dalam prakteknya Dinas ini menunggu nelayan untuk SMS terlebih dahulu, baru kemudian mereka menyampaikan informasi lokasi tersebut. Informasi SMS lokasi tangkapan berlaku untuk tiga hari, karena setelah itu ikan akan bergerak ke lokasi lainnya.

Pada kenyataannya informasi lokasi penangkapan ikan dari Dinas ini tidak banyak digunakan oleh nelayan. Ada pun yang menggunakan informasi ini adalah seorang mantan pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan, yang sekarang berprofesi sebagai juragan pemilik banyak perahu dan tambak. Juragan ini memberikan informasi daerah tangkapan ikan kepada nahkoda yang hendak atau sedang berada di laut untuk segera mencapai lokasi tangkapan yang teridentifikasi banyak ikannya. Sarana komunikasi yang digunakan antara juragan dengan nahkoda, yaitu dengan menggunakan radio panggil Side Single Band (SSB) yang dimiliki oleh perahu sedang dan perahu besar.

Dari para nahkoda juragan inilah, kemudian nahkoda-nahkoda dari juragan lainnya mencari informasi. Sebelum berangkat ke laut nahkoda mengontak nahkoda yang sedang berada di laut untuk memastikan ikan masih banyak di perairan yang akan dituju. Selain itu, karena faktor keselamatan bersama maka para nahkoda ini akan saling berbagi informasi mengenai lokasi tangkapan ikan sebab apabila terjadi kecelakaan di laut maka kapal terdekatlah yang biasanya akan datang menolong, bukan petugas patroli laut.

Penetapan Kriteria Kemiskinan Struktural

Dalam perspektif struktural pada

umumnya, dikatakan orang atau suatu kelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak memihak kepada kaum miskin. Atau karena negara tidak bisa dan tidak mampu mengurus rakyatnya. Disfungsi yang pertama tampak dalam hal fungsi distributif negara, yakni bagaimana negara mengalokasikan sumberdaya, anggaran, kesempatan ekonomi secara adil. Mestinya, dengan fungsi distributifnya, negara berkewajiban dalam membantu mereka-mereka yang termarjinalkan oleh mekanisme pasar dalam kehidupan ekonomi yang terjadi. Fenomena kemiskinan ekstrem dalam bentuk busung lapar dan kelaparan adalah sebuah cerminan kegagalan negara dalam mewujudkan fungsi distributifnya. Disfungsi yang kedua adalah disfungsi stabilitas, yang mana negara tidak berhasil dalam menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Selain kelaparan dan kemiskinan absolut, masalah pengangguran juga merupakan contoh dari disfungsi negara yang kedua ini.

Ketika memahami kemiskinan struktural, yang banyak dilihat adalah struktur yang ada di sekitar orang miskin. Misalnya struktur perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perkreditan, jaminan sosial, dan sebagainya. Kita sering kali lupa bahwa struktur terkecil dalam masyarakat juga berpeluang untuk menyebabkan kemiskinan struktural, yaitu keluarga. Sering kali kita mendengar perumpamaan bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga miskin, besar kemungkinan dia akan menjadi miskin juga.

Padahal semua manusia pada dasarnya dilahirkan sama. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kenyataan itu adalah ketidaksamaan, karena manusia ketika lahir tidak pernah bisa menentukan dari siapa dan di mana dia ingin dilahirkan. Sehingga dijumpai ketidaksamaan ada manusia yang dilahirkan dalam keluarga yang mempunyai kekayaan yang berlimpah dan kesejahteraan hidupnya terjamin, sedangkan ada sebagian manusia yang dilahirkan dalam keluarga miskin dan hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera.

Keluarga terbentuk dari adanya sebuah pernikahan antar individu, yaitu penyatuan

komitmen seorang laki-laki dan perempuan. Setelah menikah dan mengucapkan ikrar janji sumpah setia, sepasang suami-istri memberanikan diri untuk menambah satu atau lebih anggota keluarganya tersebut dengan memiliki seorang anak atau lebih. Karena mereka beranggapan bahwa, keluarga membentuk unit dasar dari masyarakat kita, maka pengaruh sosial yang paling banyak memiliki efek-efek yang paling menonjol terhadap anggotanya adalah keluarga. Unit dasar ini memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap perkembangan seorang individu yang dapat menentukan berhasil-tidaknya kehidupan individu tersebut. Bersamaan dengan itu pula, keluarga menyiapkan anak-anak untuk menerima peran-peran dalam masyarakat.

Keluarga juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya. Bagi pasangan suami dan istri atau anggota keluarga yang dewasa, keluarga berfungsi menstabilisasikan kehidupan mereka, yaitu memenuhi kebutuhan kasih sayang, sosio-ekonomi, dan kebutuhan seksual. Bagi anak-anak, keluarga memberikan perawatan fisik dan perhatian emosional, dan seiring dengan itu, keluarga juga memberikan pengarahan perkembangan kepribadian. Sistem keluarga merupakan konteks belajar yang utama bagi suatu perilaku, pikiran dan perasaan dari seorang individu. Orang tua merupakan guru yang utama, karena orang tua menginterpretasikan dunia dan masyarakat bagi anak-anak. Orang tua menerjemahkan arti-arti penting yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan luar kepada anak.

Di semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (*role relations*). Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses dimana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki. Sebagai lembaga sosial terkecil, keluarga merupakan miniatur masyarakat yang kompleks, karena dimulai dari keluarga seorang anak mengalami proses sosialisasi. Dalam keluarga, seorang anak belajar

bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka acuan di setiap tindakannya dalam menjalani kehidupan.

Berbagai aspek pembangunan suatu bangsa, tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang saling mendukung, salah satunya sumber daya manusia. Terlihat pada garis-garis besar haluan negara bahwa penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. Hal ini pun tidak dapat terlepas dari peran serta keluarga sebagai pembentuk karakter dan moral individu sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas baik tentunya memerlukan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya adalah melalui pendidikan. Pendidikan baik formal maupun informal, pendidikan dalam keluarga salah satunya.

Pendataan dan Sosialisasi Program Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan serta pengurangan kemiskinan beserta percepatannya mencakup dua pokok, yaitu pendataan dan sosialisasi. Aspek pendataan kelompok-kelompok miskin dalam berbagai kategorinya baik berupa penduduk miskin maupun keluarga miskin masih menjadi masalah, dalam upaya menentukan siapa sebenarnya yang berhak disebut penduduk miskin.

Penentuan kriteria penduduk dan rumah tangga miskin telah ditetapkan oleh BPS, dan digunakan sebagai dasar bagi penentuan penduduk dan keluarga miskin di Indonesia. Secara sederhana, pengertian terhadap kemiskinan diambil dari besaran penghasilan/pendapatan per-orang yang digunakan untuk mengkategorikan miskin-tidaknya seseorang. Ada beragam pendapat mengenai definisi kemiskinan ini. Mulai dari pendekatan standar kemiskinan internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yakni mereka yang berpendapatan di bawah US\$ 2 per hari, sampai ke pendekatan kebutuhan ragawi, yakni

penghasilan yang dibutuhkan untuk memungkinkan konsumsi senilai 2.100 kalori per kapita per hari. BPS sendiri, sebagai lembaga data resmi Pemerintah, mengukur angka kemiskinan dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penanggulangan kemiskinan memang sulit sekali dilakukan kalau data mengenai orang miskin hanya berupa persentase dari jumlah penduduk, baik itu di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, seperti yang sekarang dimiliki oleh BPS. Misalnya dikatakan 15 persen dari penduduk di Kabupaten X adalah miskin. Ada data-data mengenai orang miskin yang disertai dengan nama, RT/RW/desa di mana mereka tinggal, dan indikator kenapa mereka miskin. Data tersebut memang bisa dipakai untuk menunjukkan jumlah orang miskin, siapa dan tinggal di mana. Tapi data itu tidak bisa dipakai untuk melakukan upaya menarik orang keluar dari kemiskinan.

Untuk bisa mengentaskan orang dari kemiskinan, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab kemiskinannya. Bhinneka Tunggal Ika, demikianlah semboyan yang dijunjung Indonesia. Semboyan itu juga berlaku untuk masalah kemiskinan. Indonesia bukan hanya bervariasi dalam kondisi geografis dan ekonomisnya, tapi juga dalam kondisi politik dan sosialnya. Akibatnya, indikator kemiskinan tidak bisa hanya ditetapkan pada tingkat nasional dan diberlakukan secara umum. Contohnya berdasarkan tingkat pendapatan yang dihitung per hari, padahal dengan kondisi yang tidak menentu seorang nelayan bisa jadi suatu hari memiliki pendapatan yang besar, tetapi di hari-hari berikutnya bisa tidak berpenghasilan karena tidak mendapatkan hasil tangkapan. Seorang petani tambak karena sudah berhutang kepada bakul untuk bibit, pupuk, pakan, obat, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, maka ketika panen bisa jadi bukan penghasilan yang diperolehnya malah bertambah hutangnya. Karena itu, yang namanya indikator kemiskinan harus menggabungkan antara indikator nasional yang bisa diperbandingkan dan indikator lokal yang sesuai

dengan fenomena kemiskinan di masing-masing daerah.

Berdasarkan kebhinnekaan fenomena kemiskinan di Indonesia, pendataan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sentralistis yakni lembaga-lembaga nasional seperti BPS dan Bappenas menentukan indikator-indikator kemiskinan yang kemudian diberlakukan secara umum untuk mengidentifikasi orang miskin di segala penjuru Indonesia. Kalau pendekatan sentralistis itu yang dilakukan, bisa dipastikan identifikasi orang miskin tidak akan akurat, bukan saja dalam hal orang miskinnya, tapi juga penyebab kemiskinannya yang jelas beragam dari satu daerah ke daerah lainnya. Alhasil, upaya menarik penduduk keluar dari kemiskinan juga tidak akan pernah berhasil.

Memang selama ini ada ketidakpercayaan yang besar terhadap Pemda dalam hal penentuan jumlah penduduk miskin. Banyak yang khawatir apabila Pemda diberi wewenang untuk melakukan pendataan orang miskin, mereka akan melakukan penggelembungan jumlah penduduk miskin, yang kemudian mereka pakai menekan pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah mereka masing-masing. Semakin banyak jumlah penduduk miskinnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk memperoleh peningkatan DAU. Kalau hal itu terjadi, data tentang penduduk miskin yang terkumpul juga tidak akan bisa dipakai untuk mengembangkan strategi pengentasan penduduk miskin. Masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan mekanisme kontrol bagi Pemda untuk secara tepat dan akurat mengidentifikasi orang miskin dengan bantuan pengawasan dari BPS. Karena kalau diperhatikan, BPS ada perwakilan kantor cabang di setiap Kota Kabupaten di Indonesia.

Permasalahan mendasar kedua terkait dengan sosialisasi program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Aspek ini sangat menentukan keberhasilan program pengurangan dan penanggulangan kemiskinan karena merupakan wadah untuk pengenalan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi program. Sosialisasi ini mencakup pula pemberdayaan saluran-saluran komunikasi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang telah

ada.

Mengingat betapa banyaknya program-program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, tetapi yang menjadi sasaran program tidak tahu kalau ada program untuk mereka. Sebaliknya program hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan para Pemimpin formal yang dijadikan saluran komunikasi. Maka dapat dimengerti bila banyak dari program-program tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kecenderungan yang ada adalah kegiatan sosialisasi program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan bersifat seremonial. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengundang unsur-unsur pemerintahan, dinas-dinas terkait, dan pemuka-pemuka pendapat yang dipersepsi dapat menyalurkan pesan kepada masyarakat. Padahal justru masyarakat memiliki saluran dan jaringan komunikasinya sendiri, yang selama ini belum diidentifikasi secara serius.

Lemahnya Koordinasi Lembaga Informasi Pusat dan Daerah

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengelola segenap urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal serta urusan agama. Namun demikian urusan komunikasi informasi berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tidak secara jelas/tegas merupakan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga keberadaan Lembaga Komunikasi Pemerintah Daerah yang ada di provinsi, Kabupaten, Kota sangat beragam tidak menjadi keharusan, dan tupoksinya tidak mengacu pada tupoksi Departemen Kominfo. Keberadaannya juga bukan merupakan sub ordinasi Departemen Kominfo. Akibat dari hal itu, lemahnya dasar hukum perihal koordinasi antara lembaga informasi pusat dan daerah yang berpengaruh pada terhambatnya arus informasi nasional.

Dari aspek Kelembagaan keberadaan lembaga Komunikasi Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 ditambah dengan persepsi terhadap fungsi komunikasi informasi (pelayanan informasi) yang tidak

proporsional dan subyektif menimbulkan keragaman nomenklatur, tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup kewenangannya. Ini terjadi hampir di semua daerah, keragaman nomenklatur lembaga infokom di daerah yaitu: Badan, Biro, Dinas, Kantor, Bagian, Bidang bahkan Seksi yang bersifat tidak operasional. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya kelancaran arus informasi dan diseminasi informasi nasional, apalagi sampai saat ini persepsi Pemda tentang lembaga komunikasi pemerintah daerah masih diartikan sebagai lembaga kehumasan ataupun Kantor Departemen Penerangan pada masa lalu.

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia yang menangani bidang komunikasi dan informasi pada dinas/badan/biro/kantor/bagian di daerah secara umum belum memadai dilihat secara kualitas maupun kuantitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja lembaga tersebut. Dari segi kuantitas SDM yang ada pada lembaga infokom saat ini masih banyak mengandalkan pada potensi yang ada di internal satuan kerja tersebut, mengingat kebijakan Pemerintah untuk menerapkan prinsip nol pertumbuhan (*Zero Growth*) di bidang kepegawaian. Sehingga sulit untuk mengadakan penambahan pegawai baru yang dibutuhkan untuk mengelola bidang komunikasi dan informasi berdasarkan kompetensi tersebut.

Sarana Komunikasi yang diharapkan mampu menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan informasi kurang memadai, hal ini terjadi akibat dari antara lain keterbatasan kemampuan keuangan daerah, persepsi dan bobot yang diberikan pada fungsi diseminasi informasi dan komunikasi sangat beragam dan tidak proposional, terutama untuk Provinsi, Kabupaten/Kota Pemekaran. Sementara itu sarana komunikasi eks Deppen yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kebanyakan kondisinya sudah tidak layak pakai. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus informasi dan diseminasi informasi Nasional.

Sejalan dengan terjadinya reformasi di berbagai bidang terlebih dengan dibubarkannya Departemen Penerangan, dan masalah informasi diserahkan kepada masyarakat serta pelaksanaan otonomi, telah terjadi kesenjangan informasi

nasional dari pusat ke daerah, apalagi kepada masyarakat. Sehingga untuk ini perlu upaya-upaya penataan ulang sistem koordinasi lembaga informasi pusat dan daerah untuk mengetahui kebutuhan informasi nasional yang diperlukan masyarakat.

Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial

Para ahli komunikasi terutama di negara-negara berkembang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap strategi komunikasi dalam hubungannya dengan penggiatan pembangunan nasional di negara-negara masing-masing. Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting karena efektivitas komunikasi bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan. Komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dari pendapat ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Dan karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan.

Dari beberapa hasil penelitian tentang model komunikasi kebijaksanaan program pembangunan selama ini yang dikembangkan oleh pemerintah adalah mengacu pada model komunikasi linier searah dan berbentuk vertikal dari atas ke bawah (*top down*), bersifat perintah dan jika dievaluasi model linier ini mempunyai banyak kelemahan, karena dianggap tidak memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat setempat. Setelah model komunikasi linier satu arah dianggap kurang sempurna, kini pandangan orang mulai mengarah pada komunikasi interaktif dua arah di antara partisipan. Model komunikasi interaktif atau konvergen ini (Schramm 1973; Rogers dan Kincaid 1981) dianggap sebagai suatu transaksi di antara partisipan, yang setiap orang memberikan kontribusi pada transaksi itu, meskipun dalam derajat yang berbeda. Terlebih lagi, model ini berlaku baik untuk situasi komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa.

Dalam pandangan model konvergensi tetap

memberikan ruang bagi orang-orang yang dianggap mampu berperan sebagai pemuka pendapat untuk menerima pesan dari media dan menyebarkannya melalui saluran komunikasi interpersonal kepada pengikutnya. Kecenderungan yang ada adalah penggunaan pemuka-pemuka pendapat yang mudah dikenali, bersifat formal, tetapi memiliki pengaruh yang lemah. Sehingga menimbulkan keterbatasan kemampuan pemuka pendapat formal dalam hal mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya guna memahami berbagai jenis informasi. Dengan demikian pemuka pendapat tidak dapat terlalu banyak diharapkan untuk menyalurkan banyak hal dengan sekaligus. Karena seorang pemuka pendapat yang berpengaruh terhadap sejumlah orang mengenai sejumlah hal, belum tentu mempunyai wilayah pengaruh yang lebih luas mengenai hal-hal yang lain daripada para pemimpin informal.

Hasilnya jaringan komunikasi sosial yang sesungguhnya kurang atau bahkan tidak diberdayakan. Dengan alasan keterbatasan waktu, biaya, dan personil maka jaringan komunikasi sosial belum banyak dikenali oleh para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah pemberdayaan jaringan komunikasi yang kurang menyentuh masyarakat.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi mempunyai posisi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau suatu negara. Atau dalam lingkup yang lebih kecil, ekonomi daerah. Menurut penelitian International Telecommunication Union (ITU), pertumbuhan atau penambahan satu persen teledensitas akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sebesar tiga persen.

Sementara jumlah satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia sangat rendah karena baru mencapai 6,7 juta SST dengan rasio jumlah penduduk sebanyak 220 juta penduduk. Hanya tiga SST untuk per 100 penduduk atau dapat dihitung teledensitasnya hanya tiga persen. Negara ASEAN seperti Singapura tingkat pertumbuhannya relatif sangat tinggi, teledensitasnya mencapai 58 persen, dan Malaysia sudah mencapai 30 persen.

Hal ini menunjukkan, sebagian besar masyarakat Indonesia belum terjangkau fasilitas telekomunikasi, sehingga tak heran jika pertumbuhan ekonominya juga terbelah sangat rendah.

Pertumbuhan pengguna telepon bergerak di Indonesia sangat dramatis. Lihat saja, jika sebelumnya diprediksi bahwa pengguna telepon seluler (ponsel) baru akan melampaui angka psikologis 100 juta pada 2009, kenyataannya di tahun 2008 separuh penduduk Indonesia telah diperkirakan telah terkoneksi akses telekomunikasi, dimana dalam catatan regulator, jelang akhir tahun 2008 saja pengguna sudah melebihi angka 130 juta pengguna. Selain teledensitas pengguna, telepon bergerak juga memberikan kontribusi berarti dalam hal penetrasi (persentase dari populasi). Hampir semua kecamatan di Indonesia telah terjangkau sinyal ponsel. Bahkan kini, operator-operator seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL, juga mulai berlomba-lomba memberikan layanan di daerah terpencil dan terluar di wilayah Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi No. 36/1999, persoalan akses hanyalah di satu sisi. Sementara di sisi lain, ada tujuan yang lebih dari telekomunikasi yang sekadar sebagai alat, yaitu bagaimana layanan telekomunikasi bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Secara kasat mata, diakui memang saat ini begitu banyak kalangan memanfaatkan dan mendapat manfaat dari layanan dan bisnis telekomunikasi. Bukan cuma orang kota, orang tua dan hanya pegawai kantoran, melainkan juga hingga pelosok kampung, anak-anak, serta tukang ojek, bahkan tukang ojek merasa perlu memiliki HP agar pelanggan dapat menghubunginya jika dibutuhkan. Gerai-gerai penjual *voucher* juga bertebaran di mana-mana karena pulsa kini telah melengkapi sembako menjadi kebutuhan pokok kesepuluh.

Selain perkembangan tersebut, kini saatnya kita memikirkan peran besar lain yang dapat disumbangkan telepon bergerak untuk kemaslahatan rakyat. Peran itu berupa layanan nilai tambah, seperti m-government, m-business, m-health maupun m-learning, menggantikan peran e-government, e-business, e-health maupun e-learning yang saat ini masih belum berjalan efektif karena terkendala dengan jumlah pengguna Internet yang

masih sangat jauh dibanding pengguna ponsel.

Dengan m-government, maka sesungguhnya layanan pemerintahan dapat pula dijalankan secara bergerak dan hanya melalui ponsel. Misalnya saja pemberitahuan mengenai masa berlaku KTP dan SIM yang akan habis, semua informasi bisa disampaikan dengan cara mudah, baik melalui SMS, MMS maupun layanan data 3G atau GPRS. Begitu juga dengan layanan bisnis, saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan layanan m-banking. Pendidikan juga sudah mulai memanfaatkan layanan ponsel untuk mengemukakan hasil ujian. Namun sebenarnya, potensinya bisa lebih besar seperti membuka peluang-peluang usaha dan memperluas jaringan pemasaran.

Untuk mewujudkan itu semua yang diperlukan adalah dukungan membangun ekosistem implementasi layanan berbasis telepon bergerak. Pemerintah harus aktif mendukung inisiatif layanan bergerak, terutama untuk layanan publik. Industri ditantang untuk memperkuat infrastruktur dan menyediakan lingkungan akses broadband memadai. Masyarakat perlu juga memberi masukan layanan-layanan yang dibutuhkan, khususnya layanan yang yang mencerdaskan, membangun karakter bangsa dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi menuju masyarakat informasi bukanlah tugas yang mudah, melainkan banyak menemui hambatan. Berbagai permasalahan yang dihadapi mulai dari hal-hal yang bersifat teknologis hingga aspek sosial-budaya merupakan hambatan dalam pelaksanaan program USO ini. Dari aspek teknis, fasilitas telekomunikasi (fastel) ada juga yang sudah rusak baik disebabkan oleh bencana alam maupun karena kesalahan operasional. Dari aspek sosial-budaya, kesiapan masyarakat dalam menerima program ini juga masih terhambat kendala minimnya rasa memiliki terhadap program, belum berkembangnya kesadaran bahwa fastel berpotensi sebagai sarana kreasi dan inovasi, kemampuan berorganisasi masyarakat yang masih rendah, semangat kewirausahaan yang masih minim, dan fastel kurang memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk mengakses karena lokasi

penempatannya lebih banyak dipusatkan hanya di kalangan elit desa.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dusun yang menjadi lokasi penelitian telah merambah jaringan telepon seluler, sedangkan jaringan *fixed line* tidak ditemukan. Kepraktisan dan harga yang lebih murah, menjadi pertimbangan utama bagi warga desa untuk menggunakan telepon seluler. Iklim bertelekomunikasi yang tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat ini ditunjukkan dengan kepemilikan pesawat telepon seluler dan tersedianya tempat penjualan pulsa di desa.

Namun demikian, HP pada kenyataannya belum mampu merubah pola komunikasi antara aparat pemerintahan desa dengan warganya. Karena salah satu sifat menonjol dalam masyarakat perdesaan di Indonesia yaitu karakteristik masyarakat yang patrimonialistik, yaitu adanya tokoh masyarakat yang memiliki posisi sebagai patron (bapak), sedangkan warga biasa atau rakyat pada umumnya adalah kliennya. Hubungan keduanya bersifat vertikal, sehingga arus komunikasi sosial berjalan searah dari atas ke bawah mengikuti hirarki sosial yang telah terlembagakan.

Di antara para aparat desa itu sendiri yang berada dalam lingkungan birokrasi yang memiliki status dan peran secara hirarkhis, ternyata pola komunikasinya masih mencerminkan karakteristik patrimonialistik. Kehadiran HP hanya dipakai sebagai sarana untuk kepentingan yang lebih teknis dan praktis, misalnya dalam mengundang rapat-rapat di lingkungan kantor desa dimana aparat desa dapat menghubungi langsung RW dan RT di bawahnya. Tetapi jika aparat desa yang lebih rendah mengundang rapat aparat yang lebih tinggi, mereka masih tetap menggunakan surat undangan. Bahkan hal seperti ini pun terjadi di antara majikan dan bawahan, seperti pemilik kapal, pemilik tambak dan bakul lebih leluasa menghubungi buruh dan nelayan kecil di bawah mereka, tetapi tidak sebaliknya.

Beberapa negara maju berupaya mencegah jurang eksklusif ganda, yakni tereksklusif secara sosial (termasuk ekonomi, politik, dan budaya) dan secara digital. Misalnya Pemerintah Inggris, antara lain, mengeluarkan kebijakan *e-inclusion* dengan

tujuan memanfaatkan ICT untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Di Indonesia, Program CTLC (*community training and learning center*) Microsoft Indonesia bekerja sama dengan kelompok petani, menunjukkan penerapan Internet membantu meningkatkan penghasilan petani. Petani belajar mengoperasikan piranti komputer yang tersambung ke Internet. Program ini membantu petani mengakses informasi pertanian penting dan bahkan lebih jauh mengakses pasar langsung ke pembeli tanpa melalui pedagang perantara. Tetapi tidak selalu pemanfaatan ICT oleh individu dan kelompok yang tereksklusi secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya, bisa membawa mereka keluar dari status eksklusi itu. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menghubungkan orang dengan orang, bukannya sekedar menghubungkan alat dengan alat.

Simpulan

Saluran komunikasi interpersonal yang ada di masyarakat kenyataannya kurang diberdayakan sebagai saluran berbagai informasi bernilai lainnya. Misalnya untuk informasi mengenai pelatihan dan lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan, ditempatkan di papan pengumuman Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang letaknya di Kota Kabupaten. Sementara masyarakat yang berkeinginan kerja di dalam dan luar negeri menggunakan saluran komunikasi interpersonal tatap muka dengan orang-orang yang sudah dikenal sebagai agen kerja yang punya jaringan dengan kantor penyalur tenaga di Jakarta.

Temuan lainnya di lapangan menunjukkan hambatan struktural dalam hal penyaluran informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi di bidang pendidikan, ketenagaan-kerjaan, pelatihan, pemasaran, penjualan, dan bahkan lokasi penangkapan ikan, nyatanya lebih menguntungkan elit informasi. Misalnya bidang pengembangan sumber daya manusia diperuntukkan bagi mereka yang sudah terlebih dahulu memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Informasi mengenai pemasaran, penjualan, dan perkreditan dikuasai oleh pedagang perantara yang memiliki modal. Lokasi penangkapan ikan dikuasai oleh juragan-juragan perahu besar.

Kemajuan teknologi telah meningkatkan mobilitas sosial dan mempermudah orang untuk saling berinteraksi dimana pergaulan berlangsung berupa kontak-kontak pribadi diikuti oleh tukar-menukar gagasan dan pengalaman. Hubungan manusia dari satu bangsa dengan bangsa lainnya semakin intensif dan dunia seolah-olah menjadi semakin sempit. McLuhan menyebut dunia sekarang sebagai *a global village* (Straubhaar dan Larose, 2002). Televisi menyebabkan *global village* dalam istilah McLuhan dan yang terpenting adalah *essence of information*, misalnya gossip dari mulut ke mulut dipahami dan orang seolah-olah merasa dekat dengan yang mereka bicarakan.

Sumber informasi yang ternyata sudah lebih banyak digunakan adalah TV, radio, dan ponsel. Hampir semua responden memiliki TV, hampir sepertiganya memiliki radio, dan hampir setengah responden memiliki ponsel. Menilik pemanfaatan media tersebut belum digunakan sepenuhnya untuk mencari informasi yang bernilai ekonomi, misalnya TV kebanyakan digunakan untuk menonton sinetron, radio untuk mendengarkan lagu dan musik, dan ponsel digunakan untuk urusan keluarga.

Teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak akan kedekatan informasi yang dibutuhkannya, yaitu melalui ponsel. Sementara radio kontennya ditentukan dari Pusat penyiaran, sehingga radio tidak menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Untuk keberlangsungan hidup media yang sangat diperlukan yakni kontennya. Kemajuan teknologi ini juga telah dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Melalui radio, televisi, film, surat kabar, ponsel dapat dikatakan hampir seluruh pelosok tanah air telah terjangkau oleh jaringan komunikasi yang menghubungkan pusat dan daerah. Pesan-pesan pembangunan dari pusat ke daerah dan sebaliknya dapat disalurkan melalui media tersebut.

Kemajuan teknologi komunikasi jelas akan membawa dampak, baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara positif akan memberikan kemungkinan terjadinya komunikasi secara lebih baik, lebih cepat, dan luas jangkauannya. Sebaliknya, dampak negatif menimbulkan masalah pertentangan sosial

dan perubahan sistem nilai, karena adanya perbenturan sistem nilai dalam masyarakat penerima teknologi yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda.

Kaitannya dengan jaringan komunikasi, asumsinya teknologi memudahkan orang dalam melakukan kontak dengan anggota jaringan lainnya. Selain itu, teknologi juga dapat mempercepat kontak, mengatasi hambatan jarak dan waktu, serta memperluas jaringan yang ada. Seperti dikatakan Monge dan Contractor (2003), bahwa teknologi komunikasi seperti telepon, *mobilephone*, dan Internet telah membuat orang menjadi lebih leluasa berkomunikasi. Bahkan kedekatan fisik (*physical proximity*) sekarang ini dapat digantikan dengan kedekatan elektronik (*electronic proximity*).

Tetapi berdasarkan temuan di daerah penelitian, asumsi-asumsi ini ada yang diperkuat dan ada juga yang dibantah. Teknologi pada kenyataannya bisa mempercepat kontak dengan mengatasi hambatan jarak dan waktu. Namun, teknologi belum terbukti mampu memperluas jaringan. Hal ini dibuktikan dengan pola pemanfaatan ponsel yang lebih banyak digunakan untuk menghubungi orang-orang yang sebelumnya sudah dikenal dan menjadi bagian dari anggota jaringan, atau bukan anggota baru. Dalam hal ini masih ada hambatan yang belum bisa diatasi oleh teknologi komunikasi.

Hambatan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam penelitian ini utamanya disebabkan oleh faktor struktural yang berdampak pada budaya komunikasi tertentu. Contoh di dalam masyarakat ada pelapisan sosial berdasarkan status sosial-ekonomi seseorang. Misalnya seorang juragan pemilik kapal leluasa menghubungi nahkoda melalui ponsel, tetapi tidak sebaliknya. Bahkan kepada orang yang memiliki status sosial-ekonomi lebih tinggi, masih diperlukan orang lain sebagai penghubung, yaitu melalui orang yang sudah kenal baik atau bekerja pada yang bersangkutan.

Pola konsumsi media massa di kalangan orang miskin di daerah penelitian menunjukkan pemanfaatan media lebih banyak pada sisi hiburannya karena itu yang banyak tersedia di media saat ini. Layanan jasa telekomunikasi

diharapkan dapat berperan sebagai pemerata (*equalizer*), karena asumsinya semua orang memiliki kemampuan menggunakan teknologi yang sama sehingga teknologi dapat membuat orang leluasa berkomunikasi dengan siapa pun dan dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkannya. Kenyataannya tidak demikian, sehingga perlu adanya suatu pembelajaran bagaimana menggunakan dan memanfaatkan ponsel untuk meningkatkan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (eds.), 1980, *Kemiskinan Struktural; Suatu Bunga Rampai*, HIPIS, Malang.
- Dahlan, M. Alwi, 1976/1977, *Sistem Jaringan Komunikasi Sosial yang Memadai di Indonesia (I)*, Departemen Penerangan RI kerjasama dengan PT Inscore Indonesia, Jakarta.
- _____, *Pemerataan Informasi, Komunikasi dan Pembangunan*, 1997, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.
- Emerson, Richard M., 1976, *Social Exchange Theory*, *Annual Review of Sociology*, Vol. 2, pp. 335-362, <http://www.jstor.org/stable/2946096>.
- Freeman, Linton C., J. Clyde Mitchell, dan Rolf Ziegler (eds.), 1980, *Social Networks*, Elsevier Sequoia S.A., Lausanne.
- Kincaid, Lawrence D., dan Wilbur Schramm, 1976, *Asas-asas Komunikasi antara Manusia*, Konsultan pengarang Ronny Adhikarya, dibantu Wan Firuz Wan Mustafa dan Habsah Haji Ibrahim, Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
- Monge, Peter R., dan Noshir S. Contractor, 2003, *Theories of Communication Networks*, Oxford University Press, Madison Avenue.
- Rogers, Everett M., dan D. Lawrence Kincaid, 1981, *Communication Networks, Toward a New Paradigm for Research*, The Free Press, New York.
- Setiawan, Bambang, 1989, *Pelapisan Sosial dan*

*Jaringan Komunikasi, Penelitian di
Desa Senik Kalurahan Bumirejo
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon
Progo Daerah Istimewa Yogyakarta,
UGM, Yogyakarta.*

KONTESTASI MAKNA DAN DRAMATISME STUDI KOMUNIKASI POLITIK TENTANG REFORMASI DI INDONESIA

Basuki Agus Suparno
Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
e-mail : basuki.agus@gmail.com

Abstract

This research is political communication study that focus to the political language involving any interpretation and clash of argument to Reformation in Indonesia. Factually, any social problems can be caused of interpretation to the meaning. The quarrel, misperception, misunderstanding, misleading even conflict as well as war can be cause of interpretation to meaning. This research applied pentad analysis that scrutinize the analytic relation among scene, act, agent, agency and purpose. This analytic explained that many groups have different interests by using Reformation as common groud in getting the ends. The results pointed out that there are five objective situations which form the context of Reformation reflecting the battleground of scene or stage where Reformation contention. First, student demonstration that insisted to Presiden Soeharto to step down. Second, IMF and World Bank want to liberalize the economy platform in Indonesia. Third, riots and massive destruction that happened in many places that make pressure to Soeharto. This pointed out the context of contention between actors who conceive it as civil disobedience and social justice. Fourth, Golkar and its underbouw nominated Soeharto become Presiden for the seventh terms in office. Fifth, military frustated in facing demonstration and political changes. Five objective of situation formed the conditions that insisted Soeharto step down. This research seriously implied to politics, history and communication itself in the social movement context.

Key words : *contestation, reformation, meaning and dramatism*

Pendahuluan

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, pemaknaan telah menjadi persoalan komunikasi yang sangat penting bagi berbagai segi kehidupan manusia. Kesalahpahaman, perkecokan, pertentangan, perdebatan, kerusuhan, konflik, dan bahkan perang merupakan masalah-masalah yang dapat timbul dari persoalan pemaknaan. Salah satu dari sekian banyak permasalahan tersebut adalah pemaknaan tentang Reformasi.

Reformasi sebagai realitas sejarah tidak bisa berubah. Namun seperti dikatakan Taufik Abdullah (2006:xxxiii)-semua peristiwa sejarah sebagai *historie recite* itu adalah terbuka bagi rekonstruksi yang berkemungkinan berganti

bentuk dan sering merefleksikan keinginan untuk membenarkan atau menyalahkan. O' Rouke (2002) menyebut Reformasi di Indonesia, sebagai periode yang ditandai dengan intrik, tragedi, misteri dan kebingungan.

Ada yang berpendapat bahwa Reformasi tidak identik dengan pergantian individu melainkan Reformasi berkaitan dengan sistem, struktur dan bukan pada orang (*Republika*, 5 Maret 1998); kembali cita-cita Proklamasi (*Republika*, 24 April 1998); amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945; b) pencabutan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); c) peradilan khusus terhadap pelaku Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); d) peradilan khusus

terhadap pelaku pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia); e) desentralisasi otonomi daerah seluas-luasnya; f) Reformasi agraria dan; g) Reformasi perburuhan (Rachman, 2000: 104-105)

Dalam konteks ini Reformasi merupakan istilah yang mengacu pada pergolakan sosial, ekonomi, politik dan keamanan di Indonesia yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai 1998-an (Crawford and Hermawan, 2002). Sedangkan *structural reforms* adalah langkah perubahan yang diyakini dapat mengatasi krisis ekonomi, memperbaiki kepercayaan pasar dan penataan kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi (Camdessus, 1999; Sach and Warner, 1995; John Williamson, 1993).

Istilah Reformasi, di dalam tataran filsafati dan ilmiah bersifat problematik. Istilah itu memiliki makna yang berbeda-beda. Reformasi (*reformation*) tidak memiliki pengertian yang sama dengan *reforms* dan istilah itu dalam penerapannya mempunyai konteks yang berbeda. Makna dari istilah (*term*) sering berkaitan dengan asosiasi apa yang muncul terhadap *referent* (Ogden and Richards, 1923).

Kenneth Burke (1945) berpendapat bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat berdiri sendiri. Ia harus dijelaskan di dalam konteks di mana ia berada. Makna kata ditentukan oleh konteks yang menyertainya, yakni dibatasi oleh konteks kata (*verbal context*) dan konteks situasi (*context of situation*). Melalui konteks verbal dan konteks ekstra verbal (*extraverbal context*) kata dapat ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk pernyataan yang memiliki makna yang berbeda-beda.

Dalam konteks Reformasi, manusia menggunakan bahasa untuk mewujudkan motivasi dari pilihan-pilihan yang tersedia, apakah aktor-aktor tersebut sebagai mahasiswa, akademisi, birokrat, teknokrat, militer, ekonom, praktisi hukum, pelaku komunikasi, pengusaha, buruh atau siapa pun. Aktor-aktor politik melakukan teknik-teknik komunikasi dalam berbagai bentuk seperti antitesis, analogi, abstraksi, persuasi, metafora, dan sebagainya. Jadi, berangkat dari istilah Reformasi, banyak pihak melakukan politisasi dalam berkomunikasi.

Fakta itu menjadi sebab, kenapa

Reformasi pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia menimbulkan berbagai pertarungan wacana. Masing-masing berusaha meminggirkan wacana lain, konteks dipertentangkan dengan konteks, pemikiran dipertentangkan dengan pemikiran dan seterusnya dengan melakukan legitimasi dan delegitimasi, menyerang dan menyalahkan, menyakinkan dan mempengaruhi, mempertahankan dan mendorong, yang menggambarkan adanya kekuatan-kekuatan yang membentuk iklim wacana (*the climate opinion*).

Dalam posisi demikian, penelitian ini merupakan studi komunikasi politik tentang bahasa politik yang memperlihatkan *the art of delivery* di dalam *mode of action* yang tercermin di dalam drama politik yang mendeskripsikan tuntutan perubahan kekuasaan di Indonesia pada waktu tahun 1997 sampai 1998. Bahasa politik memiliki kedudukan penting di dalam kajian komunikasi politik (Corcoran, 1990:51).

Corcoran mengatakan bahwa bahasa politik di dalam konteks simbolik yang lebih luas terhadap oposisi, distingsi dan diferensiasi memunculkan narasi terhadap perselisihan, kontestasi dan pertarungan. Lebih jauh dikatakan di manapun ada paksaan (*coersion*), resistensi (*resistance*) dan kekerasan (*violence*), di sana akan ada relevansi intuitif terhadap tatanan politik, apakah luas atau sempit didefinisikan di antara atau ditengah-tengah istilah-istilah yang saling berkontestasi di dalam wacana politik.

Sejak awal, tuntutan Reformasi mempersoalkan praktek kekuasaan yang diterapkan rezim Orde Baru. Di bidang ekonomi, implementasi yang dijalankan dinilai sebagai kapitalisme semu (*ersatz capitalism*) (Kunio, 1986); karakteristik kekuasaan rezim Orde Baru sebagai negara birokratik (*bureaucratic polity*) (Jackson and Pye, 1978); otoritarian korporatis (Robinson, 1993); negara pejabat (Mcvey, 1982); dan neo patrimonialisme (Crouch, 1968). Keterlibatan militer yang dominan dalam pemerintahan, adalah sisi lain yang digugat dalam Reformasi. Ini terkait dengan pemikiran tentang demokrasi itu sendiri yang melihat supremasi sipil terhadap militer adalah aspek kunci demokrasi (Crawford and Hermawan, 2002).

Dengan mencermati alur paparan di atas,

pemaknaan Reformasi yang indikasinya dapat dicermati pada tahun 1997 dan mencapai tahap konsolidasi pada tahun 1998 itu, memicu terjadinya kontestasi makna-makna yang luas. Situasi itu menunjukkan upaya berbagai pihak untuk menyakinkan bahwa gagasan Reformasi perlu dilakukan, yang sebenarnya tidak lain, menuntut pergantian kekuasaan itu sendiri. Dalam kancah itu, melalui bahasa sebagai *the art of delivery*, seseorang bisa mendapat predikat sebagai reformis atau status quo, menyatu sebagai kawan atau menyatu sebagai lawan sekaligus bisa sebagai jalan untuk melakukan pelarian politik atau pun sekedar sebagai katarsis-pelepasan.

Reformasi sebagai istilah dalam tahap perkembangan tertentu telah memunculkan perdebatan yang memicu suatu kontroversi dan drama politik kekuasaan di Indonesia yang mempertanyakan tentang fakta, nilai dan kebijakan (Vancil, 1993:26). Karena tidak satupun dari diri seseorang yang mampu membebaskan sepenuhnya dari masalah yang berkaitan dengan usahanya untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah dalam lingkup yang luas di mana kenyataan tampak tidak pernah lengkap dan pasti.

Sesuatu tidak dapat disebut sebagai drama tanpa menggunakan sejumlah situasi yang ditandai dengan konflik (Burke, 1966:29). Situasi (*scene*) itu diperlukan untuk memperlihatkan adanya panggung drama yang menunjukkan adegan-adegan (*acts*), munculnya masalah-masalah sebagai sumber motivasi yang membentuk plot atau alur (Burke, 1966:29). Plot itu sendiri merupakan bentuk dasar dari setiap babagan suatu drama yang mencerminkan tatanan insiden (*the arrangement of the incidents*) (Fergusson, 1961:14)

Di dalam *scene* itu, tergambar adanya berbagai jenis bahasa yang berbeda yang merupakan bentuk dari tindakan (Fergusson, 1961:7). Dalam arti, beragam pemikiran dan karakter tercermin dari penggunaan bahasa. Aspek bahasa di dalam drama sebagai sesuatu yang penting, karena ia merupakan *the art of delivery*. Karakter-karakter mengungkapkan tindakan-tindakan utama di dalam cara yang berbeda-beda. Corcoran mengatakan: *Language- what we do with language is implicated in action* (Corcoran, 1990:67)

Pada prinsipnya tindakan itu sendiri bersumber pada dua hal, yakni karakter dan pemikiran (*character and thought*). Karakter manusia mendisposisikan tindakan (*act*) di dalam cara-cara tertentu, sekaligus merespon perubahan situasi (*scene*) yang terjadi. Sebagai drama, *scene* yang menggambarkan karakteristik kekuasaan Orde Baru diperlukan guna menjadi dasar dan landasan untuk menjelaskan bahwa sumber-sumber masalah itu timbul dari kondisi objektif dari pelaksanaan kekuasaan di bawah pemerintah Orde Baru. Panggung drama Reformasi dibentuk oleh situasi-situasi di mana pemerintah Orde Baru dinilai sebagai pemerintahan yang otoriter, kekuasaan yang sentralistik pada pribadi Presiden Soeharto, intervensi pemerintah yang terlalu dalam terhadap sistem perekonomian, dan bersifat militerisme.

Namun di sisi lain, pemerintah Orde Baru sendiri mengembangkan analogi-analogi dan metafora-metafora yang digunakan untuk menjaga kekuasaan. Ada analogi-analogi dan metafora yang dilabelkan pada aktor-aktor politik yang menginginkan perubahan seperti pengganggu stabilitas, subversif dan manifestasi dari bahaya laten komunis. Mode-mode pemikiran dibangun di dalam konteks dan kedudukan Orde Baru sebagai orde yang ingin melakukan pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang ingin membawa bangsa Indonesia ke arah modernisasi dan tinggal landas melalui program pembangunan lima tahunan. Dengan demikian, bahasa yang di dalam drama diposisikan sebagai *the art of delivery* memperlihatkan adanya berbagai bentuk antitesis antara situasi yang menempatkan pemerintah Orde Baru sebagai rezim yang buruk dengan situasi yang menggambarkan kondisi yang ideal.

Dengan demikian, kontestasi terjadi pada situasi ketidaksepakatan atau pertentangan muncul. Setiap isu mengandung tiga hal yakni segi potensi, segi kontestasi dan segi akseptasi. Potensi suatu isu mengandung pengertian ada segi-segi yang memicu semua pertanyaan vital oleh mereka yang pro dan mereka yang kontra. Sisi ini memperlihatkan lingkup dan kualitas masalah-masalah yang dipersoalkan.

Sedangkan kontestasi mengandung

pengertian bahwa ada pihak-pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan: *clash of argument*. Di dalam lingkup ini ada pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap sumber-sumber masalah yang memotivasi tindakan-tindakan. Sementara akseptasi mengandung pengertian bahwa ada berbagai pihak atau dua sisi yang menerima sisi-sisi yang disepakati atau disetujui (Vancil, 1993:70)

Kontestasi memperlihatkan masalah-masalah dari berbagai perspektif yang berbeda, saling bersaing. Pertama, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka (Vancil, 1993:82). Kedua, mencakup siapa-siapa yang pro dan dan siapa-siapa yang kontra (*agents*). Ketiga, melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif. Keempat, mencermati tentang karakteristik dan sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan di dalam kontestasi tersebut.

Penelitian ini sendiri ditujukan untuk menganalisis pernyataan-pernyataan verbal sebagai bahasa politik yang memperlihatkan adanya situasi yang saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi dan bagaimana aktor-aktor politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan kepentingan.

Selain hal itu, gerakan Reformasi menimbulkan minat banyak ilmuwan dan ahli dalam melakukan penelitian. Riset yang dilakukan Paulus Sulasdi (2001-UI) melihat konstruksi pemikiran surat kabar Kompas tentang Reformasi dengan mendasarkan pada tajuk rencana selama masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dari bulan Mei 1998 sampai Oktober 1999. Kajian yang dilakukan Faruk, Salam dan Dewi (2001-Lembaga Penelitian UGM) memfokuskan pada bagaimana kata Reformasi menjadi sistem makna yang otoritatif. Amat Darsono dalam tesisnya (2002, Universitas Indonesia) secara khusus memberikan perhatian pada soal berhentinya Presiden Soeharto di tengah gelombang tuntutan Reformasi di sekitar tahun 1998.

Metode Penelitian

Dramatistik sebagai pendekatan dan metode menaruh perhatian pada sumber-sumber, keterbatasan-keterbatasan dan paradok-paradoks terhadap penggunaan simbol tertentu terutama dalam hubungannya dengan motif-motif yang dilakukan manusia dalam tindakan komunikasi (Burke, 1968:445). Dramatistik mencakup metode yang melacak implikasi gagasan dalam tindakan komunikasi manusia sebagai makhluk yang secara khusus dibedakan oleh tindakan itu.

Dramatisme memusatkan perhatian pada hal-hal misalnya, jika ada sebuah tindakan sosial pasti ada individu sebagai aktor yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan dalam konteks atau situasi (*scene*) tertentu. Pada tindakan dalam situasi sosial tertentu terdapat instrumen-instrumen (*agency*) yang digunakan bagi upaya mewujudkan tujuan-tujuan (*purpose*) yang hendak dicapai.

Metode dramatisme mengarahkan bahwa bahasa sebagai hal yang primer karena merupakan ekspresi dari sikap seseorang dan tidak ditempatkan sebagai sekedar instrumen bagi definisi terhadap istilah tertentu. Dramatistik menawarkan sebuah cara untuk menentukan mengapa tiap individu di dalam suatu kejadian atau konteks tertentu menyeleksi strategi komunikasi di dalam memberi pernyataan-pernyataan di dalam mengidentifikasi situasi yang dihadapinya.

Dalam pandangan Burke, tujuan *dramatistic pentad* adalah memberi perhatian pada elemen-elemen itu yang ditujukan untuk menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi simbol yang mereka desain, bekerja di dalam penyertaan motif-motif dari tindakan simbolik tersebut. Hubungan antara elemen ini disebut sebagai *ratio* yang melihat kualitas hubungan antara elemen-elemen yang ada di dramatisme.

Dalam posisi demikian peneliti melakukan prosedur fleksibel yang memungkinkan peneliti bergerak dan berubah dari satu *ratio* ke satu *ratio* yang lain dengan memberi titik tumpu pada konteks kejadian dan tindakan. Di sini peneliti menelusuri pernyataan-pernyataan yang teridentifikasi di kejadian-kejadian sepanjang tahun 1997 sampai 1998 di surat kabar Kompas yang memberi arah pada tuntutan Reformasi. Di dalam

rangkaian itu, peneliti melakukan pencerminan terhadap isu-isu utama yang muncul di dalam pemberitaan dan opini. Apa yang peneliti lakukan adalah mengidentifikasi pernyataan-pernyataan langsung dari berbagai aktor politik di dalam sejumlah kejadian yang melingkupinya dan mengarah pada tuntutan Reformasi.

Dengan demikian, sebagai situasi (*scene*), kontestasi terhadap pernyataan-pernyataan dari aktor politik memperlihatkan kondisi bagaimana isu menjadi forum yang memperlihatkan berbagai perspektif yang berbeda yang saling bersaing. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Reformasi sebagai istilah dalam perkembangan dan periode waktu tertentu telah memunculkan perdebatan yang tumbuh menjadi kontroversi yang melibatkan berbagai aktor politik (*agent*) yang sangat luas, di dalam berbagai *scene* kejadian yang berbeda-beda yang membentuk kondisi objektif yang menjatuhkan dan menghentikan pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, Reformasi ini dapat merupakan *scene* yang mengandung adegan-adegan tindakan sebagai *mode of action* dari para aktor-aktor politik yang terlibat. Sementara hubungan antara tindakan-tindakan (*act*) dengan konteks tertentu, memantapkan tujuan-tujuan dari motif-motif yang menggerakkannya.

Di dalam kontestasi ini ada empat hal penting yang merupakan ciri pokoknya. Pertama, apakah setiap aktor politik (*agent*) menggunakan istilah Reformasi untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka tentang kontroversi tersebut yang berhubungan dengan Reformasi. Kedua, kontestasi dapat dicermati dari pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra. Ketiga, kontestasi makna Reformasi itu sendiri dapat dicermati terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk mendalami dan mempertajam motif-motif dari isu-isu yang menjadi sumber kontroversi. Keempat, kontestasi dapat dicermati dari karakteristik dan

sejarah keyakinan serta kebijakan masa lalu yang sedang berlangsung.

Pro dan kontra yang terjadi terhadap permasalahan ini mencakup cerita-cerita yang luas. Namun secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengerucut pada lima panggung utama di mana pertarungan atau kontestasi makna yang semuanya mengikatkan diri pada kata Reformasi serta berujung pada jatuhnya jabatan Presiden Soeharto.

Kontroversi tentang Kepemimpinan Nasional

Ada kondisi objektif dan monopoli, sehingga pernyataan-pernyataan tentang pencalonan Presiden Soeharto, cenderung mengabaikan munculnya tuntutan agar Presiden Soeharto tidak dicalonkan. Situasi dan kondisi tampak terlalu mempertimbangkan segi formal dan kelembagaan. Di dalam pernyataan-pernyataan tentang kepemimpinan nasional, ada semacam batas-batas tertentu yang dikembangkan pemerintah, yang menegaskan bahwa siapa saja yang mencoba melakukan proses penggantian kepemimpinan nasional secara inskonstitusional akan berhadapan dengan ABRI dan akan digebuk.

Pada sisi lain, cara pikir dan pandangan semacam itu, dihadapkan pada proses-proses erosi dan distorsi dalam pernyataan-pernyataan yang lain terhadap mekanisme politik yang telah dibangun pemerintah Orde Baru selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Cara-cara erosi dan distorsi ini dilakukan oleh individu-individu yang berada di luar pengambilan keputusan atau mereka yang dulu pernah di dalam pemerintahan, yang mengambil posisi kritis terhadap pemerintah. (*Kompas*, 7 Januari 1997; *Kompas*, 3 September 1997). Sejarah pergantian kepemimpinan nasional dalam pemerintah Orde Baru merupakan sejarah dominan kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pada kenyataannya, perdebatan-perdebatan yang pada awalnya membicarakan tentang mekanisme pencalonan itu membentuk narasi-narasi lain di seputar tema pokok kepemimpinan nasional tersebut seperti yang terlihat pada pernyataan-pernyataan tentang kebulatan tekad.

Pada gilirannya, kontestasi komunikasi tentang persoalan kursi kepresiden untuk masa bakti 1998-2003 telah berkembang sedemikian

rupa, yang tidak saja menunjukkan bagaimana isu-isu yang ada saling bersaing, tetapi juga menunjukkan potensi pemaknaan dari isu-isu itu memberikan kualitas pemahaman tertentu bagai jejak-jejak komunikasi yang pernah terjadi. Siapa-siapa yang pernah memperingatkan, siapa-siapa yang mendorong-dorong, siapa-siapa yang mengambil jarak serta siapa-siapa yang sangat yakin dan mengantarkan Presiden Soeharto untuk duduk kembali sebagai presiden untuk periode 1998-2003. Meski pada akhirnya, terdapat titik balik, ia dijatuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya sendiri.

Gegap gempita tentang pencalonan kepemimpinan nasional itu pada akhirnya memang mengantarkan Presiden Soeharto menjabat kembali untuk masa bakti 1998-2003. Namun, umur jabatan itu tidak lama hanya sekitar 2 bulan. Ia harus merelakan jabatannya dan mundur dari kekuasaan yang telah dipegangnya selama kurang lebih 32 tahun lamanya.

Pemerintah-IMF: Reformasi Struktural Menuju Reformasi Struktural

Presiden Soeharto sendiri yang menyatakan bahwa krisis moneter ini tidak hanya semata-mata kegiatan bisnis (*act*) yang mencari keuntungan (*purpose*) yang ditambah dengan *gambling*. Namun dibalik itu, menurutnya ada tujuan politik (*agency-purpose*) yang lebih besar (*Kompas*, 10 Februari 1998). Ada pihak yang ingin menghancurkan sistem perekonomian Indonesia yang telah secara susah payah dibangun. Tahun 1997-1998 seperti negara Asia lainnya, Indonesia juga mengalami masalah ekonomi, sebagaimana runtuhnya mata uang Baht Thailand pada bulan Juli 1997, Indonesia pada 19 Januari 1998 rupiah tembus pada angka Rp 17.000,00 per dolar AS (Smith, 2003).

Krisis ekonomi adalah istilah yang menjadi sumber, alasan, atau “common ground” sebagai pengabsah untuk mencabut kebijakan-kebijakan perekonomian yang selama itu telah ditempuh pemerintah. Di dalam pengertian *scene*, yakni krisis ekonomi, terdapat tema-tema krusial yang membentuk pengetahuan secara umum tentang perekonomian Indonesia, seperti fundamental ekonomi, defisit transaksi berjalan, hutang terhadap

pihak luar negeri, dan surplus anggaran yang berhubungan dengan neraca anggaran. Semua dapat dipandang sebagai pernyataan-pernyataan *scenic* yang menunjuk pada latar atau dasar bagaimana tindakan-tindakan dilakukan. Mode-mode tindakan dapat dicermati dari berbagai pernyataan mengenai krisis ekonomi secara luas yang tercermin dari kapasitas dan karakteristik pemikiran mereka.

Dalam perkembangan situasi (*scene to scene*), telah terjadi *reversal of situation* (Fergusson, 1961) yang melihat krisis ekonomi bukan sebagai akibat dari fundamental ekonomi, melainkan karena ada krisis kepercayaan. Penyetaraan krisis ekonomi dengan krisis kepercayaan pada gilirannya menggerakkan orang untuk lebih mencari sebab-sebab krisis kepercayaan. Tema-tema sentral yang berkembang di seputar krisis kepercayaan ini mencakup antara lain korupsi, monopoli, proteksi, kolusi, subsidi, inefisien, transparansi, akuntabilitas, demoikratisasi ekonomi, Reformasi ekonomi serta Reformasi politik. Semua tema itu diletakkan pada konteks secara personal pada diri Presiden Soeharto, kebijakan dan karakteristik kekuasaan Orde Baru.

Dengan melalui tema-tema itu, satu per satu kebijakan yang telah ditempuh dan berakar, secara tiba-tiba dicabut yang mencerminkan apa yang mereka sebut sebagai Reformasi Struktural tanpa mempertimbangkan dampak yang timbul bagi masyarakat secara keseluruhan. Kerusakan dan amuk massa yang timbul akibat implementasi kebijakan yang disyaratkan itu, menjadi pintu berikutnya untuk meminta lebih jauh tidak hanya sebatas Reformasi struktural, melainkan Reformasi politik.

Bila dicermati, terdapat berbagai relasi-relasi penting, yang menunjukkan kontestasi di dalam situasi (*scene*) krisis ekonomi ini. Kontestasi secara keseluruhan diperlihatkan antara *scene* dihadapkan dengan *scene*, bagaimana situasi dihadapkan pada situasi yang lain; bagaimana *act* dihadapkan dengan *act*; bagaimana suatu tujuan dihadapkan antara tujuan dan seterusnya. Kematangan suatu gagasan dimatangkan oleh gagasan berikutnya di dalam keterjalinan dari berbagai elemen, apakah mencakup tindakan, situasi, tujuan, fungsi dari tujuan dan sebagainya.

Di dalam relasi-relasi semacam itu, tema-tema korupsi, monopoli, nepotisme, proteksionisme, kroni dihadapkan pada tema-tema tentang liberalisasi perdagangan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan swastanisasi. Akibat kegagalan pemerintah membangun situasi baru dalam menangani krisis, pemerintah menerima kekalahan sehingga berbagai bentuk kebijakan harus ditunda dan bahkan dicabut. Tema-tema ini dibangun berdasarkan narasi-narasi tentang fundamental ekonomi, defisit transaksi berjalan, hutang pemerintah dan jatuh tempo yang mengakibatkan terjadinya volatilitas rupiah, struktur perekonomian yang tidakimbang (konglomerat dan ekonomi kecil).

Akibatnya, paradigma pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan stabilitas politik dan keamanan, yang merupakan lokasi (*scene*), di mana corak dan karakteristik pemerintahan dijalankan, maka dengan paradigma ekonomi yang mengedepankan pada prinsip-prinsip ekonomi pasar, mengubah karakteristik lokasi dan situasi, bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Dengan perkataan lain, situasi ekonomi (*scene of economy*) menentukan tindakan ekonomi (*mode of act*); situasi ekonomi menentukan tindakan politik; situasi ekonomi menentukan situasi politik (*scene of politics*) dan relasi-relasi yang lain ataupun relasi-relasi yang sebaliknya. Tindakan (*act*) ditentukan oleh *scene* sebagai cara pandang bagaimana mereka menempatkan diri dalam kontelasi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi serta ditentukan oleh fungsi dari suatu tujuan.

Aksi dan Demonstrasi Mahasiswa: Gerakan Moral dan Gerakan Politik

Secara simultan, aksi dan demonstrasi mahasiswa dapat diposisikan dalam kegunaan fungsional yang berbeda. Aksi dan demonstrasi dapat dipahami sebagai *scene* yang di dalamnya memperlihatkan bagaimana corak dan karakteristik tindakan dilakukan.

Pernyataan-pernyataan tentang gerakan mahasiswa itu sendiri, dibicarakan dari berbagai sisi yang menunjukkan segi keluasan dari tema-tema yang membangun narasi dari peristiwa aksi dan demonstrasi mahasiswa yang marak dalam

periode tahun 1997 sampai 1998. Agenda aksi dan demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai 1998, merupakan kelanjutan dari aksi-aksi mahasiswa yang muncul pada tahun 1996 yang belum selesai; pandangan yang menyatakan bahwa gerakan ini hanya mencerminkan romantisme perjuangan; depolitisasi kehidupan kampus; sampai pandangan-pandangan yang melihat aksi dan demonstrasi mahasiswa merupakan gerakan politik yang memiliki tujuan-tujuan kekuasaan yang nyata, seperti menuntut dilakukannya perubahan di bidang ekonomi dan politik hingga menuntut Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Semua segi itu memberi landasan dan latar (*scene*) bagaimana mode-mode perjuangan dinyatakan ke dalam berbagai pandangan tentang perubahan kekuasaan.

Berbagai pernyataan itu dengan sendirinya, di samping menunjukkan lingkup yang luas terhadap aksi dan demonstrasi mahasiswa itu seperti yang telah disinggung, juga menunjukkan luasnya kalangan yang terlibat dan memberi batas-batas terhadap kejadian ini, yang bermuara dua dua tujuan pokok. Pertama, mereka yang menghendaki aksi dan gerakan ini dapat reda bahkan bila mungkin dihentikan, sedangkan kedua mereka yang tetap memberi peluang agar aksi dan demonstrasi ini tetap berlangsung hingga apa yang menjadi tuntutan mereka dipenuhi sampai batas yang sulit untuk ditentukan hingga di mana tuntutan itu harus dikabulkan.

Situasi ini telah menuntun perdebatan-perdebatan yang semakin luas pada suatu pemikiran lain yakni tentang format gerakan mahasiswa. Ada semacam perdebatan yang menunjukkan adanya ambivalensi dalam menempatkan format gerakan mahasiswa ini. Ada yang memandang bahwa gerakan mahasiswa ini merupakan gerakan moral (*moral forces*) yang tidak mempunyai ikatan apapun dengan kekuatan di luar kampus. Di sisi lain, ada yang menyatakan bahwa format gerakan mahasiswa merupakan bentuk embrio dari *people power* yang merangkul rakyat dan membentuk opini yang lebih luas di masyarakat.

Namun, ada pula yang menyatakan secara tegas bahwa gerakan mahasiswa adalah sebuah gerakan politik yang ditentukan sepenuhnya oleh

aksi massa. Di dalam pola ini terdapat relasi antara kondisi objektif dan kondisi subjektif. gerakan dan aksi mahasiswa angkatan 1998 secara faktual mengalami keterbatasan apa yang ia sebut sebagai kekuatan subjektif yang mencakup gagasan, organisasi, kepemimpinan dan basis massa. Kedua, aksi dan demonstrasi mahasiswa angkatan 1998 diuntungkan oleh kondisi objektif dengan terjadinya krisis ekonomi.

Kerusuhan Massa: Kekerasan Pemerintah dan Hasutan Aktor Intelektual

Kejadian-kejadian kerusuhan massa tidak dapat dilepaskan dari kejadian-kejadian lain seperti aksi dan demonstrasi mahasiswa, krisis ekonomi, dan kepemimpinan nasional yang mengkonstruksi tema-tema komunikasi yang membentuk sebuah drama perubahan serta tuntutan tentang Reformasi. Tidak semua orang berpikir dan bertindak dalam cara yang sama. Dalam perspektif ini, di dalam peristiwa itu orang-orang akan memilih diantara cerita-cerita yang saling berkompetisi yang menjelaskan sebuah kejadian tertentu. Cerita-cerita itu yang akan menyusun dan menyajikan sebuah pandangan terhadap realitas dunia yang merupakan seleksi, refleksi atau defleksi melalui deskripsi sebuah situasi tertentu yang mencakup karakter, tindakan dan konteks yang mengelilinginya (Foss, 1996:400)

Secara umum, perdebatan ini terjadi pada persoalan: Apa yang menjadi sebab-sebab kerusuhan massa dan siapa yang menjadi pelaku kerusuhan massa tersebut. Sekalipun hanya ada dua hal umum yang menjadi sentral perdebatan tentang kenapa terjadi kerusuhan-kerusuhan massa dan siapa-siapa yang melakukannya namun di dalam pokok-pokok permasalahan itu, menimbulkan keluasaan isu yang beragam.

Hal yang menarik adalah ada aktor-aktor politik yang melihat kerusuhan-kerusuhan massa, sebagai produk atau eksekusi kekerasan negara yang telah berlangsung lama sebagai kekerasan struktural. Apa yang penting dari pernyataan semacam ini adalah adanya tujuan yang tersirat secara suasis bahwa sumber kesalahan dan kekerasan yang terjadi sebagaimana yang tercermin dalam radikalisme massa, adalah

pemerintah itu sendiri. Kekerasan yang termanifestasikan dalam kerusuhan dinyatakan sebagai pantulan langsung dari cara pemerintah telah melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap warga negaranya yang menyaksikan berbagai penyelewengan birokrasi pemerintah terhadap kebijakan pembangunan yang tidak adil (*Kompas*, 20 Januari 1997).

Dalam pandangan yang demikian, pernyataan-pernyataan ini dikuatkan dengan pandangan-pandangan mengenai kesenjangan sosial dan ketidakpuasan masyarakat; penyalahgunaan wewenang dan jabatan; arogansi kekuasaan dan kekayaan; serta soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Kerusuhan dengan demikian diabsahkan oleh pandangan mereka, yang melihatnya sebagai korban dari pembangunan (*Kompas*, 19 Desember 1997). Kerusuhan-kerusuhan massa yang disertai dengan penjarahan, pembakaran, pengrusakan serta sering menimbulkan korban luka-luka dan kematian itu juga dinyatakan sebagai penghancuran terhadap simbol-simbol kekuatan ekonomi serta merupakan bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pemerintah. Ini merupakan bentuk pembangunan sipil.

Dalam nusa yang lebih mendasar ada yang melihat bahwa potret gerakan perubahan sosial dalam periode tahun 1990-an, ditentukan oleh tiga kekuatan pengubah. Pertama, adalah industrialisasi yang terlihat dalam proses dan kegiatan pembangunan yang mengubah desa menjadi desa ekonomi yang memperlonggar ikatan-ikatan sosial serta tidak lagi berbasis pada ekonomi agraris sehingga menjadi proletariat tulen. Kedua, urbanisasi yang menularkan gaya hidup kota ke desa, sedangkan ketiga internasionalisasi yakni terjadinya tingkat perubahan sosial dunia yang telah menciptakan *new political resources* yang dapat digunakan untuk tujuan reformis dan perubahan.

Pembicaraan-pembicaraan lain sebagai penyebab kerusuhan-kerusuhan tersebut tampak dari pernyataan yang melihatnya sebagai akibat adanya keretakan struktural dan fragmentasi elit politik. Karena keretakan dan fragmentasi elit politik ini, timbul bias permainan politik yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan terjadi akibat

sejumlah elit politik telah melakukan kooptasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai kepentingan politiknya yang kemudian memanfaatkan isu SARA, kesenjangan sosial, ketidakadilan, kolusi, korupsi, nepotisme dan sebagainya. Dalam lingkup isu ini, pemerintah sering menyatakan bahwa di balik kerusuhan massa yang terjadi, ada aktor-aktor intelektual yang menghasut dan antipemerintah. Mereka adalah sekelompok kecil kaum terpelajar atau kaum menengah yang berkecukupan yang selalu menghembuskan situasi pesimis (*Kompas*, 3 Juni 1997). Dengan gambaran tersebut, betapa terlihat bagai konteks situasi tertentu dihadapkan pada konteks situasi yang lain, kualitas tindakan dihadapkan pada kualitas tindakan yang lain, tujuan satu dihadapkan dengan tujuan yang lain, fungsi dari tujuan dihadapkan dengan fungsi dari tujuan yang lain.

Apa yang telah dipaparkan setidaknya telah menunjukkan beragam pernyataan yang memperlihatkan isu-isu penting yang mencakup persoalan sebab-sebab terjadinya kerusuhan massa. Ada pertentangan yang sekaligus menunjukkan persaingan dari satu pernyataan ke pernyataan yang lain, yang satu sisi melihat sumber penyebab itu terletak pada pemerintah, sedangkan di sisi lain, melihatnya adanya permainan elit politik atau aktor-aktor intelektual yang antipemerintah.

Terlihat bahwa kerusuhan massa sebagai *scene* ditentukan gagasan-gagasan mengenai sebab-sebab kerusuhan yang tercermin dari pernyataan-pernyataan tentang kekerasan negara, keretakan struktural dan fragmentasi politik, serta akibat dari proses pembangunan dan modernisasi yang tidak dapat dilepaskan dari proses-proses industrialisasi, urbanisasi dan internasionalisasi. Proses modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan pada satu sisi, sedangkan di sisi lain terjadi marginalisasi. Sementara di ranah politik tengah terjadi fragmentasi dan keretakan struktural yang mengakibatkan elit-elit politik melakukan kooptasi dan permainan politik. Hubungan antara situasi yang berbeda, meletupkan berbagai bentuk kerusuhan

ABRI dalam Ujian Loyalitas

Sikap ABRI yang tercermin dari tindakan

dan pernyataan-pernyataan para petinggi itu, semakin dilematis, ketika gerakan dan tuntutan telah menjadi begitu massif yang datang dari beberapa arah yakni berbagai kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, purnawirawan, ABRI dan ulama (Wiranto, 2003: 79). Kondisi ini tidak mungkin, ABRI akan mengambil tindakan represif yang akan menimbulkan jatuh korban. Meskipun pengingkaran terhadap pemerintah telah diperlihatkan begitu nyata, namun sampai sejauh itu ABRI mampu menahan diri serta tidak melakukan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi dan demonstrasi. Seperti yang dikatakan Harold Crouch (2003), meskipun mahasiswa waktu itu mengatakan "Soeharto harus turun, "Gantung Soeharto" dan macam-macam kalimat keras lain, Jenderal Wiranto yang kala itu menjadi Menhankam/Pangab menjelang Presiden Soeharto mengundurkan diri, masih mentolerir dengan mengatakan mahasiswa bisa berdemostrasi asal tidak di luar kampus.

Dengan gambaran itu, ABRI telah mengambil upaya-upayanya untuk melakukan kendali terhadap situasi dan wacana yang berkembang. Bahkan ketika Presiden Soeharto menyatakan berhenti pun kembali Jenderal Wiranto mengatakan bahwa sebagai sikap menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, ABRI akan tetap menjaga kehormatan dan keselamatan para mantan presiden Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat termasuk Bapak Soeharto beserta keluarga.

Di dalam arus besar perubahan yang terjadi, ABRI telah menunjukkan loyalitasnya terhadap pemerintahan dan konstitusi, meski sebagai institusi, keberadaannya, juga berada di dalam tuntutan perubahan itu sendiri terhadap peran-perannya pada masa lalu yang sering dinilai sebagai represif dan arogan. Oleh karena itu, berbagai pernyataan menyertakan tuntutan Reformasi internal dalam tubuh ABRI yang antara lain menyangkut peran sosial politik dan jatah kursi di lembaga legislatif.

Tekanan berat yang lain datang dari krisis ekonomi dan volatilitas nilai rupiah yang memporakporandakan fundamental ekonomi Indonesia yang banyak orang menilai bersumber dari krisis kepercayaan. Satu per satu landasan-

landasan ekonomi yang diproyeksikan sebagai cikal bakal sebagai struktur ekonomi yang kuat dan tangguh harus dicabut untuk mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan IMF. Struktur ekonomi ini dibongkar secara tiba-tiba yang membawa akibat langsung pada segi kehidupan masyarakat luas. Bahan-bahan kebutuhan menjadi melonjak, perusahaan-perusahaan ditutup, dan pengangguran meningkat yang membawa ketegangan masyarakat menjadi mudah dipicu untuk melakukan bentuk-bentuk kerusuhan massa yang disertai penjarahan, pembakaran dan pengrusakan. Situasi ini ditambah gerakan dan aksi mahasiswa yang bersifat massal yang bergerak pada lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerusuhan-kerusuhan serta bentrok dengan aparat keamanan.

Pada titik kulminasi Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 mengumumkan pengunduran dirinya. Pada tanggal itulah Presiden Soeharto menyatakan: “Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini Kamis 21 Mei 1998.” (*Kompas*, 22 Mei 1998, *Media Indonesia*, 22 Mei 1998, *Habibie*, 2006; *Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 1998)

Di dalam pidato pengunduran diri itu, ada segi-segi penting yang dapat dicermati. Pertama, ada keinginan Presiden Soeharto untuk melaksanakan Reformasi secara tertib, damai dan konstitusional yang diawali dengan pembentukan Kabinet Reformasi. Kedua, tidak ada tanggapan yang memadai, maka Kabinet Reformasi itu tidak dapat terbentuk sehingga perubahan di dalam Kabinet Pembangunan VII tidak diperlukan lagi. Ketiga, dengan kenyataan itu, tugas pemerintah negara dan pembangunan menjadi sulit untuk dijalankan. Keempat, Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Kelima, menyerahkan jabatan Presiden ini kepada wakil presiden untuk dilanjutkan.

Viktimisasi sendiri merupakan bentuk dan upaya individu untuk melakukan penebusan kesalahan atau dosa (*redemption*) yang umumnya mengambil dua bentuk, yakni pertama *mortification*- mengembalikan terjadinya *guilt* pada diri sendiri dan kedua adalah *scapegoat* yakni mencari

faktor eksternal sebagai pihak yang bersalah dan bertanggungjawab.

Dalam drama politik yang terjadi, Presiden Soeharto adalah aktor utama yang ditempatkan dan diposisikan sebagai sebagai akar dari permasalahan sehingga ia disalahkan, dihujat dan didiskreditkan. Persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme sering dihubungkan secara pribadi terhadap kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, yang mengarah pada keluarga Cendana, termasuk aset kekayaan, perusahaan dan yayasan-yayasan yang dikelolanya. Presiden Soeharto dicitrakan sebagai sosok pemimpin yang otoriter, menerapkan kebijakan yang represif, menghalang-halangi kebebasan berpendapat dan keras.

Disamping persoalan pribadi yang tertuju pada pribadi Presiden Soeharto yang merupakan sasaran dari Reformasi, viktimisasi terhadap kebijakan juga terjadi. Di bidang ekonomi misalnya, kegiatan ini dinilai terlalu diwarnai tingginya intervensi pemerintah, adanya praktek proteksionisme, monopoli, korupsi, nepotisme dan kolusi. Perekonomian Indonesia disebut sebagai perekonomian yang semu. Struktur ekonomi ini juga disebut sebagai struktur perekonomian yang timpang karena dikuasai oleh segelintir orang yang disebut sebagai konglomerat.

Simpulan

Sebagai studi komunikasi politik yang meneliti kontestasi makna Reformasi yang terjadi pada periode tahun 1997 sampai tahun 1998, yang didasarkan pada jejak-jejak pesan yang terekam di dalam surat kabar Kompas yang didukung oleh berbagai dokumen, sejumlah wawancara dan bahan-bahan publikasi, terdapat beberapa kesimpulan penting.

Pertama, Reformasi mempunyai makna transformatif yang mencakup tema-tema yang luas, menampilkan pernyataan-pernyataan beragam seperti argumen, antitesa, perbandingan, metafora hingga ke dalam bentuk pertentangan dan kontroversi. Interpretasi terhadap tuntutan Reformasi di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebatas upaya untuk melakukan perubahan. Hal ini disebabkan menguatnya tuntutan itu lebih ditentukan oleh kebersinergian kejadian-kejadian sebagai *scene* yang dimatangkan atau mema-

tindakan-tindakan dari berbagai kalangan yang menyertakan motif-motif komunikasi yang memberi tekanan terhadap rezim Orde Baru.

Pada sisi lain, kondisi-kondisi objektif yang mencerminkan adanya keinginan untuk berubah digunakan untuk mendistorsi konteks-konteks yang dibangun rezim Orde Baru sebagai dasar dan sumber legitimasinya. Karena itu, kontestasi makna terhadap Reformasi tergambar di dalam kontestasi terhadap konteks-konteks yang ada dan berkembang yang saling bertarung dari berbagai aktor-aktor politik yang terlibat. Dalam dramatisme, konteks atau *scene* merupakan lingkup di mana babagan suatu adegan diperlihatkan serta hubungan antara konteks satu dengan konteks yang lain di mana hal itu mencerminkan adanya struktur plot drama.

Kedua, sebagai tuntutan, keberhasilan Reformasi lebih dikarenakan telah menempatkan Presiden Soeharto sebagai “*a device that unifies all those who share the same enemy*,” yakni tuntutan Reformasi disatukan oleh satu tujuan yang sama dengan menempatkan Presiden Soeharto sebagai sasaran dan target dari gerakan Reformasi. Dalam hal ini ada dua pola yang dikembangkan, yakni melakukan pengkambinghitaman secara personal dan kelembagaan politik serta kebijakan politik dalam rezim Orde Baru.

Ketiga, terdapat paradoks-paradoks yang tidak dapat dihindari yang muncul dari persoalan penilaian subjektif personal dalam kaitannya dengan fakta yang terjadi serta kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya. Karena faktor ini, banyak aktor-aktor politik terlihat tidak konsisten dan konsekuen serta bersikap tidak adil terhadap apa yang mereka nyatakan tentang pemerintah Orde Baru dan Presiden Soeharto. Akibatnya cara bagaimana menjalankan konsolidasi kekuasaan setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri telah menimbulkan perpecahan di kalangan mereka yang mendefinisikan diri sebagai kaum Reformis.

Keempat, secara umum penelitian ini melihat kontestasi makna Reformasi dalam dramatisme politik menunjukkan bahwa komunikasi adalah sebuah kekuatan penentu yang menentukan pencitraan tertentu terhadap praktek-praktek pemerintah Orde Baru sekaligus memfasilitasi bentuk-bentuk koreksi, evaluasi,

kritik dan pendistorsian terhadap sumber-sumber legitimasi pemerintah Orde Baru.

Daftar Pustaka

- Aprinus Salam, Shinta Ari Dewi dan Faruk, 2001, *Wacana Reformasi di Media Massa*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UGM.
- Amat Darsono, 2002, *Berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI di Tengah Gelombang Tuntutan Reformasi*, Jakarta: Tesis-Universitas Indonesia.
- Burke, Kenneth, 1945, *A Grammar of Motives*, New York: Prentice Hall.
- , “Dramatism” in D. L Sills (ed), 1968, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol 7, New York: Macmillan
- , 1972, *Dramatism and Development*, MA: Clark University Press.
- Corcoran, Paul E, “Language and Politics” in David L Swanson and Dan Nimmo, 1990, *New Direction in Political Communication A Resource Book*, California: Sage Publication.
- Crouch, Harold, 1978, *The Army and Politics in Indonesia*, New York: Cornell University Press.
- Fergusson, Francis, 1961, *Aristotle’s Poetics with An Introductory Essay*, Massachusetts: The Colonial Press.
- Idi Subandy Ibrahim, (ed), 2003, *Wiranto di Tengah Badai*, Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.
- Jackson, Karl D., and Lucian W Pye, 1978, *Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley: California University Press.
- Kunio, Yoshihara, (terj), 1990, *Kapitalisme Semu di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- M. Fadjroel Rachman, “Peran Politik, Territorial dan Bisnis TNI/POLRI, dalam Dedy N.Hidayat, dkk., 2000, *Pers dalam Revolusi Mei Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mc Vey, Ruth, (terj), 1998, *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- O’ Donnell, Guillermo and Schmitler, Phillippe C,

- 1986, *Transitions from Authoritarian Rule*, Baltimore: John Hopkins University Press.
- Ogden, C.K., and I.A. Richards, 1923, *The Meaning of Meaning The Study of The Influence of Language Upon Thought and of The Science of Symbolism*, New York: A Harvest Book.
- O' Rouke, Kevin, 2002, *Reformasi The Struggle for Power in Post-Soeharto*, NSW: Allen and Unwin, Ltd.
- Paulus Sulasdi, 2001, *Konstruksi Pemikiran Kompas tentang Reformasi Berdasarkan Tajuk Rencana Selama Pemerintahan Presiden Bacharudin Jusuf Habibie*, Jakarta: Tesis-Universitas Indonesia.
- Robinson, Richard, 1986, *Indonesia The Rise of Capital*, Sydney: Allen and Unwin Ltd.
- , “Indonesia: Tension in State and Regime”, in Kevin Hewison, Richard Robinson and Garry Rodan, (ed), 1993, *Authoritarian, Democracy and Capitalism*, New South Wales: Allen and Unwin, Ltd.
- Sulastomo, 2003, *Reformasi antara Harapan dan Realita*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Taufik Abdullah, “Pengantar” dalam Idi Subandy Ibrahim, (ed), 2003, *Wiranto di Tengah Badai*, Jakarta: Institute for Democracy of Indonesia.
- Thompson, John B., (terj), 2005, *Filsafat Bahasa dan Hermeneutika*, Surabaya: Penerbit Visi Humanika.
- Turner, Jonathan H., 1998, *The Structure of Sociological Theory*, Belmont CA Wadworth Publishing Company.
- Vancil, David L., 1993, *Rhetoric and Argumentation*, Boston: Allyn and Bacon.
- Jurnal-Jurnal**
- Crawford, Gordon and Yulius P. Hermawan, 2002, International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia, Contemporary Southeast Asia, Volume 24, Issue 2.
- Smith, Benjamin, 2003, *If I Do These Things, They Will Throw me Out: Economy Reform and The Collapse of Indonesia's New Order*, Journal of International Affairs, Vol.57, Issue: 1.
- Paper**
- Camdessus, Michel, *Economic and Financial Situation in Asia: Latest Development*, Paper- Aisa-Europe Finance Minister Meeting, Frankfurt, January, 16, 1999.
- Sach, Jeffrey D., and Andrew M Warner, *Economic Convergence and Economic Policies*, NBER Working Paper, February, 1993.
- William, John, *Democracy and The Washington Consensus*, Paper, World Development, 1993, Vol.21.
- Surat Kabar**
- Kedaulatan Rakyat*, 22 Mei 1998
- Kompas*, 7 Januari 1997
- Kompas*, 3 September 1997
- Kompas*, 20 Januari 1997
- Kompas*, 19 Desember 1997
- Kompas*, 3 Juni 1997
- Kompas*, 22 Mei 1998,
- Media Indonesia*, 22 Mei 1998,
- Republika*, 5 Maret 1998
- Republika*, 24 April 1998

TEXTUAL ANALYSIS OF *TEMPO* NEWS MAGAZINE REPRESENTATION OF TERRORISM

Prayudi

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta 55282, Telp. (0274) 485268
HP. 0815 680 1807 / e-mail: yudhi_ahmad@yahoo.com

Abstract

Penelitian menganalisis ini bagaimana media berita Indonesia merepresentasikan isu terorisme dalam konteks Indonesia. Representasi peristiwa di media merupakan hasil dari proses yang kompleks dalam institusi media berita. Upaya institusi media berita merepresentasikan realita meliputi teknologi untuk menghasilkan dan mendistribusikan teks; institusi di mana teknologi dibentuk dan dikendalikan untuk produksi teks; dan bentuk-bentuk kultural yang berhubungan dengan strukturasi produk teknologi media dan organisasi; bagaimana bahasa dan makna disusun ke dalam kode. Lebih jauh, institusi media berita harus pula mempertimbangkan konteks politik dan kultural dari peristiwa yang terjadi. Sehubungan dengan hal ini, isu kontroversial dan penting seperti serangan teroris dan perang internasional terhadap terror dikelola dan direpresentasikan sesuai dengan kebijakan internal organisasi media dengan mempertimbangkan kondisi aspek kultural dan politik. Media berita yang menjadi objek penelitian ini adalah majalah berita Tempo.

Key words: *Indonesian press, terrorism and Islam*

Introduction

The representation of terrorism in Indonesian news media is very much influenced by the rise of civil society in which citizens are given the opportunity to express their interests, needs and ideas, and to achieve their mutual goals in order to consolidate a sense of collective destiny and a ‘civil’ society. The condition has created opportunities for new political parties and social groups like Muslim organisations to appear. It has also driven the new idea of freedom of the press in Indonesia. The press becomes more critical in reporting an issue. News media policies also experience significant changes. Under the New Order authoritarian press system, the government determined media and editorial policies. They were required to be congruent with government communication policy. However, post New Order conditions Meanwhile, and in a more libertarian press system, the owners and professional editors are free to determine their own policies in accordance with

a democratically formed regulatory regime. Government communication policy only regulates the press in order to ensure they obey codes of ethics and law. To this extent, controversial and highly significant events like the recent terrorist attacks and the international ‘war on terror’ are managed and represented according to the internal policies of the news media organizations, rather than the directives of government. The news media, however, still need to consider cultural, political and industrial contexts that come from outside the news media institutions.

This research analyses *Tempo* representation of terrorism. With libertarian and critical reporting style, *Tempo* has become a leading news magazine in Indonesia. Even after the banning of this magazine in 1994 by the New Order regime for four years, *Tempo* was able to gain its reputation as the leading news magazine when made its return in 1998. Therefore, to look at how it represents the news on terrorism in Indonesia is inter-

esting in terms of media-government and Islam-terrorism relationships. The complexity of the news representation was also analysed in relation to the dynamic of political changes that occurred in the era of 'reform' and industrial context that may affect editorial policy.

Analytically, the study investigates how the Indonesia news media represent the issue of terrorism. The representation of terrorism in the Indonesian news media is the result of a complex construction process which incorporates cultural, political economic and industrial factors. The video disc that recorded the confession of the suicide bombers who committed the 2005 Bali bombing were broadcasted on global television networks. As with many other terrorist attacks, the terrorist strategy of promoting and communicating causes is clearly illustrated in the broadcast. As Walter Lacqueuer (1987, 1993) has noted, terrorism in this sense is fundamentally a communication event. The ways in which the media represent the issue, then, plays a significant role in shaping how people think about the issue (Chomsky, 2001, Lewis, 2005). At the same time, the news media has to consider various factors in reporting the issue as terrorism is a sensitive and potentially divisive issue. It is then interesting to analyse how different Indonesian news media represent issues of terrorism within an Indonesian context.

Mainly, this research is comprised into two sections. First section outlines the profile and editorial policy of *Tempo* news magazine. The discussion of the profile of *Tempo* is pertinent to give the historical background of the news media institution that had affected *Tempo*'s editorial policy in representing news on terrorism. Further, the research outlines how the meaning of news representation of issue of terrorism in *Tempo* news magazine has been constructed.

Tempo: the Profile and Editorial Policy

The Profile

Tempo was first established in the form of magazine in 1971 by some young journalists: Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Bur Rasuanto, Christianto Wibisono, Yusril Djalinus and Putu Wijaya. *Tempo*'s vision was to become the guidance in the process of enhancing people's free-

dom of thought and expression and to build society that appreciates smartness and difference of opinion. Published in the New Order era, *Tempo*'s professional practice of journalism gained high appreciation from its readers, but was disliked by the regime due to its critical reporting style. Phone calls and warning either from the state or military agencies were common during this period. As editor-in-chief of *Tempo*, Bambang Harymurti, said, "A staffer's conviction to a story may often be challenged, but never crushed. If a story deserves to be told, it will be printed regardless of the consequences" (Company profile of *Tempo*, 2006). It did not take long time for *Tempo* to become a respective news weekly magazine.

Tempo's critical and libertarian reportage, however, had resulted in the banning of the magazine twice during Suharto's New Order (1982 and 1994). The first banning (nearly for two months) was employed due to *Tempo*'s reportage on the issue of unrest in the Golongan Karya campaign. This magazine was considered to have spread hatred among supporters of this Suharto's political vehicle. The second banning, as has been discussed in research 6, relates to the reportage of the buying of 39 ex German warship for Indonesian Navy. *Tempo* had been considered to have played between Financial Minister, Mar'ie Muhammad against Minister of Research and Technology, Habibie. The last banning, along with the banned of two other news media, had triggered protests from the banned news media journalists and employees, students as well as academicians.

Whilst lodging a lawsuit to the state court against Minister of Information policy, some ex *Tempo* journalists continued its journalistic work via virtual world. Since 1996, *Tempo*'s news online portal was launched for the first time through its web address www.Tempointeraktif.com. This strategy was brilliant in relation to struggle for the freedom of the press as well as to continue *Tempo*'s vision to become the guidance for freedom of expression. It was made possible as the government was not aware of the power of virtual world and therefore gave less attention to this issue (see Sen & Hill, 2000).

At the end of Suharto's regime, the maga-

zine made its return on 6 October 1998 and gained its popularity. In order to expand its readers and go international, *Tempo* launched its Japanese edition of *Tempo* interactive in July 2000 and English edition of *Tempo* magazine on 12 September 2000. To fulfil the need of its readers for daily news, the editorial board of *Tempo* published *Koran Tempo* (*Tempo* Newsresearch) on 21 April 2001 with its general objective to report news critically and in the ‘liberal’ tradition, which informs the western democratic Fourth Estate model. As part of its commitment to become an independent news media institution, PT *Tempo* Inti Media Tbk., which publishes the magazine, allows its employees and public to own the company’s share so that no parties are dominant and may endanger *Tempo*’s editorial policies.

First published in 1971 with 20,000 copies, *Tempo*’s circulation has now reached 300,000 copies, which is quite high for Indonesian media industry. In relation to this issue, *Tempo*’s senior editor, Goenawan Mohammad, gave his comment:

There was no miracle responsible for our current readership numbers. Today *Tempo* is the most read publication of its kind. *Tempo*’s story of survival and success has something to do with its constant efforts to be highly reliable, both as a news organization and a business enterprise.

Most of *Tempo*’s readers come from higher educational background. It is well known among its readers and society to be one of credible news sources.

Since made its return on 29 September 1998, *Tempo*’s name cannot be separated from weekly news magazine that is independent and presents news with professional journalistic standard. Supported with three decades of experience, *Tempo* always becomes a leader in its field. Actuality, in-depth and accuracy in reporting will always become *Tempo*’s characteristic.

Editorial Policy

Tempo news magazine employed editorial policy where it refused any interference from any parties. Its critical and libertarian reportage have become strong characteristics of this magazine. Its

form as a magazine has made it possible for *Tempo* to employ in-depth reporting style. The editorial board of *Tempo* realized that in term of timeliness, magazine was less fast than newsresearch that daily published; and adopting in-depth reporting was a way to deal with this situation.

To adjust with the news magazine format, *Tempo* adopts feature writing style with the combination of soft news and feature stories writing. This writing style has become a characteristic of *Tempo* with the purpose to reach wider audience and to involve them with the stories they read. Mary Gillepsie, feature writer of Chicago Sun-Times, said,

News writers love the rush they get when they run out and cover a breaking news story. Meanwhile a feature involves readers on the level of “This could happen to you”. You are teaching people something about themselves (in Itule & Anderson 2003, p. 124).

As the consequence of the adoption of this writing technique and in an attempt to influence public, *Tempo* frequently uses figurative language (symbolism, metaphor) and three forms of persuasion: ethos (credibility), pathos (emotion) and logos (argument).

Tempo has a principle that public will only trust the media if it acts accordingly and responsibly, which are simply to be professional. Within the context of recent terrorist attacks, *Tempo* principally adopted fair, check and balance, and cover both sides’ principles. For instance, as further discussed in the next section, it appeared in the form of the reportage of Pesantren Al-Islam, Ngruki. Despite high coverage of the accusation of the radical teachings of this pesantren and the relation of some of its alumni with some terrorism events as reported by western news media, *Tempo* professionally stayed neutral from the debate. Bambang Harymurti, editor-in-chief of *Tempo* commented, “*Tempo* is also known in the industry for its ability to harness the creative energies of its staff within an environment of mutual respect, professionalism, and journalistic independence.” Within *Tempo*’s perspective, public deserves the right to interpret the news freely. As Stuart Allan says, “Journalism is charged with the crucial mis-

sion of ensuring that members of the public are able to draw upon a diverse ‘ market place of ideas’ to both sustain and challenge their sense of the world around them’ (2000, p.49).

The same policy was also employed by *Tempo* in reporting how the government managed terrorist attacks in Indonesia. Despite a long history where the magazine was ever banned twice by the government, *Tempo* attempted to stay neutral in reporting this issue. If it thought that the government had done nothing or tended to be slow to overcome the issue, it would criticize the government. On the other hand, *Tempo* gave credit to government or security authority when it was able to capture the suspected perpetrators. This was evident in the case of the capture of Imam Samudra, one of the 2002 Bali bombing perpetrators. In its No. 39/XXXI/25 Nov-1 Dec 2002 edition, *Tempo* used most of police news sources to describe the arresting process of Imam Samudra and in the end gave compliment to the police, although at the same time remained it not to easily satisfy.

Tempo was aware of its position as the leading news magazine in Indonesia which placed it at the centre of public life. To *Tempo* news magazine, it was its responsibility for giving expression to a richly pluralistic spectrum of information sources that helped constructing the context for the public to make judgement of the terrorism events. Thus, there was no need for the media to take aside except to the interest of the public. This principle is in accordance with *Tempo*’s vision to be ‘ a guide in the process of enhancing society’ s freedom to think and to express their opinion as well as developing society that appreciates intelligence and opinion difference’ .

Within the above understanding, certain issues like the relationship between Islam and terrorism in Indonesia and how the Indonesian government dealt with terrorism had become big concern to *Tempo*. The analysis of *Tempo*’s representation of terrorism is examined in detail in the next section. It is focused on how the meaning of issue of terrorism is presented and constructed in *Tempo* news magazine. Further, it is examined within cultural, political, and industrial contexts.

***Tempo* Representation of Terrorism**

Terrorism has always been an issue with high news value to news media institution. In Indonesia, this issue increases as the perpetrators of terrorism have used religion to legitimize their acts of terror. As Hoffman said,

The combination of religion and terrorism can be cited as one of the main reasons for terrorism’ s increased lethality. The fact that for the religious terrorist violence inevitably assumes a transcendent purpose and therefore becomes a sacramental or divine duty, arguably results in a significant loosening of the constraints on the commission of mass murder (1995, p. 280).

With terrorism events such as the 2002 Bali bombing, the 2003 JW Marriott hotel and the 2004 Australian Embassy bombings in Indonesia, which have claimed hundreds of lives, have been associated with Islam in the country, and have damaged the Indonesian reputation in the international world, it is unlikely that the news media would ignore the issue. Nonetheless, how the news media institutions represent the issue is interesting to analyse.

The representation of the three terrorism events in *Tempo* news magazine is interesting in relation to the cultural, political as well as industrial contexts. *Tempo* has a long history as a leading news magazine that reports news critically and in the ‘ liberal’ tradition, which informs the western democratic Fourth Estate model. Its relation with government, especially in the New Order era, with two banning, proofs how this news magazine will report the news that are considered important to public regardless of the consequences. And terrorism is one among other issues that are considered important for the public to know. Thus, *Tempo* felt it was necessary to report the issue as part of its responsibility to public.

Tempo is widely known with its in-depth reporting style. In the case of the 2002 Bali bombing for instance, more than tens of *Tempo*’s news magazine editions were dedicated to report the development of terrorism in Indonesia that had been associated with Islam. Meanwhile, more than tens of journalists were involved in the data and

news gathering to give solid, actual and reliable information to public.

Principally, *Tempo* tended to represent the issue through cultural and political perspectives. Based on these perspectives, it gave special attention to the following issues: (i) the investigation process conducted by the police, and (ii) disclosure of the terrorist network. This is signified by the intense reporting of all the issues above. In particular, *Tempo* gave high attention to the third issue. Why did *Tempo* focus on these two issues?

Tempo felt it was necessary to seriously report the issue of terrorism based on some arguments. *First*, after the 9/11 attack toward the United States, there has been global misperception where Islam has been identified as a religion that teaches violence. Something, according to *Tempo*, needs to be clarified. *Secondly*, *Tempo* felt it was its obligation to do news investigation in order to find the 'truth' about how there were radical groups that justified their acts of terror in the name of Islam. This issue had become special attention to *Tempo* as part of its social control in representing news on the teachings of Islam so that there wouldn't be any disputes within society, considering the fact that Muslims are dominant within the country. The analyses of the representations of the issues above are divided into sub headings to make it easier to understand.

The Investigation Process Conducted by the Police

The first issue that relates to political perspective is how the police conducted the investigation process. The representation of this issue had been a big concern to *Tempo* as terrorist attacks nearly occurred every year since the year 2000. In each reporting of the three events, there were always several news features that specifically dealt with the issue, or the investigation process always included in one among other issues in the main news features. Nonetheless, unlike *the Jakarta Post* daily in which issued editorials that principally blamed intelligence for not acting as an early warning system; *Tempo* tried to be fair in reporting the issue. *Tempo* gave credit to the police if it had been able to identify and capture the perpetrators of the acts of terror, but criticised it when

failed to do so. This is interesting considering the fact that *Tempo* had been banned twice and received several warnings from the government. This can be proof of professional and reliable journalistic practice as Goenawan Muhhamd said in his interview.

Besides reporting the investigation process, *Tempo* also gave attention to issues of conflict between police and military, and lack of coordination among intelligence agencies. Through these representations, *Tempo* intended to warn government and related agencies that the acts of terror kept happening due to lack of coordination among government agencies responsible for national security. *Tempo* also wanted to show its readers, as part of public's right to know, what the Indonesian government had done in managing the terror attacks.

These representations are evidence in some of *Tempo* news features such as *Setelah nirwana terbakar* [After Nirvana Burnt], (No. 34/XXXI/21-27 October 2002), *Amrozi Dicokok, Ba' asyir Tergeret?* [Amrozi arrested, Ba' asyir next?] (No. 37/XXXI/11 - 17 November 2002), *Simpul 'syahid' sang imam* [Imam's syahid knot] (No. 39/XXXI/25 November-1 December 2002) (the Bali bombing); *Akhir pelarian Hambali* [End run of Hambali] (No. 25/XXXII/18-24 August 2003), *Mereka-reka otak pelumat Marriott* [Guessing the destroyer of Marriott] (No. 24/XXXII/11-17 August 2003), *Mengendus bomber berlogat Melayu* [Discovering a Malay bomber] (No. 37/XXXII/10-16 November 2003) (the Marriott hotel bombing); *Doktor bom dari bilik-bilik gelap* [A bombing PhD from dark rooms] (No. 30/XXXIII/20-26 September 2004), *Satu jejak bom Kuningan* [A clue of Kuningan bombing] (No. 31/XXXI/27 September-03 Oktober 2004) (the Australian embassy bombing).

Of the three bombing events, *Tempo* gave more coverage on the issue of the investigation process conducted by the police in the 2002 Bali bombing. It is because the 2002 Bali bombing was the first bombing event that had killed many foreigners, especially Australians. Therefore, how the security apparatus dealt with this issue would invite international attention. The bombing also marks

the shift of JI's attack with its main objective to destroy western or related interests and to establish *khilafah Islamiyah* (Islamic entity). Further, this issue is interesting in relation to *Tempo's* attempt to portray the work of Indonesian police after separation from the Indonesian army (TNI) in 1999. News items describing the investigation process read as follows:

After Nirvana Burnt

Who the perpetrators of Bali bombing are remain dark. Officers face difficulty to investigate witnesses.

.The police still have no leads regarding the bombing perpetrators. They have launched a big operation called "Great Bali Operation" with 30 days operational target. Around 5.515 Indonesian police personals involves in the operation. Not to mention foreign intelligent force helping the team. At this time, Indonesia receives help from 11 American Federal Bureau of Investigation (FBI) agents, 26 Australian Federal Police, 2 people from German, and 2 people from Scotland Yard, and some others from Japan, Swiss, Swedia, and Finlandia...

...The scenario of who the perpetrators are and what the motives behind the event remain unclear. Speculations spread around the issue. Western media, for instance, believes that Legian bomb was the work of Al-Qaidah cells in Indonesia. Minister of Defence Matori Abdul Djilil also accused Usamah bin Ladin network was behind the bombing. "It is based on the intelligence information that I have received," he said. On the contrary, radical Islamists believed that the tragedy was only the work of Western intelligence to destroy the image of Islam. The police had made some possibilities: from act of Islamic radical movement to drug syndicate war. None can be proven though..(No. 34/XXXI/21-27 October 2002).

Amrozi arrested, Ba' asyir next?

The police believe Amrozi is the Bali bombing perpetrator. But his relation with Ba' asyir and international terror movement still need to prove.

Amrozi is not an ordinary prisoner. According to the police, he is the main actor and one of the Bali bombing perpetrators that killed 186 people and wounded more than 200 people. The Police announced Amrozi as the suspect. He is the suspect of act of terror that the world considered as the most devastating event after World Trade Centre tragedy in New York, United States of America, 11 September last year.

The fugitive had been caught. The police looked happy. This was the first time the police was able to capture a person in the case of Bali bombing and was immediately labelled as suspect. Before, the police was unsure with the involvement of those arrested. Mainly they were *Temporarily* under investigation, but eventually released and was labelled "possible suspect" ...

From the suspect's house, the police found some evident. Among them were a plastic bag of brown hung, a plastic bag of white crystal, a plastic bag of white powder, a passport, a photo album, and a white Toyota Crown car with a license plate number G 8488 B. Further, the police also confiscated five tires and a car seat of L-300, a mini bus to be used to carry the explosive materials that destroyed Legian area...

After his second marriage failed, he went to Malaysia and became a coolie there. The police accused Amrozi, during his stay in the neighbouring state, to have built relation with radical Islamists that is now called as *Jemaah Islamiyah*. "He also has travelled around Singapore and Thailand," said a police officer. During the investigation, the police said that Amrozi knew Hambali and Imam Samudra-two suspects behind Christmas bombing two years ago. Amrozi even said that Bali bombing was directly led by Imam (No. 37/XXXI/11 - 17 November 2002).

Tracing Malay bombers

Dr. Azahari and Noordin M. Top's tracks were hardly traced. Their cellular phone signals could not be located. What were their friends' confessions?

A police official kept looking at his notebook on the table. On the screen, there were two faces of main suspects that must be captured either dead or alive: Azahari bin Husain, a man with thick glasses, and Noordin Mohammad Top. This official with civilian cloth never felt bored staring at the two Malaysians who were accused for masterminding the bombings in Bali last year and JW Marriott Hotel in Jakarta, early in August this year. Sitting at a hotel lobby, we could see a small gun hiding in his leg.

These hunters kept tracing their main suspects from villages in Lembang, North Bandung, up to the hill area in Gunung Batu, which was difficult to walk through. It was because the Chief of West Java Police Headquarter, Inspector General Dadang Garnida, said that the two terrorists were possibly still in West Java province. It was in this area that the cellular phones' signals of Dr Azahari, age 45, and Noordin, age 33, were last detected before they escaped from the police ambush, in a house on Kebon Kembang street, Tamansari, Bandung, on Thursday two weeks ago...

Chief of Indonesian police, General Da' i Bachtiar, had another analysis. According to the former Chief of East Java Police Headquarter, it was possible that both Azahari and Noordin aka Isa were now in the area with the same culture. Moreover these two neighbouring citizens could not leave their Malay accent.

The analysis from the top person in the Indonesian Police force was based on some arguments. In Sumatra, Azahari successfully deceived the police and was disguised for nearly eight months. The mastermind of the bombings on Legian street, Kuta, Bali and closed to the American Consulate in Renon, Denpasar on 12 October 2002 was traced by the police after a member of this terrorist group, Idris aka Gembrot, was arrested in Medan, last July. It was from him that the police received confirmed information: one of Kumpulan Mujahidin Malaysia (Malaysian Mujahidin Group) leaders which were hunted

by the then Prime Minister Mahathir Mohamad, kept changing places (No. 37/XXXII/10 - 16 November 2003).

In the first and third news feature above, *Tempo* portrayed the difficulty the security apparatus faced to uncover the mastermind behind the bombings. The help that came from some foreign intelligent indicates how the Indonesian government was not ready to manage terrorism. In the early 2000, Indonesian government denied the existence of terrorism in Indonesia, moreover on the accusation that there were radical Islamic groups who had adopted method of violence to establish *khilafah Islamiyah* (Islamic entity). *Tempo* further portrayed how each party within community and international world seemed to have its own opinion on the issue. This portrayal represents how the bombing had created chaos within community as well as government and raised accusation one another. Implicitly, *Tempo* wanted to remain the security apparatus to seriously investigate and arrest the perpetrators in order to give certain condition to public. The reporting of all parties that commented on the issue also signifies how *Tempo* attempted to accommodate their opinions in the reporting.

Interestingly, in the second news feature, *Tempo* described the success of police investigation team in arresting one of the suspected perpetrators of Bali bombing. It constructed the news feature by chronologically reported the arresting process and how the police finally came up with the suspect name. This reporting was meant to inform public the progress the police had made following the bombing. Nevertheless, through its editorial within the same edition as the news feature published (No. 37/XXXI/11 - 17 November 2002), *Tempo* warned the police not to give misleading information to public considering the arrest of suspected perpetrators as follow:

[When the arrest of Amrozi was first broadcasted on television on last Wednesday during daytime, head of public relations division of East Java Police Headquarter denied the news later in the afternoon...This denial was confusing as the arrest information came from the police news source.

Nonetheless, since last Thursday afternoon, the arrest and the determination of suspect status toward Amrozi were admitted by the Chief of Indonesian Police, General Da' i Bachtiar, exactly the same as reported the day before...Some people suspected that this misinformation-misleading explanation to create certain effects-had been purposively launched by the police. The goals of this technique were never explained. This misinformaton, which principally equals to simply lying, could bring negative impacts to many parties, and could be embarrassing when exposed.]

The representation of the investigation process as shown through the news features above represents the professional journalistic practice of *Tempo* news magazine. Why? It is because within the context of media-government relationship, *Tempo* has long history with the government where the news weekly magazine had ever been banned twice. Nonetheless, *Tempo* had taken a legal way to lodge the lawsuit against the government via court. Apart from the fact that *Tempo* finally failed to win the case, this issue indicates how *Tempo*-as part of its vision to build society that put respect on opinion difference-had professionally taken the issue via court instead of rallied on the street protesting the ban.

The same case can also be seen via news features above. *Tempo* portrayed the police attempt to investigate the bombing and the police success to capture the perpetrators behind the bomb. With the adoption of in-depth and investigative news gathering technique and the implementation of news feature writing, *Tempo* was able to detail the information both during the investigation process as well as the capture process of the bombing perpetrators. Considering its history with the New Order government, *Tempo* could have given small portion of reporting of the police success in capturing the bombing perpetrators. This is why *Tempo* has been regarded as one of the most read news magazine (AC Nielsen 1999 and 2002) in Indonesia and has been the trusted news sources to many of its readers. Thus, *Tempo* is truly a news media institution that employs a professional journalistic practice.

This issue of investigation process is also crucial to report so that public and especially international world knew to what extent the Indonesian government seriously managed these acts of terrorism and assured that this kind of event would not happen again in the future. Within *Tempo's* perspective, the reporting of the investigation process as well as the arresting of the perpetrators of the bombing were part of public's right to know. In times of confusion, uncertainty and threatened feeling, public requires reliable information. Furthermore, the three bombing events occurred within the dynamic social and political conditions in the early reformation era where Indonesia was still searching its new way to a democratic state. That was why public needed information sources that can be trusted and news media like *Tempo* became one of them. As stated in its mission, *Tempo* wants to be a news media that "is independent, free from capital owner and political pressures."

It is what the Pew Centre for Civic Journalism called as civic journalism, which is "a belief that journalism has an obligation to public life-an obligation that goes beyond just telling the news or unloading lots of fact. The way we do our journalism affects the way public life goes. Journalism can help empower a community or it can help disable it" (Itule & Anderson, 2003, p.12). *Tempo* had been able to demonstrate a professional implementation of journalism rather than to be a simple publication.

In relation to the freedom of the press in the era of 'reform', *Tempo* did not experience any significant changes in its editorial policy which was just like in the era of New Order repressive regime. It was because it had adopted a liberal way of reporting based on principles of fairness, check and balance, independent, and accuracy since its establishment. These principles were further adjusted with the social and political conditions within the country. Nonetheless, it doesn't mean that *Tempo* did not face any challenges in this era of 'reform'. As described in research VI, *Tempo* had to deal with some challenges from particular groups within society that principally against the freedom of the press. *Tempo's* consistent reporting had led this magazine to receive some acknowl-

edgements from some institutions such as Best Cover from Asia Publishing Congress, Singapore in 1986 and Medal of Honour from Missouri School of Journalism, United States in 2004.

Tempo's liberal and critical reporting toward government, for instance, can be seen in the news feature *Ketika nirvana terbakar* [After nirvana burnt] as follows,

After Nirvana Burnt

Who the perpetrators of Bali bombing are remains dark. Officers face difficulty to investigate witnesses.

. Instead of solving the case, military and police quarreled against each other. A police from the Bali Police headquarter admitted that he did not get good result when investigating a witness from the military. "There is a pressure from military officials not to prolong the investigation on them", said the source. On the other hand, military police commander of Bali region, Colonel Pranoto, denied the fact. However, he said, "What the use to investigate if it only worsens the condition? Moreover all investigation must first obtain permission from the commander. All must go through me." He in turn insulted the police for working slowly and carelessly. "They have no sense of crisis," he said. (No. 34/XXXI/21-27 Oktober 2002).

This paragraph was placed at the end of the news feature that became the main story in the edition a week after the 2002 Bali bombing. Through this representation, *Tempo* criticised the conflict that occurred between the police and the military which may hamper the investigation process. *Tempo* had deep concern that the separation and bigger role of the police from the military may create obstacles, just as in the investigation process of the bombing. Since the separation in 1999, the police have been given the responsibility for internal security, whereas external defence remains the domain of the military. Unfortunately, the division process was not followed with the enhancement of the police capacity which was shown by the slow response to the terrorism attack. The military, on the other hand, considered that counter-terrorism and intelligence should have been

part of its role. This "grey area" has resulted in the increasing gap between the military and the police (see ICG No.90/2004). And *Tempo* implicitly portrayed this issue through the above paragraph. It can conclude that as part of its role as the fourth estate, *Tempo* played its social control function toward the state by criticizing the conflict that occurred between the police and the military.

Another important issue that *Tempo* critically portrayed and can be categorised in the investigation process was how officials or ministers within governmental structure had accused one another to be responsible for what happened in Bali. News feature exhibiting this issue appeared as follows,

Accusing one another in managing Legian
Hundreds of people died in Legian, Cabinet members quarrelled. Why did the government seem slow in handling the case?

. In a cabinet meeting the following day, the issue of how to manage the tragedy was nearly not included in the agenda. In a meeting at the Presidential Palace attended by all cabinet members, a quarrel occurred between Vice President Hamzah Haz and some ministers whom he accused did not do anything in managing the case.

Whilst showing a news research, Susilo Bambang Yudhoyono said he felt offended with what Hamzah Haz had said. "Frankly, we are offended with Vice President's statement who said that we were only *NATO* (no action, talk only). We had worked hard, but why we were embarrassed such a way outside," Susilo protested.

It was his fellow worker in politic and security, head of the State Intelligence Agency, A.M. Hendropriyono, gave his comment. He also criticized Hamzah Haz's statement in the newsresearchs. According to Hendro, a vice president should have not issued such a statement.

Mega (President) who led the meeting remained silent. She did not do anything to neutralize the tension. That was why the tension raised when Hamzah replied the two retired generals. This quarrel was nearly unstoppable if Minister Jusuf Kalla did not talk to Susilo

not to be provoked by Hamzah's answer. Consequently, the meeting meant to find the solution on how to handle the bombing last for five hours. It finished at three o'clock in the afternoon. Fortunately, the meeting agreed that government would implement government regulation as the replacement of act on antiterrorism... (No. 34/XXXI/21 - 27 October 2002).

Through this news feature *Tempo* explicitly criticized Megawati's government incompetency in handling the act of terror. It is signified by the quarrel between the vice president, who before the bombing strictly against the possibility of the existence of terrorists from radical Islamic group in Indonesia, and minister of defence and head of state intelligence agency. After the bombing occurred, he accused that security apparatus-intelligence and the police-were responsible for what had happened in Bali.

The news feature above again proved the high quality of *Tempo* in depth reporting where its journalists could obtain information and chronology of the cabinet meeting. And, as one of *Tempo's* editorial board said,

With its weekly news magazine format has made it possible for *Tempo* journalists to spend days, weeks, and even perhaps months, researching a compelling topic and then writing in depth. You could hardly see *Tempo* journalists attended a press conference. We will meet the source after or before the press conference to obtain different perspective as well as information presented in the press conference (name to be anonymous, interview held in Jakarta, 2006).

The portrayal of the issue above was to give *Tempo's* readers a description of how Megawati's government was not ready in dealing with terrorism. This was proven with the issuance of government regulation as the replacement of act on antiterrorism, after the terrorist bomb exploded in Legian which claimed hundreds of life, which some of them were foreigners; whereas since the year 2000, several bombings had occurred in Indonesia, but no action was taken seriously to pre-

vent terrorists from continuously launched their acts of terror in Indonesia. The slow response of Megawati's government toward terrorism events had politically affected her image in the 2004 general election. *Tempo* even made polling at the end of 2002 regarding government performance in dealing with terrorism, and the result was no shocking where 70.14 % of respondents felt threatened with act of terrorism.

It then can be concluded that *Tempo* had fairly reported the investigation process where it reported not only the obstacles the police had to face in finding the bombing perpetrators, but also the success of the police in arresting suspected perpetrators. Nonetheless, as part of its role as the fourth estate, *Tempo* also criticized the government for not seriously managing the terror events and tended to be reactive instead of proactive. The next issue discusses the final issue that became *Tempo's* main focus attention of the portrayal of bombing events in Indonesia.

The Disclosure of Terrorist Network

The third issue related to *Tempo's* representation of recent terrorist events was the disclosure of terrorist network in Indonesia. Although placed as the third issue in this study, this issue can be considered to have received *Tempo's* extensive reportage. It can be seen from not least than ten editions and more than a hundred news features of *Tempo* news magazine, ranging from 2002 to 2004 bombing events. Some arguments can be proposed from the representation of this issue in *Tempo* news magazine. First, as the most populous Muslim country in the world, Indonesia had been accused as the terrorist haven. Secondly, some radical groups had used Islamic values to justify their acts of terror through the adoption of method of violence to reach their goals. As the consequence, Islam had been associated with religion that legitimised violence.

As the media that claimed to be the representation of society, *Tempo* felt it was its obligation to report the news that was written fairly and balance. Through the representation of this issue, *Tempo* attempted to show to its readers the terrorist network that had been related with Osama bin Laden's al-Qaeda. Further, it attempted to give

the background as well as to end the debate that rapidly grew within community concerning Islam, radicalism and terrorism in Indonesia.

Of the three bombing events, *Tempo* gave more coverage of the terrorist network post 2002 Bali bombing. Why? It is because Bali bombing was the first terrorist attack, according to some analysts, related to western interest; also, the accusation from international world that the attack had been launched by radical Islamists. Therefore, *Tempo* employed indepth and investigative reporting to disclose the terrorist network. The investigative reporting had involved tens of *Tempo* journalists and correspondents from some places in Indonesia as well as in other countries such as Thailand and the United States. Some news features relate to this issue include *Jejak Ba' asyir di Sungai Manggis* [Ba' asyir's trace in Manggis river], *Perjalanan seorang Ngruki dua* [Journey of the second Ngruki] (No. 35/XXXI/28 October-3 November 2002), *Balada sang pendakwah di Negeri Sembilan* [Balad of the preacher in Negeri Sembilan] (No. 36/XXXI/4-10 November 2002), *Al-Islam yang mendadak tenar* [Al-Islam's sudden famous] (No. 37/XXXI/11-17 November 2002), *Simpul ' syahid' sang Imam* [Imam's syahid knot] (No. 39/XXXI/25 November-1 December 2002), *Jihad Al-Mukmin sampai ke kantin* (No. 40/XXXI/02-08 December 2002) (the Bali bombing); *Desainer bom yang paling dicari* [Most wanted bomb designer] (No. 26/XXXI/25-31 August 2003), *Upaya menjerat Dr. Azahari* (No. 27/XXXI/25-31 August 2003) (the JW Marriott Hotel bombing); *Dokter bom dari bilik-bilik gelap* [Bomb doctor from dark rooms] (No. 30/XXXII/20-26 September 2004). The emphasis on the disclosure of terrorist network was evident in *Tempo* news features as follows:

Journey of the second Ngruki

Ngruki was a homeland to Abu Bakar Ba' asyir. From that place, he started his life as a hard line Islamic preacher.

..The establishment of Al-Mukmin Islamic School (pesantren) derived from 30 minute noon prayer lectures at the Surakarta Great Mosque. Abu Bakar Ba' asyir and Abdullah Sungkar usually preached in turn...

Since then, the Islamic school developed rapidly. At the moment, the school had approximately 2,000 students from all over Indonesia. As the founder, Ba' asyir wrote a book that became the guidance in the school. The title was *Tarbiyah Islamiyah* and was used by year seven students. In the school, the students were taught the understanding of the necessity to uphold *Syari' ah Islam* (Islamic law) as the rule of life. "Upholding *syari' ah Islam* widely is impossible to do without power. Studying *akidah* (at Al-Mukmin) means understand the essential of political Islam" said Muhammad Nursalim, a researcher of IAIN Yogyakarta who wrote a thesis about Al-Mukmin.

...Suspicion toward Sungkar and Ba' asyir came to its peak after the 1977 general election. At that time, Golkar won and the government was increasingly aware of radical Islamic movement. Sungkar and Ba' asyir were suspected to intentionally establish Indonesia Islamic State (Negara Islam Indonesia or NII). It was said that Ba' asyir had joined Haji Ismail Pranoto, the leader of NII in Central Java. The issue, however, was denied by Ba' asyir. (No. 35/XXXI/28 October-3 November 2002).

Imam's syahid knot

It was no mistake when Abdul Aziz chose his alias as Imam Samudra. His calmness was as wide as an ocean. When shown to journalists last Friday, one day after arrested by the police, he appeared calmly. Wearing black t-shirt with a brand of a sport product from America, the country he hated, his gaze wipe around tens of people's eyes and cameras that stared at him...

The ' calm' appearance of Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Kudama and other alias had invited controversial stories. "He confessed to have planned the Bali bombing," said Chief of Indonesian Police, General Da' i Bachtiar. Public could soon believe that Imam with a ' cool' face was a cruel terrorist; unlike when the police captured Amrozi, the playboy from Tenggulun, Lamongan, East Java...

Imam admitted that he learned jihad and military skill in Afghanistan for two and half years. He learned how to use M-16 and AK-47 weapons and how to set mines. He went to Afghanistan after finishing his study at Madrasah Aliyah Negeri (equals to senior high school) in Serang, Banten...

Imam really had a full confident. He believed that he was untouchable. He even took his wife and children in the terrorist operation that he called as jihad. The risk of death was put aside for the sake of syahid with heaven as the repayment. That was what Iqbal had done, his friend who carried suicide bomb that destroyed Paddy's Café. "It was the real peak of syahid," said Abdul Aziz to the police officer who interrogated him (No. 39/XXXI/25 Nov - 01 Des 2002).

Bomb ghost from Johor

Nobody could understand why Azahari bin Husin could turn into the most frightening bomb ghost in Southeast Asia. It was because since he was young, very little clues led to the radicalism of this math genius. It was suspected that the cause must have left deeply in the life of the 46 years old professor, so that he decided to join in a militant Islamic group and travelled across Afghanistan and Philippines. Azahari went to Australia for four years in the end of 1970s, when most of Malaysian students preferred to study political Islam as the impact of Islamic revolution in Iran. However, none of radical or religious groups had invited Azahari's interest. "He never joint the groups" said a Malaysian police officer.

After returned to Malaysia, Azahari and his wife taught at the Malaysia University of Technology in Skudai, Johor. At that time he even hadn't shown strong Islamic sentiment. Malaysian intelligence suspected that the change occurred in mid 1990s when he often attended the recitation of the Quran held by the late Abdullah Sungkar and Abu Bakar Ba'asyir.

.First, the police thought that the sick of his wife after birth giving his second child would be the catalyst of change within Azahari. What

happened was the other way around. He went to Afghanistan and southern Philippines at the end of 1990s. "It was since in the Philippines that he became obsessed with bomb making" said a Malaysian security official.

"He was like a re-born Muslim" said a Malaysian police source. It was quite different from other followers of *Jemaah Islamiyah* network who mostly came from villages and obtained their Islamic teaching through Islamic boarding school (No. 27/XXXII/01 - 07 September 2003).

The three news features above principally discuss two significant issues in relation to the disclosure of the terrorist network: *pesantren* (Islamic boarding school) and suspected bombing perpetrators. Why are these two issues? It is because some Islamic boarding schools had been accused for teaching radical and narrow understanding of Islamic values and the perpetrators of acts of terror were *pesantren* graduates. Shuja (in TerrorismMonitor 2005), in his report, identified five *pesantren* (Islamic boarding school) include al-Mukmin in Ngruki, Sukohardjo in Solo, al-Muttaquien in Jepara (Central Java), Dar us-Syadah in Boyolali (Central Java) and al-Islam in Lamongan (East Java). He claimed that alumni network of *pesantren* graduates were important element within the terrorist structure. The recorded confessions of perpetrators of Bali II suicide bombings in October 2005 indicate how young men of *pesantren*, with their narrow understanding of the meaning of *jihad*, believed that what they did was to wage *jihad* and that they would go straight to heaven after death.

All these accusation, added with the coverage of western news media that had associated Islam with violence, had created uncertainty within community, even government. Nevertheless, it can't be denied that there were particular groups who had adopted and misused Islamic teachings for their political ends. Thus, as part of its role to inform public of the real condition following the bombing events and to reduce uncertainty, *Tempo* felt it was necessary to report the issue.

The three news features explicitly highlight *pesantren* Al-Mumin in Ngruki, Solo, Central Java

led by Abu Bakar Ba' asyir; Imam Samudra who had been accused to have planned the Bali bombing attack; and Azahari who expert in making bomb. By placing all the news features above as main cover stories for several editions, *Tempo* had been attempting to uncover the terrorist network. Nonetheless, *Tempo* carefully named the group who launched the attack as *Jemaah Islamiyah*. Even four months after the 2002 Bali bombing, in its end year edition, *Tempo* still did not dare to use the name *Jemaah Islamiyah*, but uncover how the name had come to surface.

In the case of first news feature (Journey of the second Ngruki); *Tempo* portrayed the internal condition of Al-Mukmin Islamic Boarding School (pesantren) established by the late Abdullah Sungkar and Abu Bakar Ba' asyir. *Tempo* brought this issue to surface because both founders and the school were believed to have taught radical understanding of Islam to its students. Furthermore, some perpetrators of act of terror were Al-Mukmin graduates. This condition had created an opinion as if this pesantren had produced terrorist graduates. Therefore, *Tempo* reported this issue as part of its role to fulfil public's right to know and to reduce uncertainty and anxiety within community. Nevertheless, *Tempo* tried to be neutral in its reporting. Consequently, the meaning of the news feature can be comprehended as follow:

It is true that Ba' asyir had implemented hard discipline at the Al-Mukmin Islamic Boarding School in Ngruki, Solo. The students were taught the necessity of understanding Islamic law as the way of life, but none of the teaching material related to terrorism. The late Abdullah Sungkar and Ba' asyir's preach, since the early establishment of the school, tended to criticise government who they considered as secular government. This had made the New Order government, at that time, classified both to have involved in the establishment of Indonesian Islamic State (NII). Implicitly, however, *Tempo* did not find any direct link between the school and the so called *Jemaah Islamiyah*.

Within *Tempo* perspective, this representation was necessary to avoid misjudgement and

generalisation of pesantren to be the place for Muslim radicalisation. Also, to report the case of Abu Bakar Ba' asyir based on the principle of fair and balance, without having to get involved in the issue.

The second and third news features portrayed the profiles of Imam Samudra and Dr. Azahari. Imam Samudra was, based on his claim, the planner of the 2002 Bali bombing and Dr. Azahari was expertise in bomb making. The reporting of the profiles of these suspects was evidence of *Tempo*'s attempt to disclosure the terrorist network. The news features were constructed through in depth reporting style that involved investigation process conducted by the reporter.

The representation of the second and third news features signify the fact that terrorists existed and lived among society. The reporting of Imam Samudra's profile, for instance, was published after the police was able to arrest the man based on the confession of Amrozi, the first Bali bombing suspects that had already been arrested. This representation was mean to inform public that there were groups within society who had misused Islamic values (such as *jihad*) and had adopted method of violence to justify their acts of terror. Samudra's calm and confident appearance in front of journalists, but confessed to be the planner of the Bali bombing shocked public who since the bombing were under uncertainty as there had been growing debate whether there were radical groups in Indonesia.

The similar understanding can also be employed to the third news feature portraying Dr. Azahari. The reporting of this bomb expert who originally came from Malaysia may have become a proof that there was a terrorist network that span along some Southeast Asian countries (see ICG No.63/2004). Therefore, the government of these countries need to work together in combating terrorism.

Implicitly, *Tempo* gave its complement to the police for being able to arrest those who were suspected to be the perpetrators of acts of terror, but at the same time warned that terrorism would always be a threat to the national security, existing government as well as society. The warning could be analysed from the reporting of the dangerous

of Azahari as a bomb expert-before finally shoot to dead in early November 2005-and Samudra's statement in the last paragraph who said that suicide bombing was the true peak of *jihad*.

In general, textual analysis yields some interesting findings in relation to the *Tempo*'s representation of the disclosure of the terrorist network was meant to inform public that terrorists existed and lived among society and had become an imminent threat to Indonesia's national security that had just entered the era of 'reform'. The detailed description of al-Mukmin Islamic boarding school and two suspected terrorists was to provide *Tempo*'s readers with information needed to make judgement under uncertainty condition. It was able to play its role as the story teller and stayed independent in the issue. With the form as a news magazine that is published weekly, *Tempo* had adopted in-depth reporting and written the news in the form of feature to give different way of news reporting.

Conclusion

Tempo's libertarian and critical reporting style has made it a leading newsmagazine in Indonesia. Its past history with the New Order government-*Tempo* was banned twice-indicates how the news magazine would report the news considered important to public, regardless of the consequences. In relation to the representation of terrorism, *Tempo* principally adopted fair, check and balanced, cover both sides' principles. Actuality, in-depth and accuracy in reporting represent *Tempo*'s strong and independent editorial policy.

The representations of three bombing events in *Tempo*'s news magazine had been constructed through cultural and political perspectives. These can be analysed from the representation of the investigation process conducted by the police, and the disclosure of the terrorist network. Principally, the selection of issue of investigation process was to inform the public of the progress the police had done regarding the acts of terror. This was meant to create comfort and safe feelings within society. It was clear that uncertainty condition arouse following the bombings. Politically, it had to admit that the way Megawati's government handled the 2002 Bali bombing had contributed to the decrease of her reputation in the 2004 gen-

eral election. This was signified by the quarrel between vice president and minister of defence.

In the last representation, *Tempo* carefully reported the suspected terrorist network, *Jemaah Islamiyah*. Nonetheless, *Tempo* carefully used the term. It was meant to avoid a judgement as if Islam-as the dominant religion embraced by Indonesian society-identical with terrorism activities. *Tempo* attempted to inform as well as to educate public that there were groups within society that had misused Islamic values for their acts of terror.

In sum, *Tempo*'s representation of terrorism had been delivered through a professional practice of journalism. It played the role as the story teller and stayed neutral from the conflict. At the same time, it can be said that *Tempo* had played its role as the fourth estate with its critical reporting toward the way the government managed the issue. Thus, *Tempo*'s vision to be 'the guidance in the process of enhancing people's freedom of thought and expression and to build society that appreciates smartness and difference of opinion' was realised through the publication of reliable news media.

Bibliography

- Allan, S., 2000, *News Culture*, Buckingham: Open University Press.
- Chomsky, N., 2001, *September 11*, Unwin, Crows Net.
- Company profile of PT *Tempo* Inti Media tbk, 2006.
- Hoffman, B., 1995, "' Holy Terror' :The Implications of Terrorism Motivated by a Religious Imperative" , *Studies in Conflict & Terrorism* 18.4 (October/December).
- Itule, B. D. and D. A. Anderson, 2003, *News Writing and Reporting for Today's Media*, New York: McGraw-Hill.
- Laquer, W., 1987, *The Age of Terorism*, London: George Weidenfeld and Nicholson.
- Lewis, J., 2005, *Language Wars: the Role of the Media and Culture in Global Terror and Political Violence*, London, Pluto Press.
- Nacos, B. L., 2002, *Mass-mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism*, Maryland,

- Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Prayudi, 2003, *Press Coverage of Ethnic Violence*, Unpublished Thesis, RMIT University: Melbourne, Australia.
- Sen, K. & D. T. Hill, 2000, *Media, Culture, and Politics in Indonesia*, Oxford University Press: Melbourne.
- Tempo*, *Setelah nirwana terbakar* [After nirvana burnt], No. 34/XXXI/21-27 Oktober 2002.
- _____, *Amrozi Dicokok, Ba' asyir Tergeret?* [Amrozi arrested, Ba' asyir next?], (No. 37/XXXI/11 - 17 November 2002).
- _____, *Simpul 'syahid' sang imam* [Imam' s syahid knot] (No. 39/XXXI/25 November-1 December 2002).
- _____, *Mereka-reka otak pelumat Marriott* [Guessing the destroyer of Marriott], No. 24/XXXII/11-17 Agustus 2003.
- _____, *Akhir pelarian Hambali* [End run of Hambali] (No. 25/XXXII/18-24 August 2003).
- _____, *Mengendus bomber berlogat Melayu* [Discovering a Malay bomber] (No. 37/XXXII/10-16 November 2003).
- _____, *Doktor bom dari bilik-bilik gelap* [A bombing PhD from dark rooms] (No. 30/XXXIII/20-26 September 2004).
- _____, *Satu jejak bom Kuningan* [A clue of Kuningan bombing] (No. 31/XXXI/27 September-03 Oktober 2004).
- www.Tempointeraktif.com.

KONSTRUKSI SURAT KABAR KOMPAS TERHADAP KEBIJAKAN AFIRMATIF CALON LEGISLATIF PEREMPUAN

Fadjarini Sulistyowati
Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD”
Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55221
e-mail: dzarbela@yahoo.co.id

Abstract

News does not reside in value-freed space. Mass media are powerful to make reality construction to publish that is in line with their frame (point of view). Constitution Court has made a decision that cancels chapter 214 of the Constitution, Number 10/2008, by which candidates in the legislative general election of 2009 are elected by majority votes, and not by their numbers in rank, causing the affirmative policy for women candidates of legislative members fall invalid. As a result of the absence of affirmative policy, women candidates have to work harder to become members of the parliament. As public space, mass media are supposed to be strategic room to help women candidates campaign their struggle. Not all mass media, however, have gender sensitivity. One among few mass media that are concerned with women's struggle is Kompas, whose column, Swara, is gender sensitive. This research is intended to find out Kompas's construction of post Constitution Court's decision news concerning the affirmative policy for women candidates and women's struggle to become members of People's Representatives/District People's Representatives. The method of analysis used in this research is framing analysis of Zhondang Pan and Konsicki. The research result shows that Kompas is concerned with women candidates' struggle. In broad outline, the post Constitution Court's decision news is divided into two groups; they are the discourse about the affirmative policy for women candidates and the women candidates' struggle in the general election of 2009.

Key words: mass media, affirmative policy, women, construction

Pendahuluan

Upaya gigih gerakan perempuan untuk tetap bersikukuh merealisasikan bentuk konkret peran perempuan pada sektor publik laksana perjuangan yang tidak pernah kunjung usai. Pada sektor politik, isu penting yang terus mereka dorong adalah kebijakan afirmatif (*affirmative action*) berupa kuota 30% kursi di parlemen diisi oleh politisi perempuan. Isu kebijakan afirmatif mulai gencar diusulkan pada tahun 2002 yang kemudian berhasil diakomodasi dan menghasilkan kebijakan afirmatif dalam Pemilu 2004. Ternyata, pada Pemilu 2004, buah dari kebijakan afirmatif tersebut hanya mampu menyertakan 11% perempuan di DPR, 9% di DPRD provinsi, dan

6% di DPRD kabupaten/kota, (Kompas, 25 Agustus 2008).

Kebijakan afirmatif yang diformulasikan kuota 30% memang bukan perjuangan yang mudah dan sederhana. Kebijakan afirmatif memunculkan banyak perdebatan pro-kontra. Para pendukung kebijakan afirmatif memiliki rasionalisasi bahwa sudah seharusnya muncul kebijakan (baca: afirmatif) terhadap perempuan. Hal ini karena peran mereka yang sangat kecil dalam kehidupan politik sehingga bila direpresentasikan melalui parlemen masih merupakan ketidakberimbangan terlebih bila dikomparasikan dengan fakta rasio jumlah penduduk laki-laki-perempuan. Implikasinya, terutama, isu-isu yang dihadapi

perempuan tidak terartikulasikan secara memadai di parlemen.

Padahal kondisi sosial politik di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kuat bahwa sekadar menyerahkan keterwakilan perempuan semata-mata dengan cara melangsungkan pertarungan yang fair (melalui pemilu) terbukti tidak kontributif terhadap posisi perempuan di parlemen.

Pada sisi lain, tidak sedikit pula pandangan yang beranggapan bila perempuan menyatakan kesetaraan yang sama dengan laki-laki, maka konsekuensinya mereka sudah selayaknya tidak memerlukan kebijakan afirmatif yang berpihak. Keberpihakan itu justru diartikan pengaburan atas makna kesetaraan laki-laki-perempuan. Kebijakan afirmatif terhadap perempuan berupa kuota 30% ini akhirnya berhasil ditetapkan sekalipun diiringi perdebatan yang tidak sepenuhnya tuntas. Namun, kebijakan afirmatif yang semula melegakan aktivis gerakan perempuan tidak bertahan lama, Pada Pemilu 2009, keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 214 UU No. 10/2008 sehingga calon legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak bisa didasarkan atas nomor urut namun harus meraih suara terbanyak.

Bagi gerakan perempuan keputusan MK ini memberikan implikasi negatif yang cukup besar pada calon legislatif perempuan. Apabila dalam Pasal 554 UU No. 10/2008 dinyatakan, sedikitnya dari setiap tiga calon yang diajukan oleh partai politik, salah satu di antaranya adalah calon legislatif perempuan maka penerapan pasal ini menjadi batal karena penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan sistem nomor urut melainkan suara terbanyak.

Kebijakan afirmatif terhadap perempuan di parlemen menjadi tidak berlaku dalam pemilu 2009 ini. Bagi aktivis gerakan perempuan keputusan MK ini dinilai telah menghancurkan kebijakan afirmatif yang mereka perjuangkan sejak 2002. Menurut Ani Soetjipto, kebijakan afirmatif bagi perempuan di Indonesia masih diperlukan karena masih minimnya jumlah perempuan di parlemen yang tentunya akan berefek pada minimnya kebijakan yang hadir untuk perlindungan perempuan, (Kompas 10 februari 2009).

Keputusan MK ini menjadikan posisi calon legislatif laki-laki dan perempuan setara,

tanpa ada kuota yang dikuatkan ketentuan yuridis. Politisi atau caleg perempuan untuk mendapatkan raihan suara terbanyak maka terpaksa harus berjuang ekstra. Karena, bagaimana pun posisi mereka cenderung lebih lemah –untuk itulah isu kebijakan afirmatif memiliki relevansinya– baik dari segi kekuatan finansial maupun kemampuan mengorganisasikan massa (selama ini dikonsentrasikan pada wilayah privat). Ketika negara tidak memberikan kebijakan afirmatif terhadap caleg perempuan maka, korelasinya adalah semakin sempit pula ruang gerak perempuan untuk menunjukkan perannya di sektor publik.

Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini. Kebijakan media menyediakan ruang bagi perempuan yang merupakan ruang publik memiliki kontribusi mendorong mereka dalam menyampaikan informasi dan isu-isu perempuan. Kemampuan gerakan perempuan untuk mengakses dan menjaga relasi media tentu sesuatu yang positif bagi perjuangannya. Sesuai dengan pendapat George Gerbner (dalam Dewi Novianti, 2006) media massa itu mampu menciptakan khalayak-khalayaknya membuat definisi terhadap isu-isu, membuat istilah-istilah yang umum dari suatu pengetahuan sehingga dengan demikian media massa itu dapat menarik perhatian dan memiliki kekuatan.

Bila kebijakan negara tidak mereka dapatkan, maka media massa seharusnya menyediakan ruang bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi kepada publik. Apalagi, ternyata, dari keseluruhan jumlah pemilih yang terdata, 57% pemilih adalah perempuan (Kompas, 31 Januari 2009).

Selain itu kemampuan media menyihir pembacanya menurut Gamson dan Modigliani (dalam Sudibyo, 2001: 187) karena media dapat menerapkan standar kebenaran, matrik objektivitas serta batasan-batasan etika tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Untuk itu media memiliki kemampuan dalam menyajikan fakta dengan konstruksi mereka.

Melalui harian Kompas yang memuat berita-berita tentang calon legislatif perempuan, peneliti mencoba melihat bingkai yang digunakan media tersebut. Kompas sebagai media cetak, merupakan media yang sudah cukup memiliki

pengalaman dan dianggap media yang cukup independen. Dalam keberpihakannya terhadap perempuan, Kompas menyediakan ruang khusus yakni Swara untuk menyajikan informasi khusus tentang gerakan perempuan. Untuk itulah, Kompas dalam memberitakan kebijakan afirmatif calon legislatif perempuan seharusnya memiliki kebijakan yang berpihak agar suara mereka lebih bisa didengar masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah konstruksi harian Kompas terhadap berita-berita kebijakan afirmatif calon legislatif perempuan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2009?

Ada tiga argumen yang mendukung untuk keterwakilan perempuan dalam dunia politik (Joni Lovensduki, 2005:48-52): *pertama*, argumen keadilan, yang menyatakan bahwa sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan terutama di suatu negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokrasi; *kedua*, argumen pragmatis, yang memanfaatkan gagasan mengenai para politisi rasional yang memaksimalkan jumlah suara. Argumen ini mendorong isu bahwa dengan keterwakilan perempuan maka politik akan menjadi lebih konstruktif dan ramah; *ketiga*, argumen perdebatan, yang intinya memiliki pandangan bahwa perempuan akan membuat gaya dan pendekatan yang berbeda dalam politik sehingga akan mengubahnya menjadi lebih baik dan menguntungkan semua pihak.

Salah satu alasan logis yang senantiasa disampaikan para feminis, upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan adalah dengan menempatkan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan itu sendiri atau dalam keterwakilan politik. Seperti yang disampaikan oleh Barbara B. Watson (dalam Dzuhayatin, 1996: 88-89) kunci pemberdayaan perempuan adalah peran dan kedudukan. Sedangkan peran merupakan seperangkat tindakan dan tingkah laku yang ditentukan oleh norma, hukum dan kekuasaan. Kedudukan, adalah suatu posisi yang disediakan lingkungan dan memiliki pengaruh dan akibat terhadap individu atau kelompok.

Di Indonesia, perjuangan perempuan untuk

masuk ke wilayah publik mempunyai kendala cukup besar karena faktor budaya yang memosisikan perempuan di wilayah privat. Untuk itu, Fakih (2001: 180) menyatakan bahwa persoalan paling besar yang memberikan sumbangan pada kegagalan memperjuangkan hak asasi perempuan adalah faktor substansi kebijakan negara dan juga lemahnya kesadaran kritis kaum perempuan sendiri. Dan ini didukung pendapat Mernissi (1999: 14-16) yang mengatakan ia mendapati tidak terorganisirnya perempuan menjadi kendala utama. Oleh sebab itulah mengapa kelompok masyarakat perempuan tidak mempunyai kekuasaan sehingga amat mudah menjadi target strategis para birokrat dalam melumpuhkan kemerdekaan sipil perempuan untuk turut serta menentukan persoalan-persoalan publik.

Joni Lovensduki (2005: 88) menyampaikan hambatan perempuan untuk masuk politik sebagai rintangan sosial perempuan. Menurutnya, perempuan mengalami tiga rintangan sosial untuk menjadi pelaku politik: *pertama*, sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik yang mereka miliki lebih lemah; *kedua*, bermacam-macam kekangan gaya hidup menyebabkan perempuan memiliki waktu lebih sedikit daripada laki-laki dan *ketiga*, tugas dunia politik diasumsikan sebagai dunia laki-laki sehingga merintangangi rekrutmen mereka untuk masuk.

Seperti yang disampaikan Mernissi dalam Dody Riyadi (2005: 13) ada dua hal yang bisa dilakukan perempuan untuk melakukan perjuangan di ruang publik (politik): *pertama*, dibutuhkan keberadaan organisasi yang kuat, mandiri, rasional, partisipatif, dan bebas dari bias cara pandang laki-laki; *kedua*, kecerdasan melakukan wacana atau pendominasian ide-ide transformatif dalam berbagai bentuknya.

Untuk memunculkan organisasi perempuan yang kuat yang bisa mendukung gerakan perempuan bukanlah sesuatu yang mudah. Organisasi perempuan kebanyakan memiliki problem yang hampir seragam yakni kualitas SDM dan ketergantungan terhadap lembaga donor. Sehingga organisasi perempuan yang cukup efektif memperjuangkan hak-hak perempuan tidaklah banyak. Selain itu, upaya yang lain dengan selalu mengkampanyekan gerakan perempuan melalui

media massa.

Peran media massa adalah menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan peristiwa dan pendapat yang terjadi dalam masyarakat. Media massa menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki makna. Media massa merupakan institusi yang memiliki kekuatan untuk mengkampanyekan apa saja, termasuk gerakan perempuan. Namun media bukanlah ruang hampa sehingga untuk mengharapkan kerja jurnalisme dalam praktiknya sesuai dengan elemen-elemen jurnalisme pada kenyataannya menghadapi kompleksitas tertentu. Pada satu sisi media membentuk realitas politik, tetapi bersamaan dengan itu pada di sisi lain, realitas politiklah yang memengaruhi media. Hal yang sama juga terjadi pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Proses itu disebut Grossberg (1998: 7), merupakan *mediamaking*. Terminologi *mediamaking* menyiratkan bahwa ketika media dibentuk pada saat yang bersamaan media membentuk sesuatu yang lain.

Demikian pula dalam pembuatan berita, sesuai dengan pendapat Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese (dalam Sudiby, 2003: 13), proses pembikinan berita (*newsroom*) bukanlah ruang hampa dan netral namun ada beberapa hal yang mempengaruhi: Pertama, faktor individual, yakni faktor yang berhubungan dengan latar belakang profesional. Level individual akan berpengaruh pada aspek-aspek personal dari pengelola media misalnya: agama, umur, dan jenis kelamin. Kedua, faktor level rutinitas media yakni berhubungan dengan mekanisme dan rutinitas penentuan berita. Setiap media memiliki ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, ciri-ciri berita, ukuran kelayakan berita dan kesemuanya ini sudah menjadi rutinitas media. Ketiga, faktor level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita sebaliknya, ia hanyalah bagian kecil dari organisasi media. Keempat, level ekstra media yang meliputi: sumber berita, sumber penghasilan, pihak eksternal dan faktor ideologi.

Media bukan sebagai saluran yang bebas dan netral karena media bisa menjadi alat dari

kelompok dominan tetapi media juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarluaskan gagasannya, mengontrol kelompok lain dan membentuk consensus (Eriyanto, 2006: 36). Sehingga, media juga memiliki kekuatan untuk mengkonstruksikan realitas sesuai dengan keinginan mereka. Menurut Tony Bennet (dalam Eriyanto, 2006: 36), media adalah agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya.

Konstruksi media sangat dipengaruhi bahasa. Bahasa adalah unsur utama dalam penyajian pesan lewat media massa. Bahasa adalah instrument utama untuk menceritakan realitas, bahasa ini meliputi bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa nonverbal (gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka dan tabel), Ibnu Hamad (2004: 11-12)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan metode analisis isi dengan konteks *framing*. Berbeda dengan analisis isi konvensional maka analisis *framing* lebih melihat pesan sebagai hasil konstruksi.

Objek analisis dalam penelitian ini adalah teks berita calon legislatif perempuan pada masa kampanye Pemilu 2009 di Harian Kompas. Digunakannya analisis teks berita karena data teks bisa merupakan cerminan situasi dan kondisi yang dikonstruksi media. Harian Kompas dipilih karena dianggap sebagai koran independen dan merupakan salah satu media yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Periode waktu yang dipilih antara bulan Desember 2008 (saat keputusan MK keluar) hingga tanggal 5 April 2009 (masa kampanye selesai). Data yang dikumpulkan sejak bulan Desember hingga Maret 2009. Berita yang dipilih adalah berita langsung (*straight news*). Berdasarkan data berita tentang calon legislatif perempuan dengan mengangkat dua tema utama yakni: kebijakan afirmatif pasca putusan MK dan perjuangan calon legislatif perempuan dalam masa pemilu 2009.

Teknik analisis data menggunakan analisis *framing* yang disampaikan oleh Zhongdang Pan dan Kosicki. Pan dan Kosicki membuat suatu model dengan mengintegrasikan secara bersama-

sama konsep psikologis dengan konsepsi sosiologis. Dalam pendekatan ini perangkat *framing* dapat dibagi ke dalam empat struktur besar: *pertama*, struktur sintaksis, struktur ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa. Struktur semantik, dapat diamati dari lead, latar lead dan sebagainya. *kedua*, struktur skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan peristiwa ke dalam bentuk berita. *ketiga*, struktur tematik, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pendangannya atas peristiwa dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat. *keempat*, struktur retorik, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Keberpihakan Kompas terhadap Kebijakan Afirmatif Perempuan

Berdasarkan analisa berita, tampak keberpihakan Kompas untuk mendukung perjuangan caleg perempuan. Keberpihakan Kompas bukan hanya muncul pada berita-berita *straight news* tetapi pada analisis Politik, yang disampaikan oleh J. Kristiadi dan juga pada forum spanduk caleg. Analisis politik J. Kristiadi dengan judul *Suara Terbanyak dan Nasib Perempuan* pada tanggal 27 Januari 2009, yang secara eksplisit mendukung kebijakan afirmatif pada caleg perempuan.

Pada tema-tema berita yang berkaitan dengan kebijakan afirmatif caleg perempuan, tampak kebimbangan Kompas. Secara garis besar Kompas pada prinsipnya mendukung Keputusan MK karena keputusan suara terbanyak sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu contoh kebimbangan Kompas bisa dilihat pada analisis berita dengan judul: "Putusan MK merugikan caleg perempuan" .

Dalam berita ini, Kompas menganggap kebijakan MK memiliki implikasi terhadap caleg perempuan namun, suara pemilih merupakan hal yang penting sehingga keputusan MK yang mengakomodasi suara terbanyak sangat sesuai dengan prinsip demokrasi. Ada dua hal yang disampaikan Kompas, yakni keberpihakan pada suara perempuan dengan menyebutkan adanya

implikasi terhadap caleg perempuan namun suara mayoritas –kebanyakan laki-laki—perlu diapresiasi karena begitulah konsep negara demokrasi, suara rakyat suara Tuhan.

Dari hal ini tampak Kompas sebagai media massa mencoba melakukan frame namun secara samar. Sebagai media yang memang memiliki kepedulian terhadap perempuan Kompas masih menyuarakan suara gerakan perempuan, hal ini tergambar jelas dari judul:.. *merugikan caleg perempuan*. Keberpihakan Kompas terhadap caleg perempuan secara skematik tampak dalam pemilihan narasumber dan panjangnya kutipan masing-masing narasumber. Penempatan pernyataan Eva Kusuma sebagai judul merupakan skematik yang diarahkan Kompas terhadap teks berita ini. Demikian juga dalam *leadnya*, kutipan dari Eva Sundari disampaikan secara lengkap, berikut lead berita tersebut:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemakaian sistem nomor urut dalam penetapan calon anggota legislatif dinilai merugikan caleg perempuan. Pasalnya penghapusan sistem nomor urut membuat perlakuan khusus terhadap perempuan melalui kuota 30 persen tidak efektif. Putusan ini dinilai melanggar nilai patriarkhis.

Kompas yang memiliki sikap pro demokrasi, mengkonstruksikan bahwa keputusan MK sebagai bukan sebagai keputusan keliru karena, keputusan ini mengembalikan kedaulatan pemilih sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sehingga, Kompas dalam teks berita ini tidak menempatkan MK sebagai pihak yang turut memberikan andil dalam mengeluarkan putusan yang merugikan perempuan. Walaupun dalam judul berita dicantumkan *Putusan MK merugikan caleg perempuan* namun ditepis pada alenia kelima, yakni adanya pernyataan dari MK yang mengatakan mereka tidak membatalkan ketentuan tentang kuota 30 persen.

Dari hal tersebut sebetulnya Kompas mendukung kebijakan afirmatif karena kebijakan ini memang seharusnya tidak dihilangkan sesuai dengan pernyataan MK. Dengan demikian MK dikonstruksikan Kompas sebagai pihak yang tidak bersalah namun dalam teks ini KPU lah yang

dibingkai Kompas sebagai lembaga yang tidak siap mengantisipasi kasus-kasus Pemilu. Kutipan KPU yang ditempatkan di akhir teks, semakin menguatkan asumsi bahwa bagi Kompas pernyataan dari KPU tidaklah terlalu penting. KPU dianggap tidak bisa memberikan penjelasan yang bisa menjawab keresahan caleg perempuan.

Dilihat dari skrip, teks ini disusun bukan didasarkan atas peristiwa tetapi teks berita ini merupakan pendapat-pendapat yang dikumpulkan dari beberapa narasumber yang dipilih Kompas. Pemicu utama kemunculan teks ini adanya gerakan dari para aktivis pergerakan perempuan untuk menolak putusan MK dua hari sebelumnya. Kompas sengaja memilih isu penolakan dari aktivis perempuan terhadap putusan MK sebagai ujud keberpihakan Kompas terhadap pemberdayaan perempuan.

Kompas sebagai media bukanlah bebas nilai namun sesuai Shoemaker dan Stephen D Reese (dalam Sudibyo, 2003: 13), proses pembikinan berita (*newsroom*) bukanlah ruang hampa dan netral, Kompas membingkai berita dengan tujuan ikut memberikan dukungan untuk memperjuangkan kebijakan afirmatif apalagi didukung dengan alasan yang ada pada pernyataan Eva Sundari Secara tematik, keputusan MK dapat muncul tanpa adanya kebijakan afirmatif terhadap perempuan karena dunia politik dianggap sebagai dunia laki-laki yang tidak berfikir untuk mengakomodasi keberpihakan, demikian makna yang muncul ketika Kompas mengambil pernyataan Eva Sundari "Putusan itu dinilai melanggengkan nilai patriarkhis". Kata *Patriarkhis*, bermakna bagaimana dunia ini dibentuk sesuai budaya yang berpihak laki-laki. Pandangan ini muncul dari gerakan feminisme, Kompas mengarahkan *angle* berita pada pandangan ini. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan aktivis perempuan, "Perempuan butuh upaya afirmatif di lembaga legislatif karena kondisinya saat ini tidak berimbang". Kata *tidak berimbang* memiliki makna adanya ketimpangan antara dunia laki-laki dan perempuan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Joni Lovendsuki yang menyampaikan hambatan perempuan untuk masuk politik sebagai rintangan sosial perempuan. Salah satunya adalah persepsi

bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Untuk itu, perjuangan perempuan memang menjadi berat sehingga kebijakan afirmatif menjadi penting untuk dikeluarkan.

Bingkai Kompas untuk pro kebijakan afirmatif semakin jelas bila dilihat dari retorik teks berita yang muncul di penggunaan kata-kata tertentu, misalnya kata yang mengesankan hiperbola: *runtuh, digembosi, putus tengah jalan*. Keputusan MK menjadi penghalang karena dianggap telah melemahkan upaya-upaya perjuangan untuk menempatkan posisi perempuan di level kebijakan. Dengan penggunaan kata-kata ini memperkuat asumsi perjuangan perempuan telah menemui jalan buntu tanpa adanya kebijakan afirmatif.

Kompas Mendukung Usaha-Usaha Caleg Perempuan

Kompas dalam pemberitaan kampanye para caleg perempuan memiliki keberpihakan yang tinggi. Hal ini tampak dari perhatian Kompas terhadap usaha-usaha calon legislatif perempuan, salah satunya dapat dilihat pada berita dengan judul: "Perempuan harus turun ke lapangan" yang dimuat harian Kompas pada tanggal 22 Januari 2009.

Kompas menekankan pentingnya keberadaan perwakilan perempuan di dalam DPR/ DPRD karena perempuan memiliki kompetensi seperti halnya laki-laki. Kompetensi perempuan seringkali tidak muncul terutama bila mereka hanya berdiam diri. Untuk itu melalui kalimat "Perempuan harus turun ke lapangan", Kompas mendorong mereka untuk turun menyapa massa mereka. Dukungan Kompas dilanjutkan dalam *lead* berita:

Sistem pemilu yang menerapkan suara terbanyak saat ini harus dihadapi dengan kerja keras keberanian untuk terjun ke lapangan di setiap daerah pemilihan.

Pada teks ini Kompas tampaknya sengaja tidak menggunakan kata caleg perempuan namun digantikan kata perempuan. Kata ini dipakai sebagai upaya mendukung bahwa perjuangan caleg perempuan ini sama halnya dengan perjuangan kaum perempuan secara keseluruhan. Pada *lead*, Kompas memberi penekanan posisi semua caleg

dengan sistem suara terbanyak adalah sama, sehingga perempuan bila ingin berhasil juga harus melakukan kerja keras. Dorongan Kompas terhadap pemberdayaan masih muncul pada alenia ketiga:

Selain itu, kalangan perempuan yang didukung para aktivis perempuan bisa mengajukan berbagai upaya hukum untuk langkah lain agar keterwakilan perempuan di parlemen dapat meningkat.

Melalui berita ini Kompas sengaja membingkai bahwa kebijakan hukum untuk perlindungan caleg perempuan tetap harus dilakukan dan perjuangan itu menjadi tugas utama perempuan. Tujuan utama dari semua upaya ini agar ada peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan dalam parlemen memiliki peran strategis untuk penentuan kebijakan.

Keterwakilan perempuan menempatkan peran dan status perempuan menjadi lebih dihargai sesuai dengan pendapat para feminis, upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan adalah dengan menempatkan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan itu sendiri atau dalam keterwakilan politik. Seperti yang disampaikan oleh Barbara B. Watson, kunci pemberdayaan perempuan adalah peran dan kedudukan. Peran merupakan seperangkat tindakan dan tingkah laku yang ditentukan oleh norma, hukum dan kekuasaan. Sedangkan kedudukan, adalah suatu posisi yang disediakan lingkungan dan memiliki pengaruh dan akibat terhadap individu atau kelompok. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan inilah Kompas mendorong usaha-usaha caleg perempuan.

Secara keseluruhan teks berita ini, menempatkan keberpihakan Kompas pada perjuangan perempuan. Narasumber berita ada empat orang yang semuanya perempuan baik dari aktivis, akademisi maupun caleg perempuan sendiri. Pernyataan Lena Maryana diletakkan sebagai judul dan *lead*. Penempatan ini dimungkinkan karena Kompas menilai pernyataan Lena bisa mendorong caleg perempuan untuk tetap optimis dan pernyataan ini sesuai dengan bingkai Kompas

terhadap pemberdayaan perempuan. Lena Maryana cukup kritis memberikan pendapat dan meminta KPU untuk turut memperjuangkan keterwakilan perempuan. Pernyataan Lena Maryana ini diperkuat dari kalangan akademisi perempuan yang berpihak pada perjuangan perempuan, Ani Sutjipto dan anggota LSM perempuan, Aisah Putri.

Dilihat dari skrip, teks berita ini merupakan pengembangan dari acara dialog publik "Representasi perempuan pasca uji materi" yang salah satu narasumbernya Lena Maryana, sehingga berita ini juga memfokuskan pada pernyataan Lena yang kemudian diperdalam dengan menambahkan wawancara kepada narasumber lain. Dari hal ini, berarti Kompas sengaja untuk memfokuskan pada sudut pandang yang berpihak pada pemberdayaan caleg perempuan.

Strategi penulisan teks ini memfokuskan pada usaha-usaha yang perlu dilakukan caleg perempuan. Upaya caleg perempuan terjun ke daerah pemilihan merupakan salah satu cara untuk, membuktikan kompetensinya pada pemilih mereka. Selain itu, perjuangan juga tetap dilakukan melalui tuntutan kebijakan hukum. Dengan menempatkan pada *apa (what)* sebagai *angle* (sudut pandang berita) Kompas mengkonstruksikan bahwa caleg perempuan memiliki kompetensi yang mampu bersaing untuk masuk ke parlemen.

Tematik, teks berita ini menempatkan sistem pemilu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Penggunaan frase "sistem pemilu yang menerapkan suara terbanyak" pada alenia pertama berita menjelaskan bahwa sistemlah yang mengharuskan setiap caleg harus turun ke bawah. Demikian pula dengan caleg perempuan juga harus turun ke daerah pemilihannya. Sistem ini berat bagi semua caleg terlebih lagi caleg perempuan karena setiap calon wakil rakyat ternyata bukan orang yang telah dikenal pemilihnya sehingga mereka harus turun ke bawah untuk mendekati massa. Hal ini tentunya membutuhkan kemampuan modal dan tenaga yang besar. Akibatnya, penerapan suara terbanyak yang munculnya mendekati masa pilihan membuat banyak pihak tidak siap karena sistem itu mengharuskan mereka dikenal oleh pemilihnya.

Secara retorik, beberapa kata yang dipakai merupakan kata yang memberikan pemihakan pada perempuan. Penggunaan kata perempuan dianggap sebagai pernyataan bahwa hal ini tidak hanya menyangkut caleg perempuan namun juga perempuan secara keseluruhan. Kata-kata: “peluang perempuan semakin kecil” menyiratkan perempuan dengan sistem suara terbanyak inilah yang memiliki peluang semakin berat. Kata yang lain: “proses pemilu yang tidak ramah pada perempuan”, menyiratkan hal yang sama. Dari kata-kata ini menyiratkan adanya perbedaan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kedudukan sama, karena berbeda maka Kompas sangat mendukung kelompok yang lemah. Media dalam hal ini Kompas memiliki peran untuk mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender.

Sesuai dengan peran tersebut, Kompas mencoba melawan arus dari teori bahwa media menjadi alat dari kelompok dominan tetapi media juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarluaskan gagasannya, mengontrol kelompok lain dan membentuk konsensus (Eriyanto, 2006: 36). Dalam hal ini, Kompas bahkan mencoba memberikan gagasan untuk mendukung kelompok yang senantiasa terpinggirkan dalam dunia politik untuk berani bersaing. Kompas mencoba mengkonstruksikan realitas sesuai dengan keinginan mereka, menjalankan peran menjadi agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya seperti yang diungkapkan oleh Tony Bennet. Dukungan Kompas terhadap perjuangan caleg perempuan secara jelas tampak dalam berita dengan judul: “Caleg perempuan jangan saling sikut”, dimuat pada harian Kompas tanggal 4 Maret 2009. Kompas secara eksplisit mendukung usaha-usaha caleg perempuan.

Kompas tampak konsisten mendukung pemberdayaan perempuan, dilihat dari judul, teks berita ini lebih memfokuskan untuk memberikan dorongan kepada caleg perempuan. Kompas menekankan kepada caleg perempuan untuk menyatukan diri dan tidak saling menjatuhkan. Penekanan Kompas ini diteruskan pada *lead* dari teks ini:

“Sesama calon anggota legislatif perempuan semestinya tidak saling sikut melainkan bersinergi. Dengan demikian, cita-cita meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen bisa terwujud.”

Narasumber dalam teks berita ini ada tiga orang yang semuanya perempuan dengan latar belakang yang berbeda; Sri Nuryanti sebagai anggota KPU, Erna Witoelar aktivis perempuan dan Irman Lanti, *programme manager* UNDP. Dilihat dari narasumbernya, tampak jelas teks berita ini memang merupakan upaya mendukung perjuangan caleg perempuan dalam pemilu. Teks berita diambil dari *angle* kegiatan Rembug Nasional Perempuan Indonesia. Kegiatan yang menurut Kompas dapat menjadi ruang konsolidasi antar caleg perempuan, sehingga ada sinergi di antara mereka. Upaya mengangkat acara tersebut merupakan salah satu pemihakan Kompas terhadap perjuangan caleg perempuan.

Dari analisis skrip, alasan (*why*) perempuan harus saling bersinergi dan tidak saling sikut disampaikan dalam alenia tiga dan empat. Seperti yang disampaikan oleh Erna Witoelar, pada alenia ketiga ...*keberadaan perempuan dalam jumlah yang lebih signifikan di parlemen memudahkan untuk melakukan perubahan. Para caleg perempuan didorong untuk bekerjasama.* Atau kutipan dari pernyataan Erna Witoelar, *kenyataannya, perempuan lebih mudah keluar dari kotak-kotak (partai politik) dan berjejaring dengan pelaku lain atau sesama perempuan.* Kutipan pendapat ini menguatkan peran perempuan dalam legislatif.

Sesuai dengan pendapat Mernissi ada dua hal yang bisa dilakukan perempuan untuk melakukan perjuangan di ruang publik (politik): pertama, dibutuhkan keberadaan organisasi yang kuat, mandiri, rasional, partisipatif, dan bebas dari bias dan cara pandang laki-laki; kedua, kecerdasan melakukan wacana atau pendominasian ide-ide transformatif dalam berbagai bentuknya. Upaya memunculkan organisasi yang kuat bukan perkara mudah namun untuk memunculkan wacana bisa dilakukan perempuan melalui media massa. Kompas dalam hal ini memberikan ruang untuk mendukung caleg perempuan.

Caleg perempuan mendapat perhatian dari lembaga donor (UNDP), dukungan lembaga ini diberikan dalam menggugah kesadaran masyarakat bahwa memiliki keterwakilan perempuan dalam parlemen itu penting. Dari alenia ini, maka Kompas memberikan bingkai bahwa dukungan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen juga dilakukan oleh negara-negara lain bahkan lembaga internasional semacam UNDP. Dari narasumber UNDP tersirat acara rembug nasional ini sendiri sebetulnya mendapatkan dana dari UNDP, namun Kompas tidak menyampaikan secara eksplisit. Dengan menyamakan adanya donor, Kompas ingin mengesankan bahwa acara ini merupakan inisiatif para caleg perempuan sendiri untuk menyatukan pendapat.

Secara tematik, Kompas menyusun teks berita ini sebagai upaya mendukung usaha-usaha caleg perempuan untuk masuk dalam parlemen. Beberapa upaya yang harus dilakukan perempuan diuraikan di awal berita: *jangan saling sikut, saling bersinergi, didorong untuk bekerjasama*. Dalam alenia kelima, Kompas menyampaikan data kenaikan tentang jumlah anggota parlemen perempuan dari tahun 2004 sampai 2009. Latar ini mengisyaratkan bila perempuan melakukan usaha-usaha yang disampaikan maka terjadi peningkatan jumlah perwakilan perempuan di parlemen.

Alenia berikutnya, Kompas menekankan tentang dukungan lima negara donor terhadap perjuangan caleg perempuan. Ada koherensi antara perjuangan para aktivis dengan UNDP, yakni karena alasan perempuan lebih bisa memperjuangkan anak dan rakyat kecil. Dalam teks ini Kompas juga menekankan tentang ikrar bersama untuk para caleg perempuan untuk memperjuangkan anak-anak, keluarga miskin dan mendirikan pusat krisis korban kekerasan. Bagi Kompas, kaum perempuanlah yang memiliki peran signifikan untuk memperjuangkan kemiskinan dan anti kekerasan.

Secara retorik, penggunaan beberapa kata merupakan pemihakan terhadap caleg perempuan, contohnya: *.cita-cita meningkatkan keterwakilan perempuan*. Kata cita-cita dipakai atas nama semua perempuan, atau kalimat: *keberadaan perempuan akan memudahkan*

untuk perubahan, klaim adanya perempuan bisa memunculkan perubahan. Kata-kata ini dipakai sebagai upaya untuk mengesankan keterwakilan perempuan itu penting.

Keberadaan foto dalam teks berita untuk mendukung teks itu sendiri. *Angle* foto tentunya memiliki maksud tertentu demikian pula dengan teks ini. Penggunaan foto dalam teks berita ini lebih memfokuskan pada gambar latar (*background*) dari rembug nasional. Gambar-gambar yang berupa poster kegiatan perempuan ini memperlihatkan aktivitas perempuan, sehingga tujuan menampilkan foto ini untuk memperlihatkan berbagai aktivitas perempuan yang dapat dilakukan bila mereka menjadi wakil rakyat dan duduk di parlemen.

Simpulan

Kompas telah menjalankan beberapa peran media massa. Kompas menampilkan peristiwa yang terjadi sebagai cermin masyarakat. Kompas memiliki filter atas terjadinya peristiwa sehingga apa yang ditampilkan dalam berita bukanlah realitas sesungguhnya namun dalam bingkai Kompas.

Kompas mendukung kebijakan afirmatif caleg perempuan tetapi tidak mengganggu keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan suara terbanyak sebagai keputusan yang salah. Bagi Kompas, keputusan MK dianggap pilihan tepat untuk mengakomodasi suara rakyat. Selain itu, secara eksplisit Kompas memberikan dukungan para caleg perempuan agar terus berusaha agar bisa menduduki kursi di parlemen. Bingkai yang dilakukan Kompas ini sesuai dengan misinya untuk menjadi agen perubahan. Dengan demikian Kompas cukup konsisten dalam melakukan keberpihakan terhadap perempuan sesuai dengan misi disediakannya suplemen rubrik Swara.

Daftar Pustaka

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 2000, *Kajian Gender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia: Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Departemen Agama RI, Ja-

- karta.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, 2001, Hak Asasi Perempuan, Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transforma Matif Wacana, Edisi hak Asasi Manusia: Antara Skenario Kemanusiaan dan Proyek Global*, Nomor 8 Tahun II.
- Grossber, Lawrence, Ellen Wartella dan D. Charles Whitney, 1998, *Mediamaking: Mass Media a Popular Culture*, California, Sage Publications Ins.
- Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta.
- Lovenduski, Joni, 2008, *Politik Berparas Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Novianti, Dewi, 2006, "Wacana Media dalam Kasus Bom Bali Pertarungan Wacana Harian Republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1, UPN, Yogyakarta.
- Riyadi, Dody, 2005, *Respons Organisasi Perempuan terhadap Perubahan Politik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi*, Tesis, UGM, Yogyakarta.
- Sudiby, Agus, 2004, *Kepentingan Ekonomi-Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Sujipto, Ani, Kebijakan Afirmatif, Kompas 10 Februari 2009, Hal. 6
- Supriyanto, Didik, Calon Perempuan, Wassalam, Kompas 25 Agustus 2008. Hal. 12

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 (STUDI KASUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YOGYAKARTA)

Akhirul Aminulloh
Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang
Telp. 085233467750 / e-mail: ieroels@yahoo.com

Abstract

Legislative elections 2009 followed by many political parties which purported to intense competition among political parties in the struggle for the vote. All the strategies, tactics, and methods are used by all political parties to win the election. Therefore, the role of communication and media are very important. This study aims to identify strategies of political communication Prosperous Justice Party (PKS) in legislative elections in 2009. This research was conducted at the PKS Board s Region of Yogyakarta with qualitative descriptive method and interactive analysis. The results of this study show that PKS election winning strategy formulated in the four stages of action: first, PKS heard; second, PKS invites; third, PKS talk; and fourth, PKS win. In carrying out the fourth stage of the action, the PKS using a strategy of political communication with the approach of interpersonal communication, public communication, and mass communication. The role of political communication strategies applied by the PKS in 2009 impressed the legislative elections less significant impact on the party vote. This is, heavily influenced by various factors, such as the number of money politics were done by other parties and populist government policies such as reduction of fuel oil and direct cash assistance, which was more profitable democrat party. So the Democratic votes rose 300% in the general election in 2009 than in 2004 elections, otherwise the other major political parties tend to decrease the acquisition of voice and only a relatively slight increase PKS.

Key words: *political communication, political parties, media, society*

Pendahuluan

Pada tahun 2009 bangsa Indonesia telah mengadakan pemilihan umum untuk kesepuluh kalinya. Pelaksanaan pemilu secara periodik ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem negara demokrasi. Sejak Pemilihan Umum tahun 1999, Indonesia telah dianggap sebagai negara terbesar ketiga yang menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis. Pemilihan umum ini menjadi wahana aspirasi politik rakyat Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu juga menjadi ajang paling massif, bebas, dan adil untuk menentukan partai dan tokoh yang berhak mewakili rakyat. Dalam sistem perwakilan, tak ada

cara lain yang paling absah untuk memilih para wakil rakyat kecuali melalui pemilu.

Pemilihan umum legislatif tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik yang lolos seleksi verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), ditambah enam partai politik lokal di Aceh. Adanya banyak partai politik yang mengikuti pemilu 2009 menjadi konsekuensi logis dari sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Terdapatnya banyak partai politik berkonsekuensi pada ketatnya kompetisi antar partai politik dalam menggaet suara pemilih untuk memperebutkan kursi di parlemen.

Guna memenangkan kompetisi di ajang pemilu, para kontestan partai politik saling

bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi komunikasi politik yang jitu. Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi komunikasi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. Menurut Firmanzah (2008: 244) strategi komunikasi politik sangat penting untuk dianalisis. Soalnya, strategi tersebut tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Strategi memberikan beberapa manfaat melalui kegiatan taktiknya yang mampu membangun dan menciptakan kekuatan melalui kontinuitas serta konsistensi. Selain itu, arah strategi yang jelas dan disepakati bersama akan menyebabkan perencanaan taktis yang lebih mudah dan cepat. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah usaha, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendi, 1993: 300).

Strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik harus menyesuaikan dengan sistem politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik mau tidak mau turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh partai politik. Almond (1990: 34) melihat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu masukan yang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Komunikasi politik sebagai bagian dari sistem politik merupakan satu konsepsi yang menyatakan bahwa semua gejala sosial, termasuk gejala komunikasi dan politik, adalah saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Penggunaan media sangatlah penting dalam proses kampanye dan sosialisasi politik pada pemilu. Dalam konteks politik modern, media massa bukan hanya menjadi bagian yang integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Media massa merupakan saluran

komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan menyebarluaskan informasi, menjadi forum diskusi publik dan mengartikulasikan tuntutan masyarakat yang beragam. Semua itu dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkut informasi dan citra secara massif dan menjangkau khalayak yang begitu jauh, beragam, dan luas terpencar (Pawito, 2009: 91). Sebagaimana diketahui bahwa belanja iklan politik yang dilakukan oleh partai politik dan pemerintah tahun 2009 naik 100 persen, yaitu sebesar Rp. 800 milyar dibanding pada pemilu 2004 sebanyak Rp. 400 milyar (www.okezone.com). Data di atas tersebut menunjukkan bagaimana media menjadi sarana yang sangat penting bagi sebuah partai politik dalam memenangkan pemilu.

Dengan karakter yang dimilikinya, media menjadi kekuatan yang bisa menyatukan dan menggiring opini masyarakat kepada salah satu partai politik peserta pemilu dengan memberikan arah ke mana mereka harus berpihak dan prioritas-prioritas apa yang harus dilakukan. Dengan kemampuannya, media dapat memberi semangat, menggerakkan perubahan, dan memobilisasi masyarakat untuk memilih pada pemilihan umum.

Salah satu kontestan pada pemilu legislatif 2009 adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS merupakan partai dakwah yang berazaskan islam. Pada pemilu 1999 nama PKS adalah partai keadilan (PK) tetapi karena tidak memenuhi ambang batas 2% sebagai syarat mengikuti pemilu tahun 2004, maka partai Keadilan berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Hasil pemilu 2009 menunjukkan perolehan suara PKS 7.88% atau 8.206.955 suara. Perolehan suara pemilu 2009 ini bagi PKS relatif stabil atau ada kenaikan sedikit dibanding pada pemilu sebelumnya yaitu 7.34% secara Nasional (www.calegindonesia.com). Dan untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PKS memperoleh 176,645 suara atau tujuh kursi di DPRD Propinsi, dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 72,95% dalam pemilu 2009 (www.kpud-diyprov.go.id).

Perolehan suara partai secara Nasional ini menjadi alasan mengapa penelitian ini memilih PKS sebagai studi kasus penelitian tentang strategi komunikasi politik partai politik dalam pemilu legislatif 2009. Hal ini didasari oleh kenyataan

bahwa, disaat suara Partai Demokrat naik secara tajam sedang partai-partai besar lainnya cenderung mengalami penurunan seperti Partai Golkar, PDIP, PKB, dan PPP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa stabil dengan mempertahankan perolehan suaranya seperti pada pemilu 2004. Kenyataan ini telah menimbulkan pertanyaan yang memerlukan jawaban, kiranya strategi apa yang di pakai oleh PKS dalam pemilu legislatif 2009.

Dinamika komunikasi politik yang menjadi tema pokok penelitian ini selanjutnya dipetakan dalam Model Transaksi Simultan (*Simultaneous transactions Model*) dari Melvin L. DeFleur (1993: 21-25). Dengan karakteristiknya yang nonlinear, model ini menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi. *Pertama*, faktor lingkungan fisik (*physical surroundings*), yakni lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek *what* dan *how* pesan-pesan komunikasi dipertukarkan. *Kedua*, faktor situasi sosio-kultural (*sociocultural situations*), yakni bahwa komunikasi merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya. *Ketiga*, faktor hubungan sosial (*social relationships*), yakni bahwa status hubungan antar pelaku komunikasi sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.

Selanjutnya, untuk keperluan telaah dalam kajian ini, digunakan teori birokrasi dari Max Weber. Asumsi-asumsi dalam teori birokrasi ini mempengaruhi gambaran komunikasi dalam organisasi organisasi. Weber (Littlejohn, 2009: 362), mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara terbaik bagi organisasi dalam mengatur kerumitan kerja individu dengan tujuan yang umum, dan prinsip-prinsipnya memiliki kekuatan yang tetap.

Menurut Max Weber (Littlejohn, 2009: 362), bahwa "Organisasi merupakan sebuah sistem kegiatan interpersonal yang memiliki maksud tertentu yang dirancang untuk menyelaraskan tugas-tugas individu." Hal ini dapat dilaksanakan dengan tiga aspek dalam birokrasi yaitu, otoritas, spesialisasi, dan regulasi. Bagi Weber (Littlejohn, 2009: 363-364), Otoritas hadir bersamaan dengan

kekuasaan. Keefektifan organisasi bergantung pada tingkatan yang memberikan manajemen kekuasaan resmi. Pengembangan gelar dan deskripsi yang tugas merupakan sebuah contoh yang tepat untuk spesialisasi. Terakhir aspek birokrasi adalah aturan. Implementasi regulasi yang mengatur perilaku setiap orang memungkinkan dilakukannya koordinasi organisasi. Aturan-aturan ini harus rasional dan dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasar uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera, peran media pada pemilu, dan bagaimana dampak dari penerapan strategi komunikasi politik PKS terhadap perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2009.

Metode Penelitian

Bentuk dan Strategi Penelitian

Bentuk dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dasar, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap, menggambarkan dan menjelaskan sebuah fenomena tanpa berusaha memberikan evaluasi terhadap fenomena tersebut (Sutopo, 2006: 135). Studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pada DPW PKS Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan mencatat dokumen/ penelaahan terhadap dokumen-dokumen.

(1). Wawancara mendalam, Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara berdialog secara langsung dengan berfokus pada hal tertentu. Teknik wawancara ini dilakukan pada semua informan yang meliputi: (a). Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS, (b). Ketua tim pemenangan pemilu PKS, (c). Ketua Badan Humas DPW PKS, (d). Wakil Sekretaris III/Pusat Informasi DPW PKS; (2). Mencatat dokumen, Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung yang dapat memperjelas

data utama yang bersumber dari dokumen resmi dan arsip yang terdapat pada pengurus Partai Keadilan sejahtera. Data tersebut antara lain adalah manual perencanaan kampanye politik pemilu 2009, hasil penilaian terhadap peta politik, skema sasaran pemilih berdasarkan geografis dan demografis, perencanaan penggunaan media massa, dan lain sebagainya.

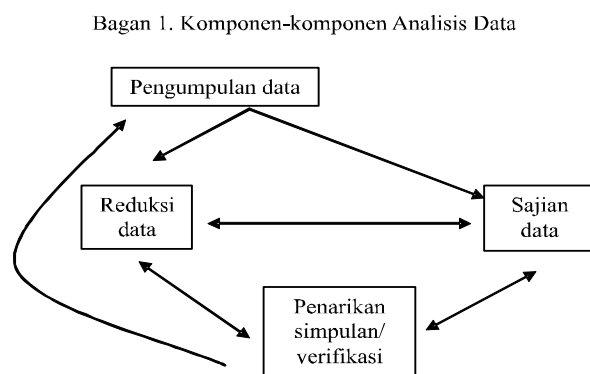
Teknik Cuplikan

Jenis penelitian ini lebih mengarah pada jenis teknik cuplikan yang dikenal sebagai *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Kemudian teknik *pusposiv sampling* dilanjutkan dengan teknik *Snowball sampling*. Teknik Pengambilan sampel dengan *snowball* ini mengimplikasikan jumlah sampel yang semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan (Pawito, 2007: 92).

Di sini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan permasalahan dan dapat dikembangkan dengan informan lainnya sebagai kelengkapan informasi yang diperlukan. Peneliti cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap yaitu dari pengurus partai dan tim pemenangan pemilu legislatif 2009 Partai Keadilan sejahtera.

Teknik Analisis

Proses analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan model analisis interaktif.



Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Menurut Miles & Huberman (1992: 53), model analisis interaktif ini ada tiga komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasinya, aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. Proses analisis interaktif dapat digambarkan dengan skema bagan 1.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Strategi Komunikasi Politik PKS pada Pemilu Legislatif 2009

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang mengklaim dirinya sebagai partai dakwah. Pencitraan diri PKS sebagai partai dakwah merupakan bentuk perwujudan dari partai yang berasaskan dan berideologikan Islam. Karena itu, maka strategi komunikasi politik PKS dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 adalah bercorak dakwah.

Dilihat dari sisi proses, dakwah pada dasarnya merupakan usaha transformasi sosial yang bergerak di antara keharusan ajaran dan kenyataan masyarakat yang menjadi obyek utamanya. Karena itu, dakwah sejatinya dilakukan dengan senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek kultural, selain aspek ajaran yang menjadi substansi informasi dalam proses tersebut. Dimensi politik, baik menyangkut pesan maupun lingkungan di mana dakwah dijalankan, juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan dakwah (Muhtadi, 2008: 119). Pendekatan dakwah dalam strategi komunikasi politik PKS ini dapat dipahami mengingat fungsi dakwah sebagai saluran akulturasi ajaran agama dalam tataran kehidupan masyarakat, senantiasa bersentuhan dan bergumul dengan gerak masyarakat yang mengitarinya.

Strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilu 2009 selain berazaskan dakwah, juga didasarkan pada hasil musyawarah nasional (munas) PKS tahun 2005. Hasil munas ini diperkuat dengan agenda ketiga dari hasil musyawarah kerja nasional (mukernas) PKS di Bali tahun 2008 yang terkait dengan Pemilu 2009. Dalam agenda ketiga tersebut dikatakan bahwa PKS akan terus meneguhkan target perolehan suara pada pemilu 2009 minimal

20 persen. Sedangkan target lainnya, secara nasional PKS harus bisa menempati posisi tiga besar partai politik dalam pemilu 2009.

Guna mencapai tujuan jangka panjang dan menengah, partai politik membutuhkan strategi yang bersifat jangka panjang maupun jangka menengah. Begitu juga dengan PKS, mempunyai strategi jangka panjang dan menengah. Menurut Firmanzah (2008:109) strategi partai dapat dibedakan dalam beberapa hal. *Pertama*, strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik ataupun selama periode pemilihan umum. Strategi ini penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara yang mendukung kemenangan suatu partai politik. *Kedua*, strategi partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain. *Ketiga*, strategi partai politik dalam mengembangkan dan memberdayakan organisasi politik secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan umum partai yang telah ditetapkan pada munas PKS tahun 2005 kemudian di *breakdown* menjadi program-program tahunan. Program-program tahunan dalam satu periode ini bisa dianggap sebagai strategi jangka panjang sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Firmanzah di atas. Adapun program tahunan tersebut selanjutnya di bagi menjadi empat item dalam satu periode: (1) Tahun konsolidasi partai; (2) Tahun pembinaan; (3) Tahun perluasan jaringan dan penokohan; (4) Tahun kemenangan pemilu; (5) Tahun evaluasi.

Kemudian menyikapi tahun keempat sebagai tahun kemenangan pemilu, PKS membagi satu tahun ini menjadi empat tahapan aksi kemenangan pemilu. Empat tahapan aksi dalam tahun kemenangan pemilu ini bisa dikatakan sebagai strategi jangka pendek sebagai kelanjutan strategi jangka panjang partai dalam satu periode kepengurusan. Adapun program-program dalam tahun kemenangan pemilu adalah *pertama*, PKS mendengar, yaitu kader PKS turun ke bawah dalam artian terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar aspirasi, apa yang dikeluhkan dan diinginkan oleh masyarakat. PKS mendengar ini merupakan sarana komunikasi partai dengan masyarakat atau konstituen langsung dari rumah

ke rumah atau disebut komunikasi *door to door*.

Kedua, PKS mengajak. Karena PKS tidak mungkin menangani semua permasalahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, maka PKS mengajak orang-orang atau pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. *Ketiga*, PKS berbicara. Berbicara kepada masyarakat dengan berdasarkan *platform* partai sebagai tindak lanjut dari PKS mengajak. *Keempat*, PKS menang. Artinya dari program-program yang telah dilakukan oleh kader PKS di tengah-tengah masyarakat, maka diharapkan terwujudnya simpati masyarakat. Bentuk dari simpati masyarakat inilah yang diharapkan membantu tercapainya target PKS dalam memenangi pemilu 2009.

Dalam menjalankan empat tahapan aksi kemenangan pemilu tersebut di atas, PKS menggunakan tiga strategi komunikasi politik. *Pertama* adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi langsung kader PKS dengan masyarakat dari rumah ke rumah atau istilah lainnya *door to door*. *Kedua* yaitu komunikasi publik, yang dilakukan oleh calon legislatif (caleg) dengan warga masyarakat atau khalayak umum di tempat terbuka. Dan *ketiga* adalah komunikasi massa melalui media dalam rangka membangun opini publik.

Strategi komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh para kader PKS merupakan bentuk komunikasi langsung kepada masyarakat dengan cara *door to door*. Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau lebih dalam sebuah kelompok kecil dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (Devito, 1989: 4). Adapun fungsi-fungsi komunikasi antarpribadi adalah fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Sebagai fungsi sosial, komunikasi antarpribadi ini mencakup tiga aspek yaitu: *Pertama*, manusia berkomunikasi untuk mempertemukan kebutuhan biologis dan psikologis; *kedua*, manusia berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial; *ketiga*, manusia berkomunikasi untuk mengembangkan hubungan timbal balik; *keempat*, manusia berkomunikasi untuk meningkatkan dan merawat kualitas diri

sendiri (Liliweri, 1993: 27-23).

Dengan pendekatan komunikasi personal, kader-kader PKS bisa langsung mengetahui respon balik dari masyarakat. Menurut Aubrey Fisher (1986: 390) umumnya konseptualisasi tentang umpan balik adalah pesan balik yang disampaikan penerima kepada sumber, respons penerima kepada pesan sumber yang semula. Umpan balik, katanya, merupakan perbedaan antara komunikasi satu arah dan dua arah, perbedaan yang akan terus dipandang tidak penting dalam memahami fenomena komunikasi manusia. Keberhasilan komunikasi ini akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon non-verbal dari masyarakat. Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena dalam komunikasi baik komunikator maupun komunikan dapat menggunakan kelima alat indera untuk mempertinggi daya persuasif pesan yang disampaikannya.

Dalam konteks Indonesia dan khususnya PKS, komunikasi politik dalam bentuk komunikasi interpersonal masih dianggap penting dan efektif. Hal ini berbeda dengan beberapa kalangan Ilmuwan Komunikasi politik di dunia (Danial, 2009: 35) yang mengatakan adanya semacam kesepakatan bahwa dalam dua dekade terakhir ini terdapat perubahan mendasar dalam cara-cara politik dikomunikasikan, khususnya dalam *campaign communication*, di negara-negara demokrasi maju. Stanyer (2003) menambahkan, salah satu bentuk perubahan itu adalah di-tinggalkannya kampanye dalam bentuk komunikasi interpersonal langsung (*direct-campaign*) dan digantikan dengan bentuk kampanye di media (*mediated-campaign*).

Strategi komunikasi politik yang kedua adalah komunikasi publik yang dilakukan oleh caleg PKS dalam bentuk pidato kampanye di lapangan terbuka atau dialog dengan masyarakat yang diikuti sekitar 200 sampai 300 orang. Bentuk dialog ini bisa dikategorikan sebagai bentuk komunikasi publik atau penyebaran informasi dari satu orang kepada banyak orang. Menurut Richard West dan Lynn H. Turner (2009: 40) dalam berbicara di depan publik, para pembicara biasanya memiliki tiga tujuan utama dalam benak mereka: *pertama*, memberi informasi; *kedua*,

menghibur; dan *ketiga*, membujuk. Kegiatan para calon anggota legislatif dari PKS ketika berdialog dengan warga yang jumlahnya relatif banyak bertujuan untuk memberi informasi dan membujuk. Para caleg memberi informasi tentang visi misi dan program-program partai kepada masyarakat agar masyarakat mengenal dan selanjutnya bisa dibujuk atau dipersuasi agar pada pemilu legislatif 2009 dengan kesadarannya mau memilih PKS.

Ketiga, strategi komunikasi politik pada masa kampanye oleh PKS adalah membangun opini publik (pendapat umum) melalui media massa. Menurut Hafied Cangara (2009: 158) pendapat umum adalah gabungan pendapat perseorangan mengenai suatu isu yang dapat memengaruhi orang lain, serta memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi pendapat-pendapat tersebut. Ini berarti pendapat umum hanya terbentuk kalau menjadi pembicaraan umum, atau jika banyak orang penting (elite) mengemukakan pendapat mereka tentang suatu isu sehingga bisa menimbulkan pro atau kontra dikalangan masyarakat.

Media massa merupakan wahana komunikasi yang dapat menembus batas ruang dan waktu. Bahkan Marshall McLuhan (dalam Sendjaja, 2004: 51) mengatakan bahwa media komunikasi modern ini memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk dapat berhubungan dengan hampir setiap sudut dunia. Penggunaan media massa ini mampu menyampaikan dan mengenalkan visi-misi dan program kepartaian PKS kepada masyarakat umum secara luas.

Penggunaan komunikasi massa oleh partai politik karena bentuk komunikasi ini mempunyai fungsi persuasif. Menurut Joseph A. Devito (1997: 123) fungsi persuasi dianggap sebagai fungsi paling penting dari komunikasi massa. Persuasi bisa datang dalam berbagai bentuk; *pertama*, mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; *kedua*, mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; *ketiga*, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan *keempat*, memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu. Fungsi persuasif dari komunikasi massa tersebut diharapkan oleh PKS untuk dapat mengukuhkan dan memperkuat sikap dan pandangan partai agar

bisa mengubah sikap masyarakat terhadap PKS untuk selanjutnya menggerakkan masyarakat umum memilih PKS dalam pemilu 2009.

Proses komunikasi politik PKS yang diuraikan di atas selanjutnya dapat dilihat dengan pendekatan Model Transaksi Simultan (*Simultaneous transactions Model*) dari Melvin L. DeFleur (1993: 21-25) dengan karakteristiknya yang nonlinear. Model ini menggambarkan sekurang-kurangnya tiga faktor yang berpengaruh dalam proses komunikasi politik dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Pertama*, faktor lingkungan fisik (*physical surroundings*), yakni lingkungan masyarakat di mana PKS berada, turut mempengaruhi terhadap pola komunikasi itu berlangsung dengan menekankan pada aspek *what* dan *how* pesan-pesan komunikasi politik partai dipertukarkan. *Kedua*, faktor situasi sosio-kultural (*sociocultural situations*), yakni bahwa proses komunikasi politik PKS merupakan bagian dari situasi sosial yang di dalamnya terkandung makna kultural tertentu, sekaligus menjadi identitas dari para pelaku komunikasi yang terlibat di dalamnya. *Ketiga*, faktor hubungan sosial (*social relationships*), yakni bahwa status hubungan antar pelaku komunikasi, yakni antara pengurus, kader, dan caleg PKS dengan masyarakat umum sangat berpengaruh, baik terhadap isi pesan itu sendiri ataupun terhadap proses bagaimana pesan-pesan itu dikirim dan diterima.

Peran Media pada Pemilihan Umum

Peran media dalam kampanye pemilu sangatlah penting. Hampir tidak ada satupun partai politik yang tidak menggunakan media dalam sosialisasi dan kampanye partai. Pada beberapa partai politik, biaya dan anggaran terbesarnya banyak dialokasikan untuk belanja iklan di media. Karena media dianggap sebagai sarana yang efektif dan massif dalam menginformasikan dan memperkenalkan suatu partai berikut program-programnya. Selain visi misi partai, tentunya sosok personal caleg-caleg dari masing-masing partai banyak bermunculan dan menghiasi wajah media massa baik elektronik maupun cetak. Pentingnya partai politik melakukan komunikasi melalui media karena komunikasi massa mempunyai beberapa ciri; *pertama*, komunikasi massa

diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen, dan anonim. *Kedua*, pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin khalayak secara serempak dan sifatnya sementara. *Ketiga*, komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar (Wright dalam Severin dan Tankard, 2005: 4).

Persaingan dalam pemilu 2009 oleh partai-partai politik, baik partai baru atau partai lama cukup ketat untuk merebut suara pemilih. Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi komunikasi dan media di Indonesia, maka semakin cepatlah informasi politik dan kepartaian dapat disampaikan secara langsung kepada pemilih tanpa melakukan penggalangan massa dan mobilisasi massa di lapangan untuk berkampanye. Munculnya persaingan antar partai ini telah melahirkan berbagai macam persaingan yang sehat maupun tidak sehat seperti perang propaganda dengan saling mengklaim jasa pada masyarakat dan mengumbar janji-janji semu kepada khalayak pemilih.

Walau diakui dalam pemilihan umum, peran media kurang begitu besar pada perolehan suara partai, tetapi penggunaan media tetap dibutuhkan oleh partai politik termasuk PKS. Penggunaan media ini baik dalam bentuk iklan, berita, dialog interaktif, maupun bentuk komunikasi lainnya, adalah lebih ditujukan untuk menjaga memori masyarakat (agar tidak lupa) terhadap program-program kerja PKS yang telah dilakukan selama hampir empat tahun sebelum pemilu. Strategi PKS dalam memenangi pemilu 2009 memang tidak hanya bertumpu pada penggunaan media menjelang pemilu saja, sebagaimana dilakukan oleh partai politik lainnya tetapi lebih pada program-program partai yang berkesinambungan. Karena PKS yakin, masyarakat bisa mencermati mana partai yang bekerja untuk rakyat dan mana yang tidak. Masyarakat yang pernah bersinggungan dengan program-program kerja PKS selama inilah yang nantinya akan menjadi suara potensial bagi PKS. Jadi, agar kerja PKS yang selama ini sudah banyak dilakukan tidak sia-sia atau dilupakan masyarakat, maka PKS menggunakan strategi media untuk mempertahankan suara yang telah didapat pada pemilu 2004

sebelumnya.

Peran media massa dalam mempengaruhi khayalak tidak diragukan lagi, bahkan pada masa-masa awal perkembangan teori komunikasi massa, pengaruh media massa sangat kuat dan dominan sampai akhirnya muncul teori-teori baru yang mematahkan asumsi bahwa khalayak tak berdaya seperti teori peluru. Dalam konteks pemilu 2009, media massa tetap mempunyai peran penting dalam sosialisasi program partai dan pengenalan para caleg dari partai politik. Peran-peran media massa seperti ini diakui oleh PKS, karenanya PKS tetap menggunakan media massa dalam strategi komunikasi politik partai.

Ada sejumlah kekhawatiran bahwa pengaruh media massa sangat kecil dalam mengubah sikap dan perilaku pemilih dalam setiap pemilihan umum. Para analis melihat media massa hanya mampu dalam tataran memperkokoh sikap dan perilaku yang telah ada, bukan mempengaruhi untuk mengubah sikap dan perilaku tersebut. Namun, pandangan ini agak berbeda dengan pendapat Dan Nimmo dan Robert L. Savage (dalam Cangara, 2009: 412) yang mengatakan bahwa "*there is a close relationship between candidate image and voting behavior.*" Di sini dapat dilihat bahwa peran media massa dalam kampanye adalah dapat membuat perbedaan terutama bagi orang-orang yang bersikap independen dan belum punya pilihan, dan dapat merubah sikap dan perilakunya setelah melihat citra partai politik melalui media.

Dampak Penerapan Strategi Komunikasi PKS terhadap Perolehan Suara Partai

Strategi komunikasi politik PKS bukanlah satu-satunya variabel penentu terhadap peningkatan perolehan suara partai pada pemilu legislatif 2009. Namun begitu, penerapan strategi komunikasi ini ikut berperan menentukan keberhasilan suatu partai dalam memenangkan pemilu, karena strategi ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara tujuan partai dengan hasil yang didapatkan.

Seberapa besar kontribusi strategi komunikasi politik terhadap perolehan suara PKS, belum bisa diprediksi secara akurat. PKS hanya melakukan survei tentang kecenderungan rakyat

terhadap partai dan apa yang dilakukan partai terhadap rakyat. Dari survei ini, PKS melihat indikator-indikator kecenderungan masyarakat dalam memilih partai atau perilaku pemilih. Survei ini juga menunjukkan bahwa partai politik cenderung menggunakan *money politic*, begitu juga dengan masyarakat yang cenderung menyukainya, karena dianggap lebih pragmatis. Sehingga berdasarkan evaluasi internal PKS terhadap keberhasilan partai demokrat, adalah karena partai ini mampu membangun *image* di masyarakat sebagai partai yang memberikan kemanfaatan yang besar terhadap rakyat.

Secara umum dampak dari penerapan strategi komunikasi politik PKS pada pemilu 2009 kurang signifikan terhadap peningkatan perolehan suara partai. Hasil perolehan suara pada pemilu legislatif 2009 ini, disadari oleh segenap pengurus dan kader PKS sebagai sesuatu yang di luar dugaan, karena target PKS pada pemilu 2009 adalah memperoleh 20% suara, tapi kenyataannya hanya sekitar 7% suara. Kalau target PKS wilayah Yogyakarta adalah sebelas kursi di DPRD dan hanya mendapat tujuh kursi. Namun begitu, perolehan suara PKS pada pemilu kali ini ada sedikit kenaikan dibanding periode sebelumnya. Pada pemilu legislatif 2009, PKS memperoleh 7.88% suara sedang pada pemilu 2004 PKS hanya memperoleh 7.34% suara secara Nasional (www.calegindonesia.com). Dan untuk Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PKS memperoleh tujuh kursi di DPRD Propinsi pada pemilu 2009 sedang periode pemilu 2004 yang lalu memperoleh enam kursi (www.kpud-diyprov.go.id). Perolehan PKS dalam pemilu legislatif 2009 di wilayah Yogyakarta ini masih lebih baik dibanding Partai Amanat Nasional (PAN) yang basisnya ada di Yogyakarta, kecuali partai Demokrat yang memang naik secara signifikan.

Dalam menjalankan strategi komunikasinya dalam memenangkan pemilu legislatif 2009, PKS sudah semaksimal mungkin mengerahkan segenap daya dan usaha. Namun, bagaimanapun pengurus dan kader PKS memprediksikan melalui survei pra pemilu, keadaan dan suasana persaingan antar partai politik sulit diperkirakan. Fenomena Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan partai

Demokratnya diakui oleh PKS sebagai badai tsunami yang menggilas suara-suara partai politik lainnya, tak terkecuali PKS. SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Demokrat diuntungkan oleh posisinya sebagai presiden *incumben* sehingga SBY identik dengan partai Demokrat.

Dengan posisinya sebagai presiden, SBY bisa membuat program-program kerakyatan yang populis menjelang pemilu 2009 yang menguntungkan partai Demokrat. Kebijakan-kebijakan yang populis seperti penurunan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini telah mendapat apresiasi dan simpati masyarakat luas walaupun banyak diprotes dan dikritik oleh para elit partai politik lainnya. Masyarakat yang pragmatis hanya melihat kemanfaatan yang nyata yang diberikan oleh partai politik, bukan visi-misi atau hanya slogan politik saja. Apresiasi dan simpati masyarakat terhadap kebijakan populis pemerintah menjelang pemilu inilah, salah satu hal yang dapat mengubah preferensi masyarakat terhadap partai Demokrat pada pemilu legislatif 2009, sehingga perolehan suara demokrat naik drastis sampai 300% dibanding pemilu 2004, yaitu dari 7.45% menjadi 20.85% suara pemilih.

Simpulan

Dalam menghadapi pemilu legislatif 2009, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggunakan strategi komunikasi politik yang bercorak dakwah. Strategi pemenangan pemilu PKS selanjutnya direncanakan dalam bentuk empat tahapan aksi; *pertama*, PKS mendengar; *kedua*, PKS mengajak; *ketiga*, PKS bicara; dan *keempat*, PKS menang. Keempat tahapan aksi ini diterapkan pada tahun pemenangan pemilu menjelang pemilu 2009. Dalam menjalankan empat tahapan aksi pemenangan pemilu tersebut, PKS menggunakan strategi komunikasi politik dengan pendekatan komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa.

Peran media pada pemilu legislatif 2009 sangatlah penting, sehingga hampir semua partai politik menggunakannya. Pada pemilu ini, PKS menggunakan hampir semua media yang ada di Yogyakarta, baik media cetak berupa koran maupun media elektronik seperti radio dan televisi.

Bentuk-bentuk komunikasi politik dalam media massa ini bisa berupa iklan, *press releas*, dan dialog interaktif.

Dampak strategi komunikasi politik PKS yang diterapkan pada pemilu legislatif 2009 terkesan kurang signifikan pada peningkatan perolehan suara partai. Suara PKS hanya naik sedikit, yaitu sebanyak tujuh kursi di DPRD Propinsi Yogyakarta, atau naik satu kursi dibanding pada pemilu 2004 yang hanya memperoleh enam kursi. Kurang berdampak signifikannya strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh PKS banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut adalah adanya pengaruh kuat dari partai Demokrat dengan profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mampu mengubah preferensi sikap politik masyarakat pemilih untuk memilih partai demokrat dibanding partai politik lainnya.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba, 1990, *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori, dan strategi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Danial, Akhmad, 2009, *Iklan Politik TV: Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, LkiS, Yogyakarta.
- DeFleur, Melvin L., Patricia Kearney, Plax, Timothy, 1993, *Fundamentals of Human Communication*, Mayfield Publishing Company, California.
- Devito, Joseph A., 1997, *Komunikasi Antara Manusia*. (Edisi terjemahan oleh Agus Maulana), Profesional Books, Jakarta
- Effendy, Onong U., 1993, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Firmanzah, 2008, *Marketing politik; Antara Pemahaman dan Realitas*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Fisher, B. Aubrey, 1986, *Teori-teori Komunikasi*, (Edisi terjemahan oleh Soejono Trimo), Remadja Karya, Bandung.
- Liliweri, Alo, 1994, *Perspektif Teoritis*

- Komunikasi Antar Pribadi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*. (Edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi), UI Press, Jakarta.
- Muhtadi, Asep Saiful, 2008, *Komunikasi politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pawito, 2009, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Kalasutra, Yogyakarta.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa, 2004. *Teori Komunikasi*, Pusat Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Severin, Werner J. Dan James W. Tankard, Jr., 2005, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*. (Edisi terjemahan oleh Sugeng Harianto), Kencana, Jakarta.
- Stanyer, James. 2003. *Review Article: Political Communication in Transition, Conceptualizing Change, and Understanding its Consequences*. European Journal Communication. Vol. 18 (3). Sage Publication.
- Sutopo, H.B., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- West, Richard dan Lynn H. Turner, 2009, *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi* (Edisi terjemahan oleh Maria Natalia Damayanti Maer), Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.

KONSEP DIRI EKS WANITA TUNA SUSILA PASCA RAZIA (STUDI KASUS DI PANTI SOSIAL BINA KARYA WANITA HARAPAN MULYA KEDOYA JAKARTA)

Syaiful Rohim

Uhamka Jakarta, Jl Limau 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Hp. 08159349713 / e-mail : Al_qorri@yahoo.co.id

Abstract

In general this research, to see how the rehabilitation program is, how's the interaction, social adaptation, and also the self concept of ex prostitute before and after joins the rehabilitation.

This research will be very interesting to be done, because when researcher revealed the subjective reality from one prostitute that enter and join the rehabilitation process, the adaptation readiness also will be revealed. This research that was going on emic was done by deeper interview method, observation, and documentation study as a technic in getting the data.

This research shows that the self concept of ex prostitute is negative before enter the rehabilitation (when become a prostitute) based on the subject motivation to be a prostitute, and also as a self image of physic perception, mental, and social during as a prostitute. Beside that it is also found self concept polarization become a positive and negative self concept after join the rehabilitation based on the the perception of physic, social, and mental. From the self concept polarization, it is formed to be three typology of ex prostitute; they are optimistic ex prostitute, dilemmatic ex prostitute, and pessimistic ex prostitute. In social adaptation readiness concept context, it is also found three classification of social adaptation readiness of ex prostitute in Bina Karya Wanita "Harapan Mulya" Rehabilitation Kedoya Jakarta to be: ex prostitute ready to adaptation, ex prostitute unready and pragmatic or conditional ex prostitute.

Key words: *ex prostitute, self concept, communication, rehabilitation*

Pendahuluan

Di antara sekian masalah yang cukup serius yang dialami bangsa kita sebagai pengaruh dari globalisasi ini ialah merajalelanya wanita tuna susila (WTS) dan atau sering disebut pekerja seks komersial (PSK). Data ini tercatat bahwa fakta angka tahun 2006 jumlah Pekerja Seks Komersial (perempuan) mencapai 240 ribu dan 30 persen PSK Indonesia adalah anak-anak dibawah usia 18 tahun. (Dinas Sosial Prop.DKI Jakarta, 2006)

Maraknya pekerja seks komersial atau pelacur ini di Jakarta mengharuskan Pemda Propinsi DKI Jakarta menyusun kebijakan dan menerapkan langkah-langkah penganggulangan yang terpadu dan menyeluruh dalam suatu sistem

yang efektif dan komprehensif, baik penegakan hukum untuk mengurair suplai (*supply reduction*) maupun pendekatan kesejahteraan untuk menekan dan mengatasi laju jumlah WTS di Jakarta. Pada kenyataannya usaha-usaha untuk menanggulangi permasalahan ini tetap sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Permasalahannya selain terletak pada terbatasnya jangkauan dan kemampuan pemerintah, juga karena kompleksitas rumitnya seputar masalah pelacuran ini. Berkembangnya kasus-kasus dan semakin pesatnya jumlah WTS ini berkaitan langsung dengan kesehatan mental masyarakat serta sebagai akumulasi dari berbagai masalah sosial dan kepribadian. Berangkat dari hal ini pula penanganan yang bersifat kema-

syarakatan dengan berbasis masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.

Sesuatu hal yang wajar manakala dalam diri setiap manusia memiliki hasrat seksualitas sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Secara kodrati seksualitas merupakan kebutuhan biologis setiap individu. Namun anugerah tersebut nampaknya terkadang dijadikan suatu penyimpanan seksualitas dan komersialisasi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apapun alasannya dan bagaimanapun bentuknya pekerja seks komersial, wanita tuna susila, pelacuran, dan perzinaan dilarang keras baik oleh agama maupun masyarakat. Semua agama di muka bumi ini melarang terhadap kegiatan prostitusi, terlebih ajaran agama Islam telah memberikan pelarangan yang keras karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan tercela sesuai dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الْإِسْرَاءُ: 32)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan suatu jalan yang buruk" (Q.S. Al-Isra: 32)

Pelacur, ayam, lonte, WTS, dan PSK adalah sedikit dari sekian banyak antrian panjang istilah yang kerap terdengar ketika seseorang menunjuk pada sosok perempuan penjaja "daging mentah" pemuas nafsu birahi kaum lelaki hidung belang ini. Persoalan di sekitar semua istilah transaksi "bisnis lendir" itulah masyarakat memberikan julukan atau *labeling* yang sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap konsep dirinya. Ini kemudian dikonstruksi untuk mengontrol aktivitas seks yang tidak sesuai dengan norma masyarakat (Koentjoro, 2004). Akan tetapi julukan yang dianggap suatu kewajaran tersebut jangan dijadikan suatu alasan untuk tidak menerima mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat.

Penangkapan atau razia yang dilakukan pemerintah saat mereka beraktivitas sebagai pelacur, membuat terjadinya perubahan psikologis terutama sekali ketika menjalani pembinaan di panti rehabilitasi selama 3-6 bulan pasca

penangkapan/razia. Mereka menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya dan mungkin mempunyai konsep diri yang baru. Tragedi penangkapan yang membawanya ke tempat rehabilitasi membawa seorang pelacur/WTS mengalami perubahan dunia sosial dan kesadaran yang baru yang berbeda ketika sebelum berada dalam panti rehabilitasi. Perubahan tersebut membuat mereka melakukan introspeksi dan redefinisi terhadap dirinya, sehingga akhirnya ia mempunyai konsep diri yang baru, karena konsep diri bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir melainkan terbentuk dari pengalamannya. Mead (dalam Sobur, 2003:512) memberikan definisi diri sebagai produk sosial yang dibentuk melalui proses interaksi dan organisasi pengalaman-pengalaman psikologis.

Dari semua tindak komunikasi yang paling penting adalah diri (*self*), siapa anda dan bagaimana anda mempersepsikan diri sendiri dan orang lain akan memengaruhi komunikasi anda dan tanggapan anda terhadap komunikasi orang lain (Rahman, 2004:96). Ini menjadi implikatif dan kompleks ketika para mantan WTS mempersepsikan dirinya ketika berinteraksi dan melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan dunia baru yang sebenarnya merupakan situasi dan suasana yang tidak dikehendaki sebelumnya, karena prosesnya ia memasuki tempat rehabilitasi atau panti melalui pemaksaan yakni karena tertangkap ketika razia. Dalam unit ini kita mendalami dua aspek dalam diri (*self*). Pertama menelaah kesadaran diri dan mengamati beberapa dalam diri (*self*) seorang mantan wanita tuna susila. Kedua membahas pengungkapan diri, bentuk komunikasi dimana seseorang mengungkapkan sesuatu tentang siapa diri. Kesadaran diri merupakan landasan bagi semua bentuk dan fungsi komunikasi (Kleinke, 1978, dalam Rahman, 2004:8). Ini dapat dijelaskan dengan baik melalui teori jendela (*Johari Window*) yang membagi empat daerah atau kuadran pokok: daerah terbuka, daerah buta, daerah tertutup, dan daerah gelap.

Suatu kondisi yang wajar manakala berbagai macam kompleksitas konflik dan permasalahan yang mereka alami menjadi hal terberat dalam melakukan komunikasi dan interaksi sosial dengan anggota masyarakat lainnya, karena

sejak lahir manusia telah memiliki dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu *pertama* keinginan menjadi manusia yang berubah serta menjadi lebih baik dan *kedua* keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di lingkungan sekitarnya /masyarakat (Soekanto, 2002:124). Kesiapan untuk melakukan penyesuaian sosial pasca rehabilitasi adalah sesuatu hal yang terberat bagi mereka ketika mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat, atau bahkan mereka menjadi *inferior* (rendah diri) dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat tempat mereka tinggal. Dalam konteks komunikasi yang berkaitan dengan relasi antar pribadi, konsep diri merupakan faktor yang amat menentukan, karena setiap orang bertingkah laku/berkomunikasi sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya (Rakhmat, 2005:104). Rakhmat menambahkan, sukses komunikasi interpersonal ini banyak bergantung pada kualitas konsep diri seseorang; positif atau negatif. Oleh karena itu untuk meneliti kesiapan adaptasi sosial seorang mantan pelacur pasca rehabilitasi harus diawali dengan memahami bagaimana konsep diri mereka sebelum dan selama menjalani proses rehabilitasi di dalam panti.

Kajian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi yaitu teori sekaligus pendekatan yang dikembangkan oleh Alfred Shultz yang telah mapan dan penting dalam penelitian komunikasi (Littlejohn, 2002:203), dianggap dapat digunakan dalam melihat fenomena dan realitas komunikasi yang berasal dari intersubektivitas kesadaran para mantan pelacur atau dalam istilah pemerintah "WTS", karena pendekatan dan spirit pemikiran Shultz ini berkaitan dengan pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau dengan kata lain bagaimana orang memahami objek dan peristiwa atas pengalaman sadar mereka.

Menurut Schutz, sebagaimana dikutip Kuswarno (2004:48) bahwa dunia sosial tidak terlepas dari aspek historis. Dalam konteks ini, maka Schutz mengatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Lebih lanjut Schutz menjelaskan bahwa melihat ke depan pada masa yang akan datang (*looking-forward into the future*) merupakan hal yang esensial bagi konsep tindakan

atau *action*. Tindakan adalah perilaku yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan pada masa datang yang telah ditetapkan (*determinate*). Dengan demikian, tujuan tindakan memiliki elemen ke masa depan dan elemen ke masa lalu. Dari dimensi historis tersebut, Schutz memunculkan konsep *recipe knowledge*. Menurut Schutz, bahwa pengalaman sebelumnya sebagai '*recipe knowledge*' dalam menjalani kehidupan keseharian pada masa dan kondisi yang berbeda di kemudian hari, sangatlah penting bagi seseorang.

Dalam konteks fenomenologis seorang mantan pelacur adalah pemeran (aktor) kehidupan yang suka atau tidak suka merupakan bagian dari kehidupan manusia dan ada di sekelilingnya. Kehidupan para pelacur memang unik dan sarat akan aspek historis apalagi kehadirannya di panti rehabilitasi adalah suatu sisi kejadian yang dialami dengan tidak dikehendaki sebelumnya. Meskipun dengan keterpaksannya hadir dan mengikuti kegiatan-kegiatan rehabilitasi di panti seorang eks WTS senantiasa akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk memenuhi hasratnya sebagai makhluk sosial. Kehadirannya di panti rehabilitasi telah membuat kebiasaan lama yang ia lakukan tidak bisa dilakukannya lagi dalam beberapa waktu, dan mungkin kelak bisa dilakukannya lagi saat setelah keluar dari panti atau dalam istilah Shultz disebut konsep *recipe knowledge*.

Dalam konteks lain, persoalan menjadi amat rumit dan dilematis manakala saat seorang mantan pelacur yang telah menjalani proses pembinaan di dalam panti rehabilitasi dan kembali di kehidupan masyarakat, ia kembali melakukan kebiasaan yang lamanya menjadi seorang pelacur yang tentunya dianggap melanggar norma masyarakat. Ini berarti bahwa usaha pemerintah tidak menunjukkan keefektipan hasil yang signifikan. Dalam persoalan ini pula peneliti ini akan melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan upaya lembaga panti rehabilitasi dalam melakukan pembinaannya terhadap para mantan WTS setelah pemerintah menangkapnya dalam operasi razia. Apabila dalam penelitian ini digunakan perspektif fenomenologi, hubungan-hubungan sosial dalam konteks relasi antar pribadi yang terjadi di dalam panti tersebut dimaknai

sebagai interaksi sadar yang sarat dengan muatan subyektif, kreatif, inovatif dan sebagainya, maka secara metodologis karakteristik subjektif para mantan pelacur tersebut dapat terungkap lebih maksimal

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Johari Window. Sebagai suatu pendekatan komunikasi, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan pada bingkai mana mantan pelacur/ WTS berkomunikasi dalam konteks relasi antar pribadi selama mengikuti proses rehabilitasi. Pendekatan ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa ada suatu bagan yang dapat menunjukkan tentang daerah dalam diri kita yang merupakan area publik (*public self*) yang diketahui orang lain, area pribadi atau *private self* yang tidak diketahui oleh orang lain, aspek diri yang kita ketahui pada sebelah kiri dan aspek diri yang tidak kita ketahui pada sebelah kanan (Rakhmat, 2005:107). Dalam teori Johari Window yang lengkap terdapat empat bagian yang disebut sebagai kamar-kamar jendela yang dapat menjelaskan diri kita.

Gambar 1.1 Teori Johari Window (Rakhmat, 2005:108).

Kita Ketahui	Tidak Kita Ketahui
Terbuka	Buta
Tersembunyi	Tidak Dikenal

Kamar pertama merupakan daerah terbuka (*open area*) yang meliputi semua perilaku dan motivasi yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain. Sedangkan daerah yang kedua adalah daerah tersembunyi (*hidden area*) yang kita ketahui dan tidak diketahui oleh orang lain. Daerah tidak dikenal (*unknown area*) merupakan area terakhir yang kita sendiri dan orang lain tidak mengetahuinya (Rakhmat, 2005:108). Menurut Liliweri (1997:49-50) Jendela Johari terdiri dari empat bingkai yang masing-masing bingkai berfungsi menjelaskan bagaimana tiap individu mengungkapkan dan memahami diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. Kleinke (Devito, 1997:57) mengatakan bahwa kesadaran diri merupakan landasan bagi semua bentuk dan fungsi komunikasi dan ini dapat dijelaskan dengan baik

melalui jendela Johari. Oleh karena itu fenomena komunikasi (terutama yang berkaitan dengan konsep diri) para mantan wanita tuna susila sangat tepat digambarkan dengan menggunakan konsep jendela Johari (Johari Window).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tradisi penelitian fenomenologis, dalam istilah Lindlof (1995:27) disebut dengan paradigma interpretif (*interpretive paradigm*) untuk merujuk pada penelitian komunikasi yang dengan metode kualitatif yang melakukan tradisi fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, etnografi dan studi kultural. Creswell (1998:14) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang latar dan tempat serta waktunya secara alamiah. Paradigma ini juga memungkinkan untuk dilakukan interpretasi secara kualitatif atas data-data penelitian yang telah diperoleh.

Selain itu penelitian ini akan memberi peluang yang besar untuk dibuatnya interpretasi-interpretasi alternatif. Mulyana (2002) menyebut penelitian kualitatif ini sebagai perspektif subjektif. Asumsi-asumsi dan pendekatan serta teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan dengan ciri-ciri dari penelitian yang berperspektif subyektif, sebagaimana dikemukakan Mulyana, (2002: 147-148) yaitu: (1). Sifat realitas yang bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah-ubah), dikonstruksikan, dan holistik, (2). Aktor (subyek) bersifat aktif, kreatif dan memiliki kemauan bebas, (3). Sifat hubungan dalam dan mengenai realitas (komu-nikasi), (4). Hubungan peneliti dengan subyek penelitian juga bersifat setara, empati, akrab, interaktif, timbal balik, saling mempengaruhi dan berjangka lama, (5). Tujuan penelitian terkait dengan hal-hal yang bersifat khusus, (6). Metode penelitian yang deskriptif (wawancara tak berstruktur/ mendalam, pengamatan berperan serta), analisis dokumen, studi kasus, studi historis-kritis, dengan lebih menekankan pada penafsiran, (7). Analisis bersifat induktif, (8). Otentisitas (sejauhmana temuan penelitian mencerminkan penghayatan subyek yang diteliti) adalah kriteria kualitas penelitian subyektif, dan (9). Nilai, etika, dan pilihan moral peneliti

melekat dalam proses penelitian.

Sebagaimana tradisi fenomenologi yang pada umumnya menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala (Creswel, 1998:51). Dalam penelitian ini pun akan berupaya mendeskripsikan pengalaman hidup subjek penelitian (eks WTS), dengan menggunakan studi biografi untuk menelusuri sejarah hidup eks WTS terjun ke dunia pelacuran. Pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu memperoleh gambaran utuh dari fenomena komunikasi *intrapersonal* dan *interpersonal* seorang mantan WTS dalam melakukan proses sosial pasca razia.

Pendekatan ini, diyakini mampu mengarahkan pencarian paradigma baru ilmu komunikasi dari kombinasi antara perspektif subyek yang diteliti yakni para psikolog atau Pembina panti rehabilitasi dan para mantan WTS, serta dari perspektif peneliti sendiri. Pertimbangan lainnya, karena menurut Muhadjir (2000: 149), “lebih mampu mengungkapkan realitas ganda, lebih mengungkapkan hubungan yang wajar antara peneliti dengan informan, dan karena metode kualitatif lebih sensitif dan adaptif terhadap peran pelbagai pengaruh timbal-balik” .

Untuk mengungkap realitas eks WTS dengan karakteristik sebagaimana yang telah disebutkan di atas perlu digunakan pendekatan interpretif, karena pendekatan ini akan memberi ruang bagi setiap peneliti untuk melakukan eksplorasi (penggalian) data penelitian secara alami atau lebih dekat dan lama bersama subyek penelitian (emik). Kedekatan dan kelamaan peneliti bersama subyek penelitian memungkinkan peneliti dapat mengungkap realitas-realitas yang khas dan tersembunyi dari komunitas yang unik seperti eks wanita tuna susila, sehingga hasil penelitian ini lebih maksimal dan kaya akan data-data otentik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Diri Eks WTS

Dalam sub bab ini peneliti menyajikan hasil analisis mengenai gambaran diri eks wanita tuna susila yang menjadi subjek penelitian sebelum mengikuti kegiatan panti rehabilitasi dan selama menjalani proses rehabilitasi. Gambaran ini peneliti peroleh dari hasil wawancara mendalam dengan

subjek penelitian atau responden. Perlu ditegaskan bahwa kehadirannya di panti rehabilitasi bukan atas kesadaran diri sendiri, namun karena hasil penangkapan atau razia. Sebelum itu peneliti akan menganalisis gambaran diri dari subjek penelitian dari aspek fisik, psikologis dan sosial. Sebagaimana William D. Brook melihat konsep diri seseorang terdiri dari persepsinya tentang fisik, psikologis dan sosialnya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan elemen fisik diantaranya meliputi segi jasmani dan penampilan diri/*performance*, sedangkan elemen yang bersifat psikis bisa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perilaku personal, misalnya tanggungjawab, harapan/ ekspektasi, kemauan menerima, percaya diri, orientasi dan lain-lain. Elemen social erat kaitannya dengan kedudukan atau persepsi diri yang berkenaan dengan perilaku social misalnya persahabatan, hubungan keluarga, tingkat pendidikan dan sebagainya.

Dalam konteks relasi antar individu atau komunikasi antarpribadi para eks wanita tuna susila di dalam panti rehabilitasi, penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana responden/ subjek penelitian membagi wilayah dirinya ke dalam tampilan yang ditunjukkan kepada umum, persepsi diri yang bersifat khusus atau pribadi yang memaparkan penilaian diri subjek yang diketahui orang lain dan interaksinya di dalam panti rehabilitasi dan konsep diri yang bersifat ideal antara yang ditampilkan untuk umum atau untuk situasi yang ideal atau normal. Sebagaimana Adler & Towne (1987) mengemukakan sedikitnya ada tiga dimensi diri yang terlibat dalam setiap saat kita berkomunikasi, diantaranya “*me*” yang bersifat pribadi/ *perceive self*; “*me*” yang bersifat ideal/ *desire self* dan “*me*” yang bersifat umum/ *public presenting*. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan data yang lebih komprehensif dan lengkap mengenai diri responden sebelum memasuki panti rehabilitasi. Dengan demikian proses perubahan dalam dirinya akan lebih terungkap secara mendalam.

Tampilan Diri untuk Umum

Sebagian subjek mengaku bahwa pekerjaan sebagai wanita malam tidak diketahui oleh orang lain bahkan ia pun membatasi dirinya

untuk berinteraksi dengan lingkungan di luar kelompok WTS. Ketika subjek berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya hampir semua responden menutup diri dan mengunci rapat wilayah sisi gelap diri dari orang-orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya sebagai wanita panggilan atau pelacur dengan melakukan pengelolaan kesan.

Tampilan Diri eks WTS yang bersifat Pribadi

Sebagaimana paparan diatas bahwa hampir semua subjek menyamarkan dinya di hadapan oranglain di luar dirinya baik kepada orang tua atau masyarakat sekitar dengan melakukan pengelolaan kesan atau *management impression*. Hal ini relevan dengna teori dramaturgis dari Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul *the Presentation of self in everyday Life* (1959) yang mengkaji kehidupan manusia dalam belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran yang terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan kepada satusama lain dan situasi yang mereka masuki serta perilaku-perilaku yang berlangsung dalam konteks identitas social, makna dan definisi situasi.

Hasil temuan dan observasi peneliti saat semua Warga Binaan Sosial (WBS) dalam hal ini eks WTS istirahat mereka mengubah tampilan dan performa diri dari mulai tindak tutur yang lebih bebas dan longgar/ leluasa dibanding saat ia berkomunikasi dan berinteraksi dalam kegiatan rehabilitasi hingga pakaian yang digunakan. Namun demikian *setting* tempat di mana ia berada yakni di dalam panti masih menjadi suatu batasan untuk berperilaku, walaupun dalam keadaan di dalam kamar atau wisma mereka sesekali mengoreksi diantara temannya karena khawatir kalau perilakunya diketahui petugas panti. Hal ini peneliti temui saat makan malam bersama semua WBS (sebutan bagi eks WTS yang sedang mengikuti pembinaan di dalam panti) manakala petugas panti tidak hadir dalam acara makan malam tersebut salah satu WBS mengeluarkan kata-kata kotor dan jorok dan saat itu pula seorang temannya menegurnya dan memarahinya agar tidak melakukan hal yang serupa. Selain bahasa verbal

yang terucap, peneliti juga melihat kekhawatiran dari seorang WBS tersebut yang sesekali melihat kepada peneliti jika kejadian tersebut sampai kepada petugas panti seolah ia masih meragukan keberadaan peneliti bersama mereka saat makan malam.

Gambaran Diri eks Wanita Tuna Susila Sebelum Memasuki Panti

Persepsi eks WTS tentang fisik

Semua responden memaparkan bahwa saat sedang menjadi pelacur atau sedang *mejang* ia memakai pakaian-pakaian yang seksi dan tidak senonoh misalnya spans pendek, tengtop dan baju yang amat minim misalnya bagian belakang yang terbuka, atau memakai pakian yang agak terbuka di bagian-bagian yang mereka akan menambah kecantikan dan keseksian mereka. Hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan diri ketika melayani tamunya. Untuk menambah pesona para eks wanita tuna susila ini juga memakai *make-up* dan memakai parfum yang mencolok baunya supaya menambah menarik selera dan hasrat tamunya.

Beberapa subjek diantaranya (Ag, Sum, dan Im) memakai asesoris buatan berupa gelang, kalung yang terbuat dari karet atau plastik. Namun bagi mereka hal tersebut dilakukan hanya karena mengikuti tren anak muda sekarang saja supaya dianggap anak *gaul* kalo lagi kumpul nongkrong dengan teman-temannya. Lain halnya dengan subjek (In) yang membuat tato di salah satu bagian bawah tubuh belakangnya, ini terlihat oleh peneliti saat wawancara. Kebiasaan memakai pakaian yang minim di malam hari tidak berarti mereka tahan akan bahayanya cuaca malam serta tidak berdampak pada kondisi fisiknya. Sebagian besar responden juga merasakan badan yang tidak stabil, capek, lelah karena harus melayani tamu yang tidak sedikit juga karena pengaruh cuaca malam serta kebiasaanya merokok bahkan meminum-minuman keras atau minuman beralkohol yang dipersepsikan sebagai penghangat tubuh dan menambah kepercayaan dirinya yang tentunya juga berakibat bagi kesehatannya. Muka kusam dan banyak jerawat merupakan salahsatu akibat yang dikeluarkan sebagian subjek.

Psikologis

Berkaitan dengan perilaku atau persepsi psikologis para eks WTS sebelum memasuki panti rehabilitasi, beberapa perilaku yang ditampilkan, yakni:

(1) Menutup diri, sebagian besar subjek mengakui bahwa pekerjaannya sebagai wanita malam tidak diketahui orang tua atau karib kerabatnya di rumah, kecuali subjek Ng. Mereka tidak mau berbicara banyak dan berinteraksi dengan orang lain baik dengan keluarga apalagi dengan tetangga. Konsep diri negatif subjek mempengaruhi komunikasi. Cara subjek melihat, merasakan atau menilai dirinya secara langsung akan mempengaruhi cara orang tersebut bertindak terhadap orang lain. Dalam konteks komunikasi antar pribadi juga akan mempengaruhi dan menghambat komunikasi antar pribadi, artinya ketika berkomunikasi orang yang mempunyai konsep diri negatif cenderung menghindari interaksi dan menutup diri.

(2) Kebiasaan Berbohong, semua subjek termasuk dalam kategori ini. Umumnya kebiasaan berbohong mereka lakukan kepada keluarga terdekat yaitu orang tua, bibi atau mertua mereka dengan mengatakan bahwa mereka bekerja shift malam, disamping itu ketidaktahuan orang tua karena tempat tinggal yang jauh dimana para Eks PSK ini rata-rata kos di Jakarta sementara orangtuanya di kampung. Pada saat mereka tertangkap razia mereka bersikukuh mengatakan kepada orangtua atau saudaranya yang besuk karena terkena razia KTP.

(3) Meninggalkan Ibadah, hampir separoh responden mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi mengerjakan ritual agama, berupa ibadah shalat, puasa dan lain-lain. Bahkan subjek WT mengatakan bahwa dirinya ketika di kampung biasa shalat, ngaji dan puasa karena dulunya ia juga merupakan lulusan *Ibtidaiyah* dan *Tsanawiyah* semasa di cilacap.

(4) Merasa minder, pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial membuat para WTS ini menutup diri dan secara psikologis membuat rasa minder. Mereka menganggap diri mereka tidak berharga dalam masyarakat apalagi ketika lingkungannya mulai sedikit-sedikit mulai membicarakannya perihal kebiasaannya yang pergi

petang dan pulang pagi, namun hal tersebut tidak mereka hiraukan karena mereka tidak merasa mengganggu lingkungan.

Sosial

(1). Jarang pulang ke rumah, mayoritas responden mengatakan bahwa mereka jarang pulang ke rumah bahkan mantan PSK yang orang tuanya tinggal di Jakarta saja memilih untuk tinggal di kost saja. Seperti misalnya subjek In yang tinggal di daerah Cakung lebih memilih kos di daerah kemayoran yang memang lebih dekat dengan tempat mangkalnya.

(2) Menghindari kontak sosial, ada 10 orang responden yang masuk dalam kategori ini, mereka menghindari interaksi dan hubungan sosial dengan lingkungan. Apabila di lingkungan kos dikala orang lain pergi untuk bekerja atau kuliah maka ia baru sampai ke kos-an dan dipakai untuk tidur untuk mempersiapkan kondisi badannya ketika menjelang sore ia sudah mulai berangkat, sehingga jarang ada kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini sengaja dilakukan karena ia tidak berharap pekerjaannya tidak diketahui orang banyak. Budaya Jakarta yang individualistik, tidak peduli dengan urusan orang dan tidak acuh amat mendukung profesinya sebagai wanita penjaja seks ini.

(3) Melanggar Norma dan Etika Masyarakat, perilaku anti sosial berupa pelanggaran terhadap norma agama dan etika sosial masyarakat baik perilaku asusila berupa pergaulan bebas atau seks bebas.

Gambaran Diri eks Wanita Tuna Susila Selama Menjalani Rehabilitasi

Hasil temuan di lapangan setelah melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan semua subjek penelitian di dalam panti rehabilitasi, peneliti memperoleh hasil analisis yang dibuat dalam kategori berdasarkan kecenderungan sikap, pandangan, persepsi dan orientasi dari subjek penelitian selama mengikuti program pembinaan di dalam panti. Pendapat, sikap, pandangan, motif dan ungkapan-ungkapan sadar yang mereka ungkapkan saat wawancara mendalam tersebut di atas merupakan landasan peneliti dalam memberikan kategorisasi atas

konsep diri dan perubahannya yang mereka miliki sesat setelah memasuki dan menjalani kegiatan di panti rehabilitasi. Adapun pembahasannya akan diuraikan berikut ini.

Konsep Diri Positif

Dari hasil wawancara, subjek (Ld, Ml, Ms, Fs, Tt dan Wt) cenderung merasakan kebahagiaan selama mengikuti proses rehabilitasi yang diselenggarakan oleh panti. Namun demikian ia tetap merasa tidak betah tinggal di panti. Lima orang subjek penelitian dalam kategori ini, merasa merasakan adanya keberhasilan dalam dirinya yaitu subjek telah mampu belajar mengaji dan keterampilan yang diikutinya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek yang mengatakan bahwa kesenangan selama mengikuti kegiatan rehabilitasi membuahkan sebuah perubahan dalam dirinya. Subjek dalam penelitian ini rata-rata mengaku memiliki kesiapan yang cukup kuat untuk melakukan penyesuaian sosial di masyarakat, hal ini ditandai dengan kemampuan yang dimiliki subjek terutama dalam bergaul dengan masyarakat. Beberapa subjek bahkan hampir separohnya juga masih diterima oleh keluarganya dan keluarganya pun dapat menutupi tentang kejelekan dirinya. Agar dapat diterima di lingkungan sekitarnya, subjek berusaha akan mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Dengan cara seperti itu subjek merasa siap untuk melakukan penyesuaian dengan anggota masyarakat lainnya. Kesadaran akan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki akan menumbuhkan seseorang mampu menyadari terhadap dirinya sendiri. Kesadaran akan kesalahan yang didukung dengan pemahaman terhadap diri sendiri merupakan salah satu keberhasilan seseorang dalam mencapai suatu perubahan dalam diri.

Konsep Diri Negatif

Ada lima orang subjek yang masuk kategori ini (Ag, Jl, In, Nr dan Sum). Hasil analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam peneliti dengan subjek, dalam kategori ini ditemukan bahwa subjek merasakan kurang adanya perubahan dalam dirinya selama mengikuti kegiatan rehabilitasi di panti. Artinya semua kegiatan yang ada di panti subjek terbiasa untuk

melakukannya di rumah kecuali pekerjaan yang memang kegiatan tersebut di rumah tidak ada. Misalnya kegiatan keterampilan meski subjek pernah melakukan penyusunan hantaran di rumahnya. Dalam hal tertentu subjek merasa dari hasil rehabilitasi tersebut tidak membawa sebuah perubahan pada dirinya, dikarenakan kegiatan tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seorang wanita.

Selama di panti hampir semua responden baik secara samar atau jelas mengatakan bahwa mereka merasakan kebosanan dan kesumpekan dikarenakan subjek merasa terkungkung dalam panti seperti halnya di penjara. Kurang adanya aneka ragam dan rutinitas kegiatan yang kurang menarik dan cenderung hanya sebagai rutinitas belaka, bagi subjek membuat dia merasa tersiksa dengan program rehabilitasi tersebut. Namun meskipun demikian apabila suasana hatinya sedang dalam keadaan yang nyaman dan aman, subjek dapat merasakan kesenangannya. Rasa ketidakbebasan dan jauh dari keluarga dan anak yang dimiliki subjek selama di panti membuat jenuh dan terkadang mengalami konflik batin (*stress*) meskipun subjek memiliki banyak teman. Selama di panti subjek cukup *fair* dan proaktif dalam mengikuti kegiatan pelayanan rehabilitasi. Artinya sikap pro aktifnya tersebut ia perlihatkan dengan sikap suka menolong terhadap sesama teman penghuni panti, mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun ketika ditanya tentang rencananya setelah mengikuti rehabilitasi ini mereka mengatakan bahwa akan terjun lagi menjadi seorang PSK. Indikasi tersebut di atas peneliti kategorisasikan ke dalam konsep diri (KD Negatif). Untuk menutupi identitas sebenarnya di depan petugas dan pembimbing, subjek berusaha untuk mentaati aturan yang ada di panti atau melakukan pengelolaan kesan (*impression management*). Selain itu, mengikuti kegiatan rehabilitasi dengan sungguh-sungguh.

Kesiapan Penyesuaian Sosial

Stigma masyarakat yang negatif terhadap wanita mantan pelacur, akan menghambat terhadap kebutuhan bersosialisasi dengan orang lain karena mereka merasa terkucilkan di tengah

kehidupan masyarakat. Keadaan tersebut diperparah dengan rasa rendah diri yang mereka miliki akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di masyarakat, di mana rasa rendah diri tersebut mencakup segala rasa kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan secara psikologis maupun secara sosial.

Hasil penelitian mengenai penyesuaian sosial mantan pelacur yang di tampung di Panti Sosial Bina Karya Wanita "Harapan Mulya" Kedoya secara umum lebih siap untuk melakukan penyesuaian sosial di masyarakat. Hal demikian menunjukkan bahwa dengan proses rehabilitasi akan membantu para mantan pelacur dalam bersosialisasi di masyarakat yang dibekali dengan pengembalian rasa harga diri dan percaya diri yang merupakan tujuan dari pelayanan rehabilitasi. Selain itu, mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan panti yang didukung dengan keterampilan yang dimilikinya, serta sikap mereka yang saling menolong antar sesama penghuni panti. Namun, disamping itu ada beberapa dari mereka yang sulit dan belum siap untuk melakukan penyesuaian sosial di masyarakat dikarenakan sikap mereka yang *introvert* dan tidak adanya penerimaan dari keluarga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa terjadinya penyesuaian sosial itu berada dalam lingkungan hubungan sosial tempat individu bertempat tinggal. Individu dikatakan mampu melakukan penyesuaian sosial apabila individu tersebut berhasil dalam menyesuaikan diri dengan orang lain pada umumnya dan dengan kelompok pada khususnya, dimana individu tersebut mengidentifikasi dirinya. Begitu pula dengan mantan pelacur, disebut *well adjusted* apabila ia memiliki keterampilan sosial dan kemampuan berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman atau orang yang tidak dikenalnya. Karena itu sikap sosialnya berkembang dan ia tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Ia bersedia mangulurkan bantuan kepada orang lain meskipun—sesungguhnya mungkin—secara pribadi perbuatannya tersebut tidak mendatangkan kesenangan atau keuntungan bagi dirinya. (Kartono, 2002:58)

Untuk mencapai penyesuaian sosial yang baik mereka berusaha mempersiapkan diri dengan

cara meningkatkan kepercayaan diri melalui kemampuan dalam bersosialisasi, memiliki keahlian atau keterampilan untuk menunjang kehidupannya, dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri di masyarakat. Di samping itu mereka dalam mempersiapkan dirinya selama di panti lebih kepada menjalin hubungan sosial dengan teman sebayanya maupun dengan orang lain. Oleh karena itu sebagai wujud dari penyesuaian sosial tersebut yaitu individu mampu mengaktualisasikan dirinya, mematuhi aturan kelompok masyarakat, menyenangkan orang lain, suka menolong orang lain, serta ikut andil dalam aktivitas kelompok masyarakat. Hampir semua responden dapat merasakan kesiapan untuk melakukan penyesuaian sosial di lingkungan sekitarnya, yang didukung dengan kepercayaan dirinya yang tinggi. Hal tersebut akan memudahkan mereka untuk diterima di masyarakat, meskipun mereka menyatakan suatu saat tidak tertutup kemungkinan akan kembali menjadi pelacur.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diketahui bahwa mantan pelacur yang memiliki kepercayaan diri, keterampilan atau keahlian tertentu dan memiliki kemampuan bersosialisasi dengan orang lain yang ditunjang dengan kondisi fisik yang sehat dan kebersihan diri serta memiliki kerapuhan dalam berpenampilan yang baik akan lebih siap dan lebih mudah untuk melakukan penyesuaian sosial di masyarakat. Meskipun hal demikian, mereka (mantan pelacur) oleh sebagian masyarakat dianggap orang yang memiliki cacat secara sosial, tetapi mereka memiliki kecenderungan untuk mampu berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka tinggal.

Hal yang mereka lakukan selama di panti dalam mempersiapkan diri melakukan penyesuaian sosial di masyarakat. Diantara usaha-usaha tersebut mereka selalu menjaga hubungan baik dengan sesama teman dan petugas panti, meningkatkan kepercayaan diri dengan cara menekuni keterampilan, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, saling menolong diantara sesama mantan pelacur. Selain itu, kemajuan dan keberhasilan yang dicapai selama mengikuti kegiatan pelayanan rehabilitasi (psikoterapi) di panti membuat mereka lebih siap dalam melakukan penyesuaian sosial di masyarakat.

Kemampuan individu dalam melakukan persiapan penyesuaian sosial sangat dipengaruhi oleh individu itu sendiri dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Gerungan (2004:60), menyesuaikan diri dalam arti kata yang luas yaitu mengubah diri sesuai dengan lingkungan atau yang biasa disebut penyesuaian diri yang autoplastis dan mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dan keinginan diri atau yang biasa disebut dengan penyesuaian diri secara aloplastis.

Menurut subjek, setelah mengikuti kegiatan rehabilitasi di panti ia memiliki kesiapan yang cukup kuat untuk melakukan penyesuaian sosial di masyarakat. Subjek merasa bahwa dirinya sudah terbiasa hidup dengan orang banyak di mana menurut subjek meski ia menjadi pelacur, tetap juga penyesuaian sosial itu merupakan hal yang penting supaya diterima oleh masyarakat. Keterbiasaan dalam melakukan interaksi dengan orang lain memudahkan bagi subjek untuk melakukan penyesuaian. Apalagi yang didukung dengan pengalamannya pada waktu menjadi wanita panggilan yang menuntutnya untuk mahir dalam melakukan penyesuaian pada situasi apapun.

Subjek akan berusaha memperbaiki diri melalui pengembangan diri yang dimilikinya supaya dapat hidup di masyarakat dengan baik. Untuk itu persiapan-persiapan untuk penyesuaian tersebut sangat penting, agar tidak menjadi minder. Subjek merasa akan lebih siap menyesuaikan diri di masyarakat sekitar karena keberadaan subjek diketahui oleh tetangganya sebagai karyawati sebuah perusahaan di Bandung. Sehingga dengan begitu subjek tidak mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan mereka. Kepercayaan diri subjek atas ketidaktahuan masyarakat tentang dirinya yang menjadi pelacur, akan membuat subjek lebih gampang bersosialisasi. Deindividuasinya tersebut mengakibatkan subjek diterima di masyarakat. Penerimaan diri dari keluarga akan mempermudah subjek untuk beradaptasi di masyarakat. Dari hasil temuan diperoleh kategori eks WTS yang mempunyai kesiapan penyesuaian dalam beradaptasi sosial, siap bersyarat, dan tidak siap. Dalam kategori SIAP menunjukkan bahwa para eks WTS akan bertekad dan siap memasuki lingkungan sosial

yang baru di masyarakat kelak dengan tidak akan melakukan kembali aktivitasnya sebagai wanita malam. Pada kategori ini hampir semuanya ditemukan pada subjek atau responden yang memiliki konsep diri yang positif. Hal ini dapat ditemukan pada diri subjek (Ld, Ml, Ms, Fs, Tt dan Wt). Walaupun demikian pada prinsipnya semua eks wanita tuna susila akan siap beradaptasi secara sosial di masyarakat karena pekerjaannya selama ini tidak diketahui oleh orang lain. Dalam pembahasan ini mereka yang masuk dalam kategori **SIAP** adalah para eks wanita tuna susila yang mempunyai tekad yang kuat untuk meninggalkan kebiasaannya berprostitusi sebagai WTS pasca rehabilitasi. Adapun kategori eks WTS yang termasuk dalam SIAP BERSYARAT merupakan eks wanita tuna susila yang masih memiliki keraguan dalam memasuki lingkungan sosial yang baru apabila dengan tidak terjun kembali sebagai WTS sementara kendala dan kebutuhan kehidupan akan ia hadapi manakala profesinya sebagai pelacur benar-benar ia tinggalkan. Pada kategori ini para eks WTS akan meninggalkan profesinya manakala ada pekerjaan yang layak dan kebutuhan hidup diri keluarganya dapat terpenuhi. Eks WTS yang merasa tidak siap beralih profesi sebagai pelacur dan juga **Tidak Siap Beradaptasi Sosial** di masyarakat lebih dominan ditemukan pada mereka yang mempunyai konsep diri negatif. Kategori ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan kapok menjadi seorang pelacur karena merupakan profesi yang selain menyenangkan juga memperoleh uang yang banyak, terutama bagi para eks WTS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang amat rendah atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab terdahulu, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa gambaran diri subjek dalam melakukan hubungan antarpribadi dilakukan dengan membagi wilayah dirinya dengan tampilan diri untuk orang lain dan tampilan diri yang ditunjukkan untuk dirinya pribadi. Hasil temuan menunjukkan bahwa hampir seluruh subjek menutup wilayah sisi gelap diri dari orang-

orang yang tidak mengetahui bahwa dirinya sebagai pelacur dengan cara melakukan *impression management* / pengelolaan kesan. Demikian halnya ketika seorang eks WTS yang terkena razia dan sedang mengikuti rehabilitasi di dalam panti melakukan pengelolaan kesan saat berkomunikasi dengan keluarganya atau dengan pihak luar dengan tidak mengakui bahwa dirinya sebagai pelacur. Tampilan yang berbeda ini ditunjukkan saat subjek penelitian mengikuti kegiatan rehabilitasi dan saat subjek berada di dalam wisma atau saat istirahat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa terjadinya penyesuaian sosial itu berada dalam lingkungan hubungan sosial tempat individu bertempat tinggal. Individu dikatakan mampu melakukan penyesuaian sosial apabila individu tersebut berhasil dalam menyesuaikan diri dengan orang lain pada umumnya dan dengan kelompok pada khususnya, di mana individu tersebut mengidentifikasi dirinya. Begitu pula dengan mantan pelacur, disebut *well adjusted* apabila ia memiliki keterampilan sosial dan kemampuan berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman atau orang yang tidak dikenalnya.

Dari hasil temuan diperoleh kategori eks WTS yang mempunyai kesiapan penyesuaian dalam beradaptasi sosial, siap bersyarat, dan tidak siap. Dalam kategori **SIAP** menunjukkan bahwa para eks WTS akan bertekad dan siap memasuki lingkungan sosial yang baru di masyarakat kelak dengan tidak akan melakukan kembali aktivitasnya sebagai wanita malam. Adapun kategori eks WTS yang termasuk dalam **SIAP BERSYARAT** merupakan eks wanita tuna susila yang masih memiliki keraguan dalam memasuki lingkungan sosial yang baru apabila dengan tidak terjun kembali sebagai WTS sementara kendala dan kebutuhan kehidupan akan ia hadapi manakala profesinya sebagai pelacur benar-benar ia tinggalkan. Eks WTS yang merasa tidak siap beralih profesi sebagai pelacur dan juga **Tidak Siap Beradaptasi Sosial** di masyarakat lebih dominan ditemukan pada mereka yang mempunyai konsep diri negatif. Kategori ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan kapok menjadi seorang pe;acur karena merupakan profesi yang selain menyenangkan juga memperoleh uang yang banyak, terutama bagi para

eks WTS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang amat rendah atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali.

Daftar Pustaka

- Adler, Ronald B. Towne, Neil, 1987, *Looking out Looking in Interpersonal Communication*, Hilt Rinchart and Wiston. New York.
- Creswell, John W., 1998, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*, California: Sage Publication.
- DeVito, Joseph, 1997, *Komunikasi Antar Manusia*, ed.V.terj. Ir.Agus Maulana, Professional Books.
- Goffman, Erving, 1959, *The Presentation of Self in Everyday Live*, Reat Britain: Cox & Wyman Ltd
- Gerungan, W.A., 2004, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kartono, Kartini, 2002, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung. Mandar Maju.
- Kuntjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta : Tinta.
- Kuswarno, Engkus, 2004, *Konstruksi Sosial dan manajemen komunikasi Pengemis Kota Bandung*, Disertasi, Unpad.
- Lindlof, Thomas R., 1995, *Qualitative Communication Research Methods*, California USA: Sage Publication.
- Littlejohn, Stephen W., 2002, *Theories of Human Communications, sixth Edition*, New Mexico: Wodsworth Publishing Company.
- Liliweri, Alo. "Komunikasi Antarpribadi" , Bandung,Citra Aditya Bakti.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. Yogyakarta: Rakai Sarasin.
- Mulyana, Deddy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Rosda Karya.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2005, *Psikologi Komunikasi*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rahman, Nurlina, 2004, *Konsep Diri Pemakai*

Narkoba dalam Konteks Komunikasi Antar Pribadi, Tesis, Unpad.
Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.
Sobur, Alex, 2003, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia.

PENGARUH MEDIA MASSA DAN PENGETAHUAN TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TINGKAT MODERNITAS GENERASI MUDA KOTA YOGYAKARTA

C. Teguh Dalyono
FKIP Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jl. Affandi Gejayan Mrican
HP : 081578768181 / e-mail : constegs@yahoo.com

Abstract

The aim of this study is to investigate the extent of utilization of information technology (IT) and the level of modernity of the young generation as well as the contribution of socioeconomic status, knowledge of IT, and media consumption on the level of IT utilization and the level of modernity of the urban youth. Data were collected through a set of questionnaires and tests. The subjects of this research were 400 students from seven universities in Yogyakarta, both public and private universities. The data obtained were analyzed by Chi-square test, Kruskal-Wallis, Pearson Product Moment Correlation for descriptive analysis, and multiple regressions for hypothesis testing. The study reveals that the majority of the participants (65.3%) use IT just for their personal needs, especially for communication and entertainment, which are lifestyle oriented. In addition, in terms of modernity level, most of the subjects (71.5%) are at the adaptive modern level, reflected in the fact that they always follow the current changes in lifestyle, have moderate critical attitudes, but show fair tolerance. The results indicate that mass media consumption appears to give the highest contribution significantly to both the use of IT and the level of modernity; family socioeconomic status is found to considerably contribute to the utilization of IT, but not to the level of modernity; and IT knowledge has little contribution toward the use of IT and the level of modernity.

Key words : *the use of IT, level of modernity, socioeconomic status, knowledge of IT, mass media*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia bersama negara-negara lain yang sedang berkembang, bergerak dengan sebuah dorongan untuk menjadi modern. Modern tidak semata-mata menunjuk pada periode, epos atau zaman, melainkan, dan ini yang lebih penting, juga suatu bentuk kesadaran akan kebaruan (*newness*). Pemahaman modernitas sebagai kesadaran bersifat epistemologis dalam arti perubahan bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir, dan bukan perubahan institusional sebuah masyarakat.

Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan oleh tiga hal yakni: subjektivitas atau kesadaran, kritik, dan kemajuan (Hardiman, 2004: 3). Pertama, orang modern itu mengutamakan kesadaran diri sebagai subjek, dalam arti orang modern memperhatikan soal hak, hak azasi, fungsi ilmu pengetahuan, otonomi pribadi, dan demokrasi. Kedua, orang modern itu kritis, dalam arti orang modern cenderung mengeliminasi prasangka-prasangka dari tradisi, memiliki gairah untuk mengkaji penghayatan, dan mempersoalkan dimensi otoritas yang *taken for granted*. Ketiga,

orang modern itu progresif, dalam arti mengadakan perubahan-perubahan yang secara kualitatif baru. Ketiga premis ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena ketiganya berkorelasi secara inheren.

Akan tetapi modernitas tidak hanya sekedar rasionalitas, kritis, dan progresif. Dalam masyarakat dewasa ini terdapat perubahan struktur yang lebih mengedepankan gaya hidup yang dikuasai oleh *image* atau citra. Benjamin R. Barber (2003: 115-116), dalam bukunya *Jihad vs McWorld* mengambil Indonesia sebagai contoh sebuah negeri yang ditaklukkan secara damai oleh budaya global (*global culture*), yang secara olok-olok disebut Barber sebagai *McWorld*. Artinya kurang lebih adalah dunia yang sudah dikuasai oleh *image* atau citra. Hal yang semu dianggap nyata dan yang nyata dianggap semu. Artinya, Nike tidak menjual sepatu seperti McDonalds juga tidak menjual hamburger. Nike dan McDonalds menjual gaya hidup.

Sisi lain dari modernitas adalah kemajuan teknologi informasi (TI) dan pemanfaatannya seperti yang nampak dalam kenyataan sekarang ini. TI, langsung atau tidak langsung, telah melahirkan optimisme di masa depan dan semakin memajukan masyarakat serta mengubah berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dengan memberikan berbagai kemudahan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Kalau sebelumnya orang bersosialisasi dengan berkumpul bersama-sama teman di suatu tempat atau berkenalan dengan orang baru di sebuah acara, maka dengan TI khususnya internet, sekarang orang dapat bersosialisasi tanpa terikat dengan dimensi waktu dan tempat.

Sebuah penelitian tentang profil dan cara berpikir muda masa kini pernah dilakukan oleh Ogilvy Public Relations Worldwide Jakarta, pada bulan Maret sampai Juli 2006 (Tempo, 22 Oktober 2006). Dengan mengambil sampel 385 pasang anak muda usia 15 - 24 tahun, hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana kaum muda sekarang memanfaatkan TI dan merepresentasikan kehidupan modern. Di antaranya, 83,3% responden memiliki telpon genggam dan 68,8% memiliki dan menggunakan komputer. Erat kaitannya dengan kepemilikan komputer, sebesar 40,7% responden memanfaatkannya untuk akses

e-mail, dan 25,4% memanfaatkannya kepentingan akses internet. Di samping itu 61% di antara responden mengatakan betapa mereka bisa membikin apa saja (kebutuhan mereka) seperti baju, aksesoris, sepatu, musik, majalah yang mereka suka, 82% kaum muda itu bisa menerima prestasi dalam bidang-bidang yang tidak lazim, dan 85% menyatakan tidak takut tampil beda.

Apa yang dipaparkan di atas adalah salah satu bentuk modernitas kaum muda dalam perspektif sosiokultural. Sedangkan modernitas kaum muda dalam perspektif sosioekonomi dapat ditilik dari kisah sukses beberapa mahasiswa Bandung yang menggeluti dunia kewirausahaan (Media Indonesia, 6 Maret 2007).

Para mahasiswa ini masuk dalam arus utama bisnis dengan nilai-nilai dan sikap mental yang dalam perspektif modernitas disebut *entrepreneurship* atau kewirausahaan. Sebuah konsep dan sikap mental modern kapitalistik yang kini dimasukkan dalam kurikulum di berbagai universitas di Indonesia hanya karena banyak lulusan perguruan tinggi menjadi penganggur.

Sarjana penganggur merupakan fenomena di kalangan generasi muda yang berseberangan dengan kenyataan-kenyataan empirik yang digambarkan sebelumnya. Tentang hal ini, Agus Suwignya (2003) menengarai bahwa tingginya sarjana penganggur merupakan salah satu indikator rendahnya mutu intelektualitas mahasiswa perguruan tinggi yang mencakup logika, daya kritis, kedalaman kemampuan analisis, dan disposisi sikap.

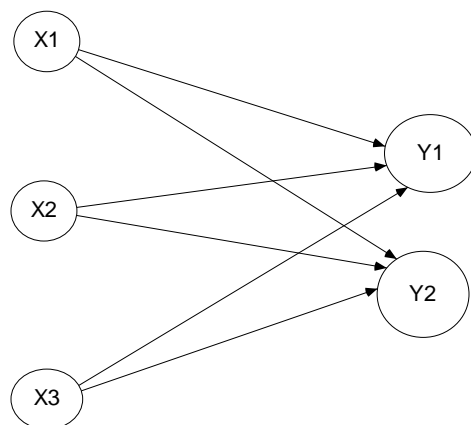
Inkonsistensi antara tindakan dan pengetahuan pada diri kaum muda khususnya mahasiswa juga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perilaku berlalu lintas. Tidak sedikit kaum muda yang naik atau turun dari kendaraan umum di tempat-tempat yang tidak semestinya, membuang sampah atau menggunakan ponsel ketika sedang mengendarai mobil di jalan, menerobos lampu merah, menikung tanpa menyalakan lampu *sign* dan sebagainya. Demikian juga perilaku tidak mau antri saat membeli tiket, asyik menggunakan ponsel dalam peristiwa dan suasana yang tidak tepat, misalnya dalam rapat atau di tempat ibadat.

Semua yang dipaparkan di atas memper-

lihatkan sebuah paradoks modernitas di kalangan generasi muda. Di satu pihak nampak adanya kreativitas, cara pikir progresif, rasa percaya diri, namun di lain pihak terdapat bentuk-bentuk kelatihan sosial, kekonyolan, gagap teknologi, atau satu bentuk ketidaksiapan mental-sosial generasi muda dalam menghadapi dan menghayati modernitas seperti yang tercermin dalam inkonsistensi antara tindakan dan pengetahuan pada diri kaum muda.

Berangkat dari gejala-gejala ini dapat dimunculkan permasalahan, sejauh mana tingkat modernitas generasi muda kota dan pemanfaatan teknologi informasi di kalangan generasi muda. Benarkah status sosial ekonomi keluarga, pengetahuan tentang teknologi informasi, dan media massa, berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan tingkat modernitas generasi muda?

Secara visual, keterkaitan antar variabel di atas dapat digambarkan dalam model sebagai berikut



Keterangan :

X1 = Status sosial ekonomi keluarga

X2 = Pengetahuan tentang TI

X3 = Konsumsi media massa

Y1 = Pemanfaatan TI

Y2 = Tingkat modernitas

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel bebas (*independent variables*) dan variabel terikat (*dependent variabel*) pada model di atas, adalah sebagai berikut : (a). Variabel bebas, (1). Pengetahuan tentang TI, Pengetahuan tentang TI adalah berbagai fitur dalam piranti (*gadget*) TI terutama pada ponsel, komputer,

dan internet sejauh yang diketahui oleh responden. Indikatornya adalah seberapa banyak kaum muda mengetahui seluk beluk piranti TI yang digunakan.

Status sosial, (2). Konsumsi media massa, Media massa dalam penelitian ini dibatasi pada surat kabar, tabloid, majalah, radio, dan internet. Maka konsumsi media massa merupakan kegiatan responden membaca, mendengarkan, atau menonton jenis-jenis media massa yang sudah disebutkan di atas. Indikatornya adalah frekuensi konsumsi surat kabar, majalah, tabloid, radio, dan televisi, serta isi informasi media massa yang dikonsumsi, (3). Status Sosial Ekonomi Keluarga, Status sosial ekonomi keluarga/orang tua responden adalah posisi sosial ekonomi relatif sebuah keluarga atau individu berdasarkan penghasilan (atau pengeluaran), tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dalam penelitian ini, tiga faktor tersebut menjadi indikator standar ditambah dengan faktor kepemilikan tempat tinggal sebagai salah satu parameter kesejahteraan keluarga.

(b). Variabel Tergantung, (1). Pemanfaatan TI, Pemanfaatan TI adalah aktivitas penggunaan berbagai fitur yang ada pada piranti TI yang terdiri atas telepon seluler, komputer, dan internet untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Adapun yang diukur adalah seberapa optimal pemanfaatan fitur-fitur yang ada pada *gadget* tersebut. Indikatornya adalah jenis kegiatan yang dilakukan, frekuensi penggunaan, lamanya waktu penggunaan tiap-tiap jenis TI, (2). Modernitas individual, Modernitas individual kaum muda adalah budaya atau nilai-nilai, pandangan, sikap, dan perilaku kaum muda dalam bingkai struktur masyarakat modern sejauh tercermin dalam gaya hidup, sikap atau daya kritis, dan eksplisitasi prinsip-prinsip multikulturalitas dalam kehidupan sehari-hari.

Gaya hidup adalah cara (*moda*) dan pilihan hidup yang mengikuti atau tidak mengikuti simbol-simbol budaya modern dalam hal berkomunikasi, berpakaian, makanan dan minuman, kebiasaan belanja, dan pilihan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan sikap kritis adalah kemampuan berpikir yang melihat sistem dan struktur sebagai sumber masalah atau cara berpikir yang menekankan pada fenomena dimensi historis, rasional, dan normatif. Sementara yang dimaksud eksplisitasi prinsip-prinsip multikulturalitas adalah

sikap dan perilaku nyata interaksi sosial generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari yang menjunjung tinggi keragaman etnik, agama, budaya (kultur), dan subkultur.

Tinjauan Teoretik

Kalau dalam perspektif filosofis modernitas dipahami sebagai sebuah kesadaran akan subjek, kritis, dan progresif, maka dalam perspektif sosiologis, modernitas diasosiasikan dengan akumulasi peradaban Barat seperti industrialisasi, urbanisasi, negara-bangsa, demokrasi, humanisme, egalitarianisme, toleransi, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Isu-isu ini secara lebih khusus digambarkan dalam pemikiran para teoretisi sosial utama abad ke-19 seperti Karl Marx, Max Weber, Alexis de Tocqueville, Georg Simmel, dan Emile Durkheim, dan sebagainya. Isu-isu di ataslah yang sering menjadi sasaran kritik dari kaum postmodernis.

Pembicaraan tentang modernitas tidak dapat dilepaskan dari nama Anthony Giddens, sosiolog kontemporer yang menonjol pada abad ini. Giddens menggunakan istilah modernitas “tinggi” atau “radikal”, *runaway world*, dunia yang berlari atau dunia yang tunggang langgang untuk melukiskan masyarakat dewasa ini (Giddens, 1990 : 138). Konsep ini dimaksudkan Giddens untuk menentang pendapat para pemikir sosial budaya yang menyatakan masyarakat telah memasuki era postmodern.

Senada dengan Giddens, Habermas (1987 : 116) menyatakan bahwa modernitas merupakan proyek yang belum selesai dalam arti masih banyak yang harus dikerjakan dalam kehidupan modern. Ini berarti bahwa masalah sentral dalam dunia modern masih tetap berpusat pada rasionalitas seperti pada masa Weber.

Sosiolog George Ritzer pun melihat modernitas sebagai peningkatan rasionalitas. Ritzer melukiskan peningkatan rasionalitas formal ini dengan istilah McDonaldisasi masyarakat (Ritzer, 2003 : 197), yakni suatu proses dimana prinsip-prinsip restoran cepat saji seperti efisiensi, keterprediksian, terkuantifikasi, dan kontrol, telah mendominasi berbagai sektor dalam masyarakat.

Jikalau Ritzer menggunakan istilah

McDonaldisasi masyarakat, Jean Baudrillard (1998 : 32-33) melukiskan masyarakat dewasa ini dengan istilah “masyarakat konsumen”. Menurut Baudrillard, ketika seseorang mengkonsumsi objek, maka orang itu sedang mengkonsumsi tanda, dan pada waktu itu yang bersangkutan sedang mendefinisikan dirinya. Komoditas yang dikonsumsi tidak hanya sekedar objek atau materi, tetapi juga makna simbolik atau tanda alias makna-makna sosial yang tersembunyi di dalamnya.

Manifestasi masyarakat konsumen semacam ini adalah persoalan gaya hidup. Menurut David Cheney (2004: 40) gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern. Maksudnya, siapapun yang hidup dalam masyarakat modern, akan menggunakan gagasan gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Menurut Cheney gaya hidup merupakan gaya, tata cara menggunakan barang, tempat, dan waktu, yang khas kelompok masyarakat tertentu.

Gambaran pemikiran modernitas/postmodernitas seperti di atas telah dan sedang merasuk ke tengah-tengah masyarakat terutama kaum muda kota di Indonesia lewat gemerlap iklan, program-program televisi seperti berbagai macam kuis berhadiah jutaan rupiah, berbagai macam acara kontes, dan tawaran gaya hidup “wah” lewat media massa.

Istilah media massa biasanya merujuk pada penyebaran informasi melalui buku, surat kabar, majalah, film, radio, program-program televisi, CD, DVD, dan sebagainya. Straubhaar dan LaRose (2002 : 15) menekankan pada saluran (*channel*) yang digunakan yakni cetak seperti buku, majalah, tabloid, surat kabar, dan elektronik seperti radio, televisi, dan film yang sering disebut sebagai “*old media*”.

Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Joseph Turow (2009 : 17) yang menyatakan bahwa media massa adalah instrumen teknologi dari komunikasi massa yakni “*the industrialized production and multiple distribution of messages through technological devices*”. Konvergensi antara media massa, komputer, dan telekomunikasi berujung pada internet yakni “*a network of networks that connects computers worldwide...*” yang akhirnya melahirkan sebuah masyarakat informasi.

Media massa mengarahkan sikap, perilaku dan kebiasaan hidup kaum muda di tengah kehidupan modern dewasa ini sekaligus menjadi salah satu sumber pengetahuan atau sebagai panduan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas TI. Menurut Solvay Gerke (2000: 148) para jurnalis telah berperan “... *as stylists and missionaries of modernity as well as trend-setters or a new way of life. They were the providers of symbolic goods of modernity*” . Namun , sudah barang tentu kemampuan generasi muda untuk menangkap gambaran atau pesan-pesan modernitas dan pemanfaatan TI berbeda-beda, sesuai dengan derajad atau status sosial ekonomi orangtuanya dan tingkat pengetahuannya tentang TI.

Bagaimana media mempengaruhi masyarakat? Ada beberapa teori efek media yang menjawab pertanyaan ini antara lain, teori kultivasi, teori *agenda setting*, dan teori proses belajar sosial atau *social learning process*. (Straubharr and LaRose, 2002: 36-37; Turow, 2009 : 159 ; Pritchard dan Woollard, 2010: 16).

Brynin dan Kraut (2006: 6-8) mengkonstruksi empat pendekatan tentang manfaat TI. Keempat pendekatan tersebut adalah pertama, TI sebagai alat, kedua, TI sebagai teknologi yang menggeser tujuan, ketiga, yang menghasilkan kesejahteraan pribadi, dan keempat, yang berdampak sosial. Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Allison Cavanagh (2007 : 102-138), yang melihat internet khususnya, sebagai sebuah jaringan (*network*), media komunikasi, ruang sosial (*social space*), dan sebagai teknologi.

Atas dasar pengalaman empirik dan tinjauan teoretik di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut; Status sosial ekonomi, pengetahuan tentang TI, dan konsumsi media massa, secara parsial (*zero order*) maupun bersama-sama, berpengaruh secara signifikan terhadap pemanfaatan TI dan tingkat modernitas generasi muda kota.

Metode Penelitian

Penelitian ini dibangun dan dilaksanakan di atas dasar pijakan epistemologis postpositivisme yang kuantitatif, deterministik-reduksionistik, berdasarkan pengukuran dan pengamatan empirik

(Creswel, 2003: 6).

Tiga variabel bebas yakni status sosial ekonomi, pengetahuan tentang TI, dan konsumsi media massa ditetapkan secara subjektif sebagai hasil pembacaan terhadap teori dan hasil-hasil penelitian empiris. Demikian juga dalam menetapkan variabel terikatnya yakni pemanfaatan TI dan tingkat modernitas generasi muda. Indikator pemanfaatan TI adalah frekuensi penggunaan komputer, internet, dan ponsel. Sedangkan indikator tingkat modernitas terdiri atas gaya hidup, daya kritis, dan eksplisitasi prinsip-prinsip pluralitas/multikulturalitas.

Yogyakarta ditetapkan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan keunikannya. Di Yogyakarta segala sesuatu yang bertentangan (paradoksal) dapat hidup berdampingan secara damai justru karena suasana budaya Jawa, baik yang “kasat mata” maupun “tidak kasat mata” , masih tetap hidup dan dihidupi oleh warganya.

Jumlah sampel sebesar 400 responden yang terdiri atas mahasiswa UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas Duta Wacana. Pengambilan sampel menggunakan teknik *cluster sampling* dengan cara bertingkat (*multi stage sampling*).

Data tentang status sosial ekonomi orang tua responden dan konsumsi media massa dipetik dengan rujukan kuesioner atau angket yang dikembangkan oleh Pusat Litbang Harian “KOMPAS” dan “Koran Tempo” , dengan modifikasi seperlunya. Sedangkan data mengenai pengetahuan tentang TI dikumpulkan melalui seperangkat tes yang dikembangkan oleh peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistika deskriptif, korelasi *Pearson Product Moment*, dan regresi berganda. Untuk mendapatkan estimator garis regresi yang memiliki sifat BLUE (*best linier unbiased estimation*) diuji pula asumsi-asumsi klasik analisis regresi yakni, *non multi-collinierity*, *non autocorrelation*, dan *non heteroscedasticity*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagian besar responden (69,5%) memanfaatkan TI cukup optimal, dalam arti

pemanfaatan TI lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan personal terutama komunikasi dan hiburan, tidak menunjang produktivitas, dan lebih berorientasi ke gaya hidup. Di urutan kedua terbanyak adalah responden yang memanfaatkan secara optimal (16,5%), dan urutan terakhir adalah responden yang kurang optimal atau rendah yakni 14%.

Sedangkan pada tingkat modernitas, 71,5% responden termasuk dalam kategori modern adaptif. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah generasi muda yang bergaya hidup mengikuti perkembangan zaman dengan daya kritis sedang atau pas-pasan, namun sikap dan perilaku mereka cukup toleran terhadap keragaman dalam masyarakat.

Hasil uji hipotesis secara *zero order* menunjukkan bahwa status sosial ekonomi, pengetahuan tentang TI, dan konsumsi media massa berpengaruh pada pemanfaatan TI (Y1) seperti nampak dalam tabel 1 di bawah. Pada tabel tersebut nampak pengaruh paling besar adalah variabel konsumsi media yakni 42,10% (Angka 42,09% didapatkan dari besarnya koefisien regresi 0,413 dibagi dengan jumlah total koefisien regresi variabel independen sebesar 0,981 dikalikan 100%. Ringkasnya $0,413/0,981 \times 100\%$), disusul variabel status sosial ekonomi sebesar 33,95%, dan terakhir variabel pengetahuan tentang TI sebesar 23,95%.

Berdasarkan Uji t, semua variabel

Tabel 1. Koefisien Regresi Variabel X1, X2, X3 terhadap Y1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.922	3.377		2.642	.009
	SSE	2.713	.339	.333	8.005	.000
	PTI	2.069	.295	.235	7.007	.000
	MASME	3.920	.381	.413	10.288	.000

a. Dependent Variable: MANTI

memberikan pengaruh secara signifikan pada level α 5% atau 0,05. Secara simultan status sosial ekonomi, pengetahuan tentang TI, dan konsumsi media massa memberi pengaruh sebesar 83,7%. Dengan Uji F terbukti bahwa besarnya pengaruh tersebut signifikan pada level α 5% atau 0,05. Hal ini nampak pada tabel 2. berikut ini.

Hasil uji berikutnya menunjukkan bahwa

Tabel 2. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.915 ^a	.838	.836	11.886

a. Predictors: (Constant), MASME, PTI, SSE

ketiga variabel independen di atas juga memberikan pengaruh pada tingkat modernitas individual responden (Y2). Besarnya pengaruh, berturut-turut adalah konsumsi media massa terhadap tingkat modernitas individual sama dengan 52,09%, pengetahuan tentang TI 29,11% sedangkan pengaruh variabel status sosial ekonomi 18,80%. Namun demikian uji signifikansi menunjukkan bahwa pengaruh status sosial ekonomi terhadap tingkat modernitas ternyata tidak signifikan. Sedangkan pengaruh variabel konsumsi media massa dan pengetahuan tentang TI signifikan pada level α 5% atau 0,05. Oleh karena itu dapat dipahami kalau pengaruh ketiga variabel di atas secara simultan tidak setinggi pengaruh terhadap pemanfaatan TI, yakni hanya sebesar 44,5%. Angka sebesar ini terbukti signifikan berdasarkan uji F. Tabel 3. dan tabel 4. berikut menggambarkan hal ini.

Mengacu pada pendekatan Brynin dan

Tabel 3. Koefisien Regresi Variabel X1, X2, X3 terhadap Y2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	113.452	2.970		38.199	.000
	SSE	.526	.298	.135	1.766	.078
	PTI	.879	.260	.209	3.385	.001
	MASME	1.697	.335	.374	5.064	.000

a. Dependent Variable: MOD

Tabel 4. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.450	.445	10.454

a. Predictors: (Constant), MASME, PTI, SSE

Kraut (2006: 6-8) tentang manfaat TI, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan TI oleh responden masih didominasi oleh pendekatan pertama yakni TI sebagai alat, terutama untuk menemukan informasi sebuah produk/iklan, berita, informasi tentang kesehatan, atau untuk menemukan informasi tentang film dan lagu-lagu. Pada

umumnya responden menggunakan *e-mail* untuk mengirimkan kabar, atau ucapan selamat ulang tahun, atau sekadar bergosip. Hal-hal tersebut merupakan hal yang biasa dan dapat dilakukan dengan teknologi yang sudah ada selain *e-mail*. Demikian juga penggunaan jejaring sosial seperti Facebook. Sementara itu aktivitas *blogging* ternyata hanya dilakukan oleh 16,3% responden.

Dalam penelitian ini pemanfaatan TI untuk kesejahteraan personal dan yang berdampak sosial tidak nampak secara jelas. Namun jika menilik kasus Prita Mulyasari dan kasus “Cicak vs Buaya” tentang perseteruan Polri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak berlebihan kalau internet disebut sebagai pilar demokrasi yang kelima setelah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan media.

Status Sosial Ekonomi

Kepemilikan ponsel terbukti berkorelasi positif secara signifikan dengan status sosial ekonomi pengguna dengan koefisien korelasi 0,517. Namun ketika derajat sosial ekonomi ini dikaitkan dengan penggunaan atau pemanfaatan TI, pengaruh atau kontribusinya boleh dikatakan kecil saja (23,95%).

Hal ini dapat dijelaskan dengan mengkaitkan antara perilaku konsumen khususnya kaum muda dan perilaku pengguna TI. Handi Irawan (2007), seorang narablog (*blogger*) dan konsultan riset marketing, dalam *blog*-nya menyebutkan sepuluh karakter konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli suatu produk. Sebagian besar konsumen Indonesia tak terkecuali generasi muda memiliki ciri suka berkumpul, berpikir jangka pendek dan mencari yang serba instan, tidak terencana karena itu mudah terbujuk iklan atau promosi setempat, gagap teknologi, suka merk luar negeri, dan gengsi untuk menaikkan status.

Kendati terdapat korelasi yang cukup kuat antara status sosial ekonomi dan ponsel yang dimiliki, namun keputusan untuk membeli ini ternyata tidak didasarkan pada fungsi produk yang sesuai kebutuhan melainkan mengkonsumsi tanda, demi mengekspresikan status sosial ekonomi tertentu atau sebagai gaya ekspresi kemewahan. Secara kuantitatif, informasi tentang TI lebih

banyak dijumpai di surat kabar dan tabloid daripada di televisi. Hampir semua surat kabar, baik tingkat nasional maupun lokal, dapat dipastikan memuat iklan dan ulasan tentang ponsel dan produk-produk elektronik lainnya. Nampaknya ulasan-ulasan tersebut tidak cukup untuk dijadikan pertimbangan mengambil keputusan untuk membeli

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh status sosial ekonomi terhadap tingkat modernitas ternyata tidak signifikan. Hal ini lebih jelas kalau dikaitkan dengan gaya hidup. Memang benar ada kaitan antara gaya hidup dengan uang karena gaya hidup bisa memakan biaya yang cukup besar, tetapi tidak selalu demikian. Sampai dengan tahun 1980-an memang ada perbedaan yang mencolok antara gaya hidup kaum kaya dan mereka yang hidup pas-pasan.

Saat ini perbedaan itu tidak sepenuhnya lenyap melainkan semakin kabur. Pengaburan ini terjadi secara timbal balik. Yang kaya semakin bergaya seakan-akan tidak kaya, sedangkan yang miskin mengkonsumsi dengan antusias produk-produk imitasi supaya seakan-akan tampak lebih kaya.

Seperti halnya gaya hidup, daya kritis dan ekspresi prinsip-prinsip multikulturalisme sebagai indikator tingkat modernitas pun sulit dikaitkan dengan status sosial ekonomi. Keduanya pertama-tama bukan perkara derajat sosial ekonomi, melainkan bagaimana sebuah keluarga atau masyarakat menghayati nilai-nilai multikulturalisme dan bagaimana tanggapan mereka terhadap sikap kritis maupun terhadap gejala multikulturalisme.

Pengetahuan tentang TI

Akan halnya pengetahuan tentang TI yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat modernitas sebesar 29,11%. Kontribusi sebesar ini terhitung amat kecil untuk tingkat modernitas generasi muda. Argumentasinya kurang lebih seperti yang telah dipaparkan di bagian depan bahwa pengetahuan mereka (65%) dalam hal TI memang sebatas cukup atau sedang-sedang saja.

Media Massa

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh yang paling besar nampak pada variabel

konsumsi media massa yakni sebesar 52,09%. Buntomi membedakan konsumen media dalam tiga kategori yakni *dominant readers*, yang menerima apa saja fakta media yang disajikan, *oppositional readers* yang selalu menentang bahkan memusuhi apapun materi yang dimuat atau disiarkan media, dan *negotiated readers*, yakni mereka yang tergolong kelompok kritis.

Pengkategorian khalayak seperti ini dapat membantu menjelaskan mengapa konsumsi media massa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat modernitas generasi muda. Nampaknya karena sebagian besar generasi muda (responden) dalam penelitian ini merupakan *dominant readers* yang menelan informasi dari media begitu saja tanpa memahami bahwa realitas (dalam) media merupakan hasil konstruksi yang berlapis, termasuk di dalamnya adalah iklan.

Iklan bersifat hegemonik dalam menentukan dan membentuk identitas individu dan sikap konsumtif masyarakat karena iklan bermain dan mengeksploitasi wilayah bawah sadar manusia seperti yang dikatakan McLuhan (1964:248) "*Ads are not meant for conscious consumption. They are intended as subliminal pills for the subconscious in order to exercise an hypnotic spell,..?*" .

Istilah *dominant readers* di sini harus dibaca tidak hanya pembaca, melainkan juga pendengar dan pemirsa (radio dan televisi). Dalam penelitian ini televisi merupakan media massa yang paling banyak dikonsumsi responden (76,6%).

Televisi sebagai salah satu media massa yang populer di Indonesia sebenarnya memiliki potensi dalam pembentukan identitas kultural melalui beragam representasi narasi, *images*, dan tanda-tanda. Namun Berdasarkan pengamatan terhadap acara-acara televisi yang kurang lebih seragam, nampak bahwa televisi lebih menekankan pada pembentukan dan penguatan stereotip yang berlaku dalam masyarakat terhadap kelompok gender, etnik, agama, dan status sosial ekonomi. Hal ini nampak pada beragam acara seperti *reality show*, sinetron, acara gosip selebritis, kasus-kasus kriminal, bahkan berita.

Stereotip biasanya dipahami sebagai gambaran baku, sering agak karikatural, tentang suatu kelompok sosial. Stereotip, tidak bisa tidak mesti "keliru" dalam memberikan gambaran

tersebut. Tetapi stereotip yang mesti "keliru" ini juga ikut menata pergaulan dan kepribadian sosial masyarakat, bahkan sering memalsukan realitas sosial. Dalam dunia per-stereotip-an, persoalan benar atau keliru tidaklah terlalu penting. Yang terpenting adalah wilayah penyebarannya dan efektivitas atau kemampuannya meyakinkan khalayak beserta dampaknya. Pertelevisian di Indonesia, disadari atau tidak, telah mengkonstruksi budaya menuju ke homogenisasi dan naturalisasi secara dangkal atas keragaman budaya lewat *stereotyping*.

Namun menuding media massa khususnya televisi sebagai sumber dekadensi moral lewat berbagai program acaranya menunjukkan gejala kemalasan berpikir sebagian besar anggota masyarakat sekaligus penilaian yang tidak adil. Kecenderungan untuk melimpahkan tanggung jawab akan dekadensi moral pada tayangan media semata berarti mengaburkan fungsi serta peran dari institusi sosial lain seperti agama, pendidikan, maupun keluarga, atau bahkan menganggap bahwa lembaga-lembaga tersebut sudah bertindak secara benar dan berfungsi secara optimal. Pada titik ini kesadaran kritis kaum muda justru diperlukan.

Simpulan

Terdapat dua kesimpulan umum yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini. Pertama, media massa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku modern generasi muda. Hal ini mengukuhkan teori yang dikemukakan Alex Inkeles dan David Smith bahwa media massa merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah seseorang menjadi modern. Tentang bagaimana media massa mempengaruhi generasi muda ternyata sejalan dengan teori kultivasi dari George Gerbner.

Di samping itu media massa juga mempengaruhi pemanfaatan TI oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar generasi muda tersebut (65,3%) memanfaatkan TI sebatas untuk memenuhi kebutuhan personal terutama kebutuhan komunikasi dan hiburan yang lebih berorientasi ke gaya hidup. Hal ini sejalan dengan teori pendekatan manfaat TI yang dikonstruksi oleh Malcom Brynin dan Robert Kraut.

Kedua, variabel status sosial ekonomi rumah tangga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat modernitas generasi muda. Hal ini dapat dimaknai bahwa perbedaan status pekerjaan atau jabatan, tingkat pendidikan, dan kepemilikan aset sebuah rumah tangga atau keluarga tidak cukup berarti untuk menentukan sikap dan perilaku modern generasi muda. Karena itu aksesibilitas ke sumber-sumber informasi layak ditambahkan ke dalam salah satu kekuatan atau indikator pembentuk status sosial ekonomi di samping faktor-faktor yang sudah ada selama ini seperti status pekerjaan atau jabatan, tingkat pendidikan, dan kepemilikan aset sebuah rumah tangga.

Saran

Saran yang perlu ditujukan untuk generasi muda adalah pertama, dalam mengkonsumsi produk modern termasuk berbagai piranti TI, generasi muda diharapkan mulai berani berpikir dan bertindak lebih rasional dan kritis dengan mengutamakan pertimbangan fungsi daripada gengsi. Mengedepankan konsumsi produk modern sebagai simbol hanya akan mendekatkan diri pada sikap konsumtif. Sikap konsumtif hanya akan menumpulkan rasa solidaritas sosial dan mengikis kepedulian terhadap lingkungan.

Kedua, demikian halnya dalam mengkonsumsi media massa, generasi muda diharapkan memilih ragam dan isi media yang mencerdaskan, karena media massa memiliki potensi paling besar dalam mempengaruhi dan mengarahkan cara pikir, cara bertindak, dan cara merasa. Di balik isi media massa ada bayang-bayang konsumtivisme, penguatan stereotip kelompok etnik tertentu, domestikasi peran perempuan demi mempertahankan *status quo* budaya patriarkis, dan sebagainya.

Saran untuk dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Perguruan tinggi mengemban misi membudayakan dan memberdayakan generasi muda yang cerdas, kritis, dan hormat terhadap keberagaman masyarakat. Agar misi tersebut dapat terwujud maka pada tataran formal di setiap fakultas, dipandang perlu memasukkan "*media literacy education*" ke dalam kurikulum. *Media literacy*

education ini bisa diperlakukan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri atau diintegrasikan ke dalam semua mata kuliah sebagai metode pembelajaran.

Sebagai alternatif, perguruan tinggi perlu menghidupkan media massa kampus, sebagai salah satu kegiatan mahasiswa. Media massa kampus dimaksudkan sebagai wahana pelatihan dan pembiasaan mahasiswa untuk memanfaatkan media massa, agar warga kampus, terutama mahasiswa, menjadi melek media, sehingga mampu mendekonstruksi realitas sosial yang dikonstruksi media massa.

Salah satu kelemahan penelitian ini adalah tentang penetapan pengetahuan TI menjadi salah satu variabel bebas. Variabel ini ditetapkan berdasarkan *common sense* semata-mata, tanpa dilandasi dengan pendekatan atau tinjauan teoretik yang memadai. Hal ini memunculkan kelemahan dalam perumusan instrumen untuk menentukan sejauh mana pengukuran akan dilakukan dan aspek apa saja yang diukur. Oleh karena itu disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menemukan landasan teoretik mengenai variabel pengetahuan tentang TI sekaligus mengelaborasi butir-butir pertanyaan yang representatif.

Daftar Pustaka

- Baudrillard, Jean, 1998, *The Consumer Society*, (Judul asli, *La societe de consommation*, 1970), London : Sage.
- Barber, Benjamin R., 1995, *Jihad Vs McWorld : Globalisme dan Tribalisme Baru Dunia*, Terjemahan Icon Teralitera (2003), Surabaya : Icon Teralitera.
- Brynin, Malcom and Kraut, Robert, 2006, *Social Studies of Domestic Information and Communication Technologies*, dalam Kraut, Robert et al. (eds.), *Computers, Phones, and the Internet: Domesticating InformationTechnology*, Oxford: Oxford University Press.
- Buntomi, 2007, *Pemilu, Pers dan Kesadaran Kritis Publik*, tersedia di (<http://buntomijanto.wordpress.com/2007/08/03/pemilu-pers-partisan-dan-kesadaran-kritis-publik/>) diakses 18 Juni 2009.

- Cavanagh, Allison, 2007, *Sociology in the Age of the Internet*, New York: Open University Press.
- Chaney, David, 2004, *Lifestyles-Sebuah Pengantar Komprehensif*, Bandung & Yogyakarta : Jalasutra.
- Creswell, John W., 2003, *Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approach*, California: Sage.
- Gerke, Solvay, 2000, Global Lifestyles under Local Conditions: the New Indonesian Middle Class, dalam Chua Beng-Huat, (Ed), *Consumption in Asia: Lifestiles and Identities*, (p.135 –158), London & New York: Routledge.
- Giddens, Anthony, 1990, *The Consequences of Modernity*, California: Stanford University Press.
- Habermas, Jurgen, 1987, *The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures*, Cambridge: Polity Press.
- Hardiman, Budi , 2004, *Filsafat Modern- Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, Handi, 2007, *Karakter dan Perilaku Khas Konsumen Indonesia*, (http://www.handiirawan.com/articles/archives/2007/05/31/karakter_dan_perilaku_khas_konsumen_indonesia), diakses 20 Juni 2009.
- Majalah *Tempo*, 22 Oktober 2006.
- McLuhan, Marshall, 1964, *Understanding Media: The Extensions of Man*, London: Routledge & Kegan Paul (First published in Routledge Classics 2001 by Routledge).
- Media Indonesia, 6 Maret 2007.
- Pritchard, Allan & Woollard, John, 2010, *Psychology for the Classroom: Constructivism and Social Learning*, London & New York : Routledge.
- Ritzer, George, 1996, *Teori Sosial Postmodern*, Terjemahan oleh Juxtapose, (2003), Yogyakarta : Juxtapose dan Kreasi Wacana.
- Straubharr, Joseph and LaRose, Robert, 2002, *Media Now : Communication Media in the Information Age*, Belmont: Wardsworth/Thomson Learning.
- Suwignya, Agus, 2003, *Graduate Qualifications: Advertised, Perceived, Aplied : A Perspective of Indonesian Employers*, dalam, Jurnal Lembaga Penelitian Universitas Sanata Dharma (LPUSD), No.12, Mei 2003, Yogyakarta : LPUSD.
- Turow, Joseph, 2009, *Media Today: an Introduction to Mass Cammunication*, London & New York : Routledge.

**MAKNA IKLAN TELEVISI
(STUDI FENOMENOLOGI PEMIRSA DI JAKARTA
TERHADAP IKLAN TELEVISI
MINUMAN “KUKU BIMA ENERGI” VERSI KOLAM SUSU)**

Hadiono Afdjani

Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Pascasarjana UNPAD, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung
Alamat : Perumahan Puri Beta 2, Jl. Kiara Payung I no. 39, Larangan Utara,
Larangan, Kota Tangerang, 15154
e-mail : hadionoafdjani@ymail.com

Soleh Soemirat

Guru Besar Ilmu Komunikasi UNPAD, Jl. Dipati Ukur 35, Bandung

Abstract

This study aims to understand the meaning of audience for television ads “Kuku Bima Energi” versions of kolam susu, which also promotes the natural beauty of the East Nusa Tenggara. “Kuku Bima Energi” is a superior product PT Sido Appear. Through television ads, PT Sido Appears to strengthen the brand image of “Kuku Bima Energi” is also concerned about the development of Indonesian tourism. Approach or the attractiveness of PT Sido Appeared ad used “Kuku Bima Energi” is that audiences interpret television ads generate brand associations that lead to the formation of brand image. The research question posed is: How do viewers interpret television ads “Kuku Bima Energi” version of kolam susu? Will viewers interpret television ads in the “Kuku Bima Energi” lead to the formation of brand image? Qualitative research methods with the tradition of phenomenology. The subjects were in the public television audience at Jakarta. Object in this research is the television ad “Kuku Bima Energi” version of kolam susu. The collection of data obtained through observation, in-depth interviews conducted on public television viewers who become informants. Data was also obtained through the library and documentation from various media, both print and online. Research results revealed that the brand image of “Kuku Bima Energi” is identical with the benefits of the product, which is felt upon the experiences of each informant. Experience is the most influential in the creation of a brand in mind. So, not because the materials or content ads “Kuku Bima Energi” version of the milk pool. Although the purpose of advertising is very good, which joined forces to introduce or promote the natural charm of East Nusa Tenggara as a tourism destination to the public.

Key words : meaning, television, advertisement

Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji pemirsa televisi di Jakarta dalam memaknai iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi Kolam Susu. Penelitian ini menggunakan studi atau metodologi fenomenologi. Menurut salah satu tokoh

fenomenologi, Edmund Husserl (Kuswarno, 2009 : 10) :

Dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya

sendiri. Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Oleh karena itu, tidak salah apabila fenomenologi juga diartikan sebagai studi tentang makna, dimana makna itu lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini bermaksud mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, juga diartikan sebagai studi tentang makna, dimana makna itu lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya, dalam hal ini pemirsa di Jakarta terhadap tayangan iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu.

Pemirsa televisi setiap hari disuguhi berbagai macam tayangan program televisi baik berita maupun nonberita. Di sela-sela tayangan program acara tersebut, pemirsa televisi juga akan mendapatkan tayangan berbagai macam iklan produk dan jasa yang tujuannya adalah untuk mempromosikan atau menawarkan produk dan jasa tersebut. Salah satunya adalah produk minuman “Kuku Bima Energi” menampilkan iklan versi kolam susu yang mengedepankan tradisi-tradisi di Pulau Sumba, antara lain menceritakan tentang tradisi masyarakat Lamalera ketika musim berburu ikan paus dan tradisi pasola yang merupakan permainan adu ketangkasan melempar lembing di atas kuda. Saat ini, iklan minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu tersebut telah tayang di beberapa stasiun TV. “NTT merupakan pulau-pulau Indonesia Timur yang mempunyai pantai indah, sangat layak untuk dipromosikan menjadi daerah tujuan wisata di Indonesia” ujar Direktur Utama PT Sido Muncul, Irwan Hidayat, kepada Batam Pos, baru-baru ini.

Pengambilan gambar iklan minuman “Kuku Bima Energi” kali ini, dilakukan di Labuan Bajo dengan pengambilan lokasi antara lain di bukit Melo, Ruteng, pantai Kanawa, dan pulau Rinca yang hal ini menambah keanekaragaman gambar

latar belakang keindahan alam NTT. Iklan yang dibintangi Rieke Diah Pitaloka, Donny Kesuma, Chris John, dan Shanty yang sebelumnya masing-masing telah menjadi “ikon” Kuku Bima Energi, kali ini juga menggandeng Olga Lidya yang ditetapkan Kementerian Kebudayaan dan Kepariwisata sebagai duta Pulau Komodo.

PT Sido Muncul, perusahaan jamu nasional yang selama ini dikenal menciptakan *brand image* yang berkaitan dengan nasionalisme dan kebudayaan Indonesia, melalui beberapa iklan televisi seperti iklan televisi Tolak Angin bertema *Truly Indonesia*, yang menggambarkan beraneka ragam kebudayaan asli Indonesia, termasuk jamu, yang merupakan bahan baku utama produk Tolak Angin. Juga iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi tari Pendet dari Bali yang sempat diklaim oleh Malaysia. Kali ini dengan cerdas membuat iklan televisi salah satu produknya yaitu minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu, di dalamnya menampilkan pesona alam daerah propinsi Nusa Tenggara Timur yang layak menjadi daerah tujuan wisata yang tujuannya adalah ikut mempromosikan pariwisata Indonesia sebagai penguatan citra mereknya (*brand image*).

Tujuan penelitian ini adalah : (1). Mengetahui makna informan pemirsa di Jakarta terhadap iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu, (2). Mengetahui apakah iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu yang dimaknai oleh pemirsa televisi di Jakarta sebagai bentuk turut mempromosikan pariwisata Indonesia dalam penguatan *brand image*.

Manfaat penelitian ini adalah : (1). Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang komunikasi, terutama tentang pembentukan makna informan pemirsa terhadap iklan televisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang menunjukkan konteks diri pemirsa televisi yang berinteraksi dalam proses pembentukan makna. Teori-teori yang memberi manfaat dalam penelitian ini meliputi teori : Tidakan Sosial, Fenomenologi, Interaksi Simbolik, (2). Secara praktis, penelitian ini diharapkan membantu memecahkan masalah yang berkaitan tentang makna iklan televisi pada pemirsa. Sehingga

menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan iklan televisi, baik perusahaan pemasang iklan maupun *agency* pembuat iklan serta pihak televisi itu sendiri. Fakta yang dihasilkan kiranya juga dapat dimanfaatkan pula oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian pada iklan televisi.

Teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah : Teori Tindakan Sosial dari Max Weber (1864-1920), mendefinisikan tindakan sosial sebagai semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku tersebut. Teori Tindakan Sosial menurut sebagian besar pakar memayungi beberapa teori diantaranya adalah teori Interaksi Simbolik dan teori Fenomenologi (Mulyana, 2008: 60) :

Sebagian pakar berpendapat, teori Interaksi Simbolik, khususnya dari George Herbert Mead, seperti teori etnometodologi dari Harold Garfinkel yang juga berpengaruh di Amerika, serta teori Fenomenologi dari Alfred Schutz yang berpengaruh di Eropa, sebenarnya berada di bawah payung teori Tindakan Sosial yang dikemukakan filosof dan sekaligus sosiolog Jerman, Max Weber (1864-1920), satu dari tiga teoretisi klasik utama (di samping Emile Durkheim dan Karl Marx), meskipun Weber sendiri sebenarnya bukanlah seorang interpretivis murni.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa teori Tindakan Sosial memayungi antara lain teori Fenomenologi dan Interaksi Simbolik. Berikut adalah teori Fenomenologi dan Interaksi Simbolik yang memperkuat landasan teori dalam penelitian ini :

Teori Fenomenologi dari Alfred Schutz (1899-1959), dalam *The Phenomenology of Social World* (1967 : 7), mengemukakan bahwa orang secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi tanda dan arti tentang apa yang mereka lihat. Interpretasi merupakan proses aktif dalam menandai dan mengartikan tentang sesuatu yang diamati, seperti bacaan, tindakan atau situasi bahkan pengalaman apapun. Lebih lanjut, Schutz menjelaskan pengalaman inderawi sebenarnya tidak punya arti. Semua itu hanya ada begitu saja;

obyek-obyeklah yang bermakna. Semua itu memiliki kegunaan-kegunaan, nama-nama, bagian-bagian, yang berbeda-beda dan individu-individu itu memberi tanda tertentu mengenai sesuatu, misalnya menandai orang yang mengajar adalah seorang guru.

Menurut Schutz, cara orang mengkonstruksikan makna dari luar atau dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipifikasi. Dalam hal ini termasuk membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman yang ada. Hubungan-hubungan makna diorganisir secara bersama-sama, juga melalui proses tipifikasi, ke dalam apa yang Schutz namakan “kumpulan pengetahuan” (*stock of knowledge*). Kumpulan pengetahuan bukanlah pengetahuan tentang dunia, melainkan merupakan segala kegunaan-kegunaan praktis dari dunia itu sendiri. Persoalan pokoknya di sini adalah bahwa setelah perkembangan tahap tertentu, kumpulan pengetahuan tersebut yang telah ditipifikasikan, yang terdiri dari dunia saja, juga dimiliki bersama-sama orang lain. Setiap orang sama-sama memiliki pikiran/akal sehat, dunia yang diterima secara begitu saja, yang oleh Schutz (mengikuti Husserl) menyebutnya sebagai “*live world*” , yang merupakan dasar dari semua aktivitas-aktivitas sosial. Kemudian disusun dan mengubahnya dalam interaksi sosial lalu menurunkannya dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi yang dilakukan.

Menurut Schutz, fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami sebuah obyek atau peristiwa melalui pengalaman sadar tentang obyek atau peristiwa tersebut. Sebuah fenomena adalah penampilan sebuah obyek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi seseorang, jadi bersifat subjektif. Bagi Schutz dan pemahaman kaum fenomenologis, tugas utama analisis fenomenologis adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa sebagai anggota masyarakat berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi

(Mulyana, 2008 : 63).

Dalam konteks fenomenologis, pemirsa televisi adalah aktor yang melakukan tindakan sosial. Pada aktor tersebut juga memiliki historisitas dan dapat dilihat dalam bentuk yang alami.

Teori lain yang mendukung kajian ini adalah Teori Interaksi Simbolik (*George Herbert Mead dan Herbert Blumer*). Para ahli perspektif interaksionisme simbolik melihat bahwa individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain.

Mereka menemukan bahwa individu-individu tersebut berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata. Simbol atau lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang disepakati bersama. (Mulyana, 2008 : 84)

Di dalam bukunya yang amat terkenal, yaitu "*Symbolic Interactionism; Perspective, and Method*," (1986 : 2), Herbert Blumer, menegaskan bahwa ada tiga asumsi yang mendasari tindakan manusia. Tiga asumsi tersebut adalah sebagai berikut: (1). *Human being act toward things on the basis of the meaning that the things have for them*, (2). *The meaning of the things arises out of the social interaction one with one's fellow*; (3). *The meaning of things are handled in and modified through an interpretative process used by the person in dealing with the thing he encounters*.

Dari pendapat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut, *Pertama*, bahwa manusia itu bertindak terhadap sesuatu (apakah itu benda, kejadian, maupun fenomena tertentu) atas makna yang dimiliki oleh benda, kejadian, atau fenomena itu bagi mereka. Individu merespon suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen tersebut bagi mereka.

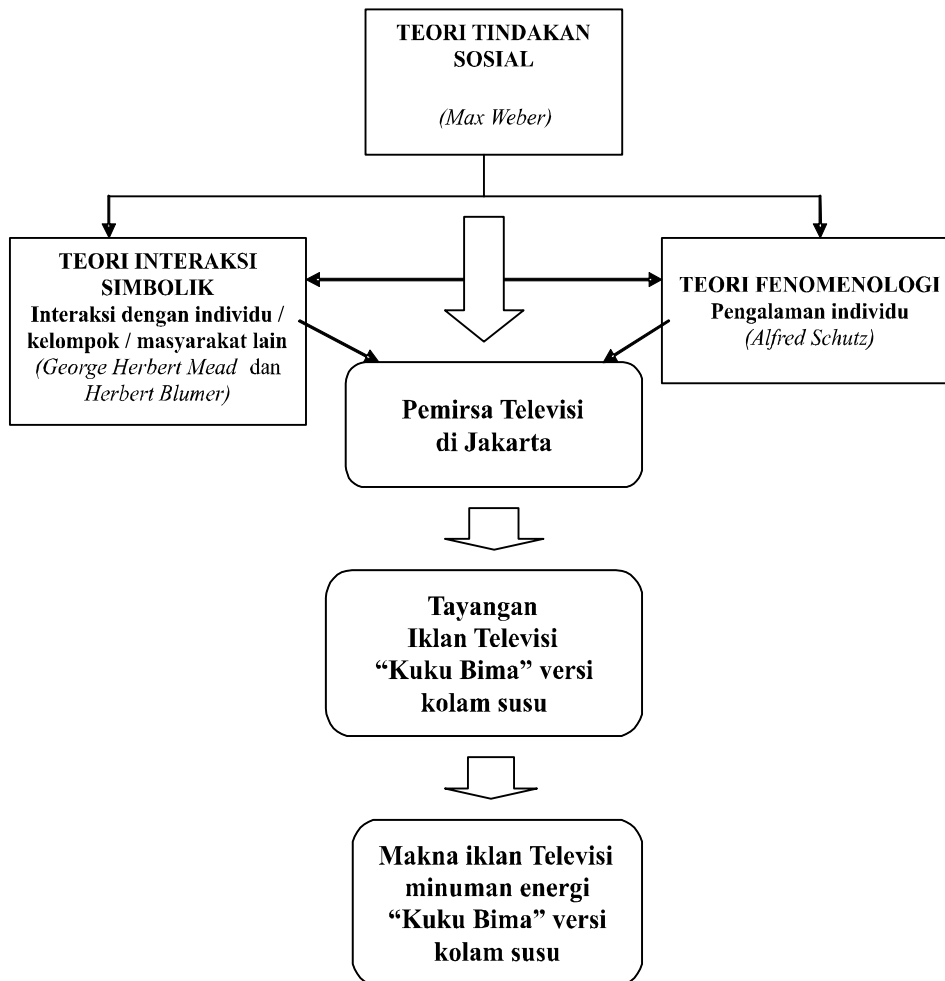
Kedua, makna tadi diberikan oleh manusia sebagai hasil interaksi dengan sesamanya. Jadi, makna tadi tidak *inherent*, tidak terlekat pada benda ataupun fenomenanya itu sendiri, melainkan tergantung pada orang-orang yang terlibat dalam interaksi itu. Makna dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan, atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan, atau peristiwa itu) namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, atau gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Melalui penggunaan simbol itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.

Ketiga, makna tadi ditangani dan dimodifikasi melalui proses interpretasi dalam rangka menghadapi fenomena tertentu lainnya. Makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri.

Aplikasi teori tersebut dalam penelitian ini adalah bahwa pemirsa televisi berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata dalam memaknai iklan televisi minuman energi "Kuku Bima" versi kolam susu. Berikut adalah gambar alur pemikiran penelitian Makna Iklan Televisi (Studi Fenomenologi Pemirsa di Jakarta terhadap Iklan Televisi Minuman "Kuku Bima Energi" versi Kolam Susu) :

Dari gambar 1, alur kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa teori Tindakan Sosial dari Max Weber memayungi teori Fenomenologi (Alfred Schutz) dan teori Interaksi Simbolik (George Herbert Mead dan Herbert Blumer). Teori Fenomenologi melihat bahwa orang secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi tanda dan arti tentang apa yang mereka lihat dalam hal ini adalah khalayak atau penonton televisi terhadap iklan televisi minuman energi "Kuku Bima" versi kolam susu. Sedangkan teori Interaksi Simbolik melihat individu-individu berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol

Gambar 1 : Alur Kerangka Pemikiran
MAKNA IKLAN TELEVISI
(Studi Fenomenologi Pemirsa di Jakarta terhadap Iklan Televisi



yang didalamnya berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata dalam memaknai iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu.

Metode Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemirsa iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu di Jakarta. Subjek dipilih secara *purposif* berdasarkan aktivitas mereka dan kesediaan mereka untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan pengalaman mereka menonton iklan televisi minuman energi “Kuku Bima” versi kolam susu. Subjek penelitian tersebut dijadikan informan utama atau sumber data utama. Creswell (1994 : 115), menyebutnya partisipan. Wawancara dilakukan di Jakarta.

Obyek penelitian yang dikaji atau aspek-

aspek yang menjadi fakta penelitian, adalah tentang makna iklan televisi produk minuman energi “Kuku Bima” versi kolam susu.

Pertanyaan penelitian ini adalah : (1). Bagaimana informan pemirsa di Jakarta memaknai iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu?, (2). Apakah iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu dimaknai oleh pemirsa televisi di Jakarta sebagai bentuk turut mempromosikan pariwisata Indonesia dalam penguatan *brand image*?

Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma menentukan bagaimana peneliti memandang suatu masalah penelitian, menentukan metodologi penelitian dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Lebih jauh mengenai paradigma konstruktivis

Hadari Nawawi (2001 : 50) menjelaskan :

Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada di dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang.... Karena dasar filosofis ini, maka hubungan epistemologis antara pengamatan dan objek bersifat satu kesatuan, subjektif, dan merupakan hasil perpaduan interaksi di antara keduanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berkenaan dengan metode tersebut, Judistira K. Garna (1999 : 32) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan peneliti yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tidak dimungkinkan untuk diukur secara tepat.

Penelitian ini menggunakan studi atau metodologi fenomenologi, menurut Stephen W. Little John (2005 : 336), tentang studi fenomenologi:

Fenomenologi adalah pendekatan yang beranggapan bahwa suatu fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transendental. Dunia sosial keseharian tempat manusia hidup senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan sarat dengan makna. Dengan demikian, fenomena yang di pahami oleh manusia adalah refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna.

Dari penjelasan tersebut, dapat penulis simpulkan beberapa kata kunci dalam fenomenologi yaitu objek, makna, pengalaman, dan kesadaran dari individu. Semua hal tersebut memainkan peranan penting dalam studi fenomenologi. Jadi penelitian ini berusaha mempelajari pengalaman-pengalaman dari sudut pandang khalayak atau penonton iklan televisi produk minuman energi “Kuku Bima” versi kolam susu.

Dalam konteks fenomenologis, khalayak atau penonton iklan televisi adalah aktor yang melakukan tindakan sosial bersama aktor lainnya sehingga memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif. Pada aktor tersebut juga memiliki historisitas dan dapat dilihat dalam bentuk yang alami. Mereka mengkonstruksikan makna dari luar atau dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipifikasi. Dalam hal ini termasuk membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman yang ada.

Penelitian ini menggunakan studi atau metodologi fenomenologi, menurut Edmund Husserl (Kuswarno, 2009 : 10) tentang studi fenomenologi:

Dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari aspek-aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Oleh karena itu, tidak salah apabila fenomenologi juga diartikan sebagai studi tentang makna, dimana makna itu lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya.

Tahapan-tahapan penelitian fenomenologi Husserl (Kuswarno, 2009 : 47-53), adalah sebagai berikut : (a). *Epoche*, adalah pemutusan hubungan dengan pengalaman yang peneliti miliki sebelumnya. Dalam melakukan penelitian fenomenologi, *epoche* ini mutlak harus ada. Terutama ketika menempatkan fenomena dalam kurung (*bracketing method*). Memisahkan fenomena dari keseharian dan dari unsur-unsur fisiknya, dan ketika mengeluarkan “kemurnian” yang ada padanya. Jadi *epoche* adalah cara untuk melihat dan menjadi, sebuah sikap mental yang bebas, (b). *Reduksi*, ketika *epoche* adalah langkah awal untuk “memurnikan” objek dari pengalaman dan prasangka awal, maka tugas dari reduksi fenomenologi adalah menjelaskan dalam susunan bahasa bagaimana objek itu terlihat. Tidak hanya

dalam term objek secara eksternal, namun juga kesadaran dalam tindakan internal, pengalaman, ritme dan hubungan antara fenomena “aku” , sebagai subjek yang diamati. Fokusnya terletak pada kualitas pengalaman, sedangkan tantangannya ada pada pemenuhan sifat-sifat alamiah dan makna dari pengalaman. Dengan demikian proses ini terjadi lebih dari satu kali. Berikut adalah tahap-tahap yang terjadi dalam reduksi fenomenologi : (1). *Bracketing*, atau proses menempatkan fenomena dalam “keranjang” atau tanda kurung, dan memisahkan hal-hal yang dapat mengganggu untuk memunculkan kemurniannya, (2). *Horizontalizing*, atau membandingkan dengan persepsi orang lain mengenai fenomena yang diamati, sekaligus mengorek atau melengkapi proses *bracketing*, (3). *Horizon*, yakni proses menemukan esensi dari fenomena yang murni atau sudah terlepas dari persepsi orang lain, (4). Mengelompokkan horizon-horizon ke dalam tema-tema tertentu dan mengorganisasikannya ke dalam deskripsi tekstural dari fenomena yang relevan.

Simpulannya, menurut Kockelmans, reduksi adalah prosedur metodik dimana menaikkan pengetahuan dari level fakta ke level “ide” , atau dari fakta ke esensi secara umum.

(c). Variasi Imajinasi, adalah mencari makna-makna yang mungkin dengan memanfaatkan imajinasi, kerangka rujukan, pemisahan dan pembalikan, dan pendekatan terhadap fenomena dari perspektif, posisi, peranan dan fungsi yang berbeda. Tujuannya tiada lain untuk mencapai deskripsi struktural dari sebuah pengalaman (bagaimana fenomena berbicara mengenai dirinya). Dengan kata lain menjelaskan struktur esensial dari fenomena. Berikut adalah langkah-langkah dalam tahap variasi imajinasi : (1). Sistematisasi struktur makna yang mungkin, dengan mendasarkan pada makna tekstural, (2). Mengenali tema-tema pokok dan konteks ketika fenomena muncul, (3). Menyadari struktur universal yang mengedepankan perasaan dan pikiran dalam kerangka rujukan fenomena. Seperti struktur waktu, ruang, perhatian, bahan, kausalitas, hubungan dengan diri dan dengan orang lain, (4). Mencari contoh-contoh yang dapat mengilustrasikan tema struktur invarian dan memfasilitasi pembangunan deskripsi struktural

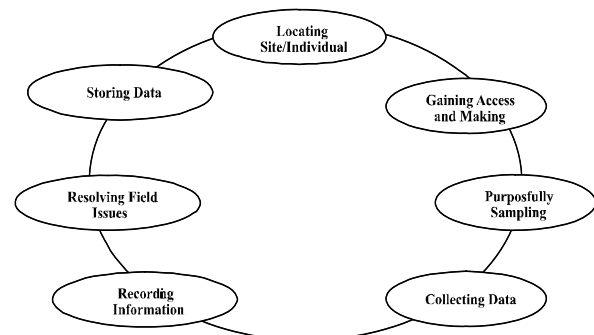
dari fenomena.

(d). Sintesis Makna dan Esensi, tahap terakhir dalam penelitian fenomenologi transendental adalah integrasi intuitif dasar-dasar deskripsi tekstural dan struktural ke dalam suatu pernyataan yang menggambarkan hakikat fenomena secara keseluruhan. Dengan demikian, tahap ini adalah tahap penegakan pengetahuan mengenai hakikat.

Penjelasan mengenai penelitian fenomenologi tersebut menjadi pedoman peneliti dalam melakukan penelitian tentang makna iklan bagi khalayak iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian fenomenologi terdapat langkah-langkah yang harus diikuti oleh peneliti. Hal itu dijelaskan oleh Creswell, yaitu dimulai dari penentuan lokasi atau individu, kemudian membangun akses dan *rapport*, memilih sampling secara *purposif*, pelaksanaan pengumpulan data itu sendiri di lapangan, mencatat informasi, memecahkan isi-isu lapangan, menyimpan data serta kembali lagi pada langkah awal. Keseluruhan lingkaran pengumpulan data yang akan dilakukan di lapangan tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2 : Lingkaran Aktivitas Pengumpulan Data



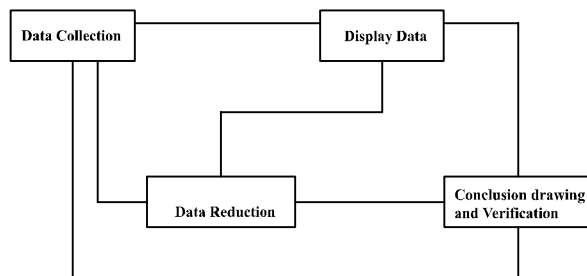
Sumber : Creswell (1994 :125)

Berdasarkan sifat dari penelitian metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung yang relevan dalam penelitian makna iklan televisi. Penelitian ini difokuskan pada pemirsa iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu di Jakarta dengan jumlah sebanyak 20 informan.

Selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan teknik analisis data, Miles dan Huberman (Bungin, 2001 : 145), menyebutkan

tiga langkah pengolahan data kualitatif yang terjadi saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data dengan tiga tahap model air yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Alur dari proses pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3: Proses Analisis Data



Sumber : Miles and Huberman (Bungin, 2001 : 145)

Gambar tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: reduksi data meliputi : pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi tidak hanya dilakukan ketika penelitian usai dilakukan, tetapi berlangsung terus menerus selama penelitian. Dengan cara ini dimungkinkan ditemukan kenyataan ganda yang terdapat dari data, membuat hubungan peneliti-informan menjadi eksplisit, menguraikan latar secara penuh, dapat tidaknya pengalihan kepada latar lainnya, memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analisis.

Penelitian ini, peneliti memprediksi dan mengantisipasi reduksi data, terutama berkaitan dengan penelitian ini. Reduksi dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri temuan yang tersebar baik dari hasil wawancara dengan informan dan studi literatur, kemudian membuat gugus atau merumuskan memo sebagai dasar penyajian informasi data dan analisis selanjutnya.

Analisis secara kualitatif terhadap hasil wawancara, kemudian dilakukan interpretasi secara mendalam mengenai hubungan antara teori dan fakta yang terjadi. Disini juga mengikutsertakan kutipan-kutipan (*direct quotations*) dari para narasumber. Analisa ini berguna untuk mengenal lebih mendalam masalah yang diteliti.

Penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi suatu pernyataan yang memungkinkan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan saat diperoleh informasi itu, kemudian diklasifikasikan menurut isu dan kebutuhan analisis. Maksudnya, tiada lain adalah mensistematisasikan dan menyederhanakan informasi yang beragam dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif atau konfiguratif sehingga lebih mudah dipahami. Akhirnya dengan langkah ini memungkinkan peneliti memahami hal-hal yang terjadi dan sedang terjadi yang muncul dalam kurun waktu penelitian dilakukan.

Kesimpulan penelitian berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan tahap sebelumnya. Pada tahap awal simpulan masih bersifat longgar, kemudian diringkas lagi menjadi rinci dan mengakar. Simpulan yang masih longgar yang sudah dirumuskan pada tahap reduksi data, disimpulkan lagi pada tahap penyajian dan akhirnya menjadi final pada tahap penarikan simpulan. Sekali lagi, langkah ini menunjukkan pada analisis data kualitatif berarti dilakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan terus menerus sebagai sebuah lingkaran.

Proses analisis data digunakan metode induktif karena itu penelitian ini tidak membuktikan hipotesis, tetapi lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan. Analisis dimulai ketika pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan. Analisis data dimulai dengan menelaah sumber data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dilakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi (rangkuman inti) sehingga menjadi suatu informasi. Satuan-satuan ini kemudian disusun dan terakhir mengadakan keabsahan data. Berdasarkan proses ini, data dapat ditafsirkan dan diolah menjadi hasil penelitian. Tahapan penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Sedangkan tahap kesimpulan atau verifikasi merupakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji

kebenarannya atau validitasnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian dengan menggunakan studi fenomenologi, pemirsa iklan televisi di Jakarta dalam memaknai dari luar atau dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipifikasi. Tipifikasi pemirsa iklan televisi di Jakarta sebagai berikut : (1). Pemirsa status ekonomi sosial A, dengan pendapatan di atas 20 juta rupiah ke atas per bulan, (2). Pemirsa status ekonomi sosial B, dengan pendapatan antara 2 juta –19 rupiah juta per bulan, (3). Pemirsa status ekonomi sosial C, dengan pendapatan kurang dari 2 juta rupiah per bulan.

Pemirsa di Jakarta dalam memaknai iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu :

Berdasarkan hasil wawancara, informan pemirsa iklan televisi di Jakarta dalam memaknai iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu bermacam-macam sesuai dengan pengalaman yang ada pada dirinya masing terhadap tayangan iklan televisi tersebut. Dari pengumpulan data di lapangan, pemaknaan informan pemirsa iklan televisi dapat dikelompokkan/tipikasi disebagai berikut :

(1). Pemirsa status ekonomi sosial A, dengan pendapatan di atas 20 juta rupiah ke atas per bulan, memaknai iklan televesi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu sebagai berikut : (a). Tayangan Iklan televisi tersebut ikut mempromosikan daerah tujuan wisata Nusa Tenggara Timur, (b0. Menggalakan rasa cinta tanah air dan budaya Indonesia, (c). *Talent* iklan televisi (bintang iklan) tak sesuai dengan target konsumen produk.

(2). Pemirsa status ekonomi sosial B, dengan pendapatan antara 2 juta –19 rupiah juta per bulan, memaknai iklan televesi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu sebagai berikut : (a). Tayangan iklan televisi tersebut menarik tetapi terlalu panjang durasinya, (b). Iklan televisi tersebut membuat tahu manfaat produk minuman energi “Kuku Bima” , (c). *Talent* iklan televisi tersebut (bintang iklan) sangat dikenal.

(3). Pemirsa status ekonomi sosial C,

dengan pendapatan kurang dari 2 juta rupiah per bulan, memaknai iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu sebagai berikut : (a). Tayangan iklan tersebut dari segi materi sangat menarik, (b). Iklan televisi tersebut membuat makin percaya pada manfaat produk minuman energi “Kuku Bima” , (c). *Talent* iklan televisi tersebut (bintang iklan) sangat disukai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pemirsa iklan televisi di Jakarta dalam memaknai iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu terbentuk karena pengalaman langsung setelah menonton tayangan iklan televisis tersebut. Dalam memaknainya, khalayak iklan televisi akan melakukan secara aktif terhadap berbagai realitas yang bersifat obyektif dan subyektif melalui sosialisasi diri. Hal ini sesuai dengan asumsi teori Fenomenologi dari Alfred Schutz.

Namun pada dasarnya tindakan komunikatif sifatnya sukarela, yaitu memandang komunikator sebagai makhluk pembuat pilihan. Ini tidak berarti bahwa orang memiliki pilihan bebas. Lingkungan sosial memang membatasi apa yang dapat dan sudah dilakukan, tapi dalam kebanyakan situasi, ada elemen pilihan tertentu. Sedangkan pengetahuan adalah sebuah produk sosial, pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditemukan secara obyektif, tetapi diturunkan dari interaksi di dalam kelompok-kelompok sosial. Bahasa kemudian membentuk realita dan pengertian menentukan apa yang kita ketahui. Pengetahuan bersifat kontekstual yaitu pengertian terhadap peristiwa selalu merupakan produk dari interaksi pada tempat dan waktu tertentu, pada lingkungan sosial tertentu. Pemahaman tentang peristiwa berubah dengan berjalannya waktu. Hal ini sesuai dengan salah satu asumsi pada teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer bahwa makna tadi diberikan oleh manusia sebagai hasil interaksi dengan sesamanya. Jadi, makna tadi tidak *inherent*, tidak terlekat pada benda ataupun fenomenanya itu sendiri, melainkan tergantung pada orang-orang yang terlibat dalam interaksi itu. Makna dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa.

Fenomena pemirsa iklan televisi dalam memaknai iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu dapat dianggap

bagian dari apa yang disebut dalam teori Tindakan sosial dari Max Weber sebagai tindakan sosial. Sebagai tindakan sosial merupakan perilaku khalayak iklan televisi secara subjektif yang bermakna dan unik yang ditujukan untuk mempengaruhi atau berorientasi pada perilaku orang lain. Pemirsa iklan televisi adalah aktor yang melakukan tindakan sosial. Pada aktor tersebut juga memiliki historisitas dan dapat dilihat dalam bentuk yang alami. Mereka memaknai dari luar atau dari arus utama pengalaman ialah melalui proses tipifikasi. Dalam hal ini termasuk membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman yang ada. Hubungan-hubungan makna diorganisir secara bersama-sama, juga melalui proses tipifikasi, ke dalam "kumpulan pengetahuan" (*stock of knowledge*). Kumpulan pengetahuan bukanlah pengetahuan tentang dunia, melainkan merupakan segala kegunaan-kegunaan praktis dari dunia itu sendiri. Misalnya manfaat dari iklan televisi tersebut baginya.

Namun pemirsa iklan televisi adalah individu-individu yang dalam memaknai iklan televisi produk minuman energi "Kuku Bima" versi kolam susu tergantung kompleksitas kognitif yang ada pada masing-masing individu. Karena orang berpikir pada tingkat kecanggihan yang berbeda, tergantung pada topiknya. Pemirsa iklan televisi yang memiliki kerumitan kognitif dapat melihat lebih banyak perbedaan daripada mereka yang memiliki sistem kognitif sederhana. Perbedaan mempersepsikan bukan alami namun ditentukan seperangkat yang berlawanan dalam sistem kognitif individual. Setiap pemirsa iklan televisi tidak memiliki suatu tingkat kompleksitas kognitif yang konsisten atau sama pada destinasi yang.

Fakta di lapangan, informan pemirsa iklan televisi di Jakarta dalam memaknai iklan televisi produk minuman "Kuku Bima Energi" versi kolam susu berbeda-beda satu sama lainnya. Informan pada golongan khalayak status ekonomi sosial A, dengan pendapatan di atas 20 juta rupiah ke atas per bulan, memaknai iklan televesi produk minuman "Kuku Bima Energi" versi kolam susu ikut mempromosikan daerah tujuan wisata Nusa Tenggara Timur, menggalakkan rasa cinta tanah air dan budaya Indonesia, *talent* iklan televisi (bintang iklan) tak sesuai dengan target konsumen

produk. Hal ini menggambarkan bahwa pada kelompok pemirsa status ekonomi A, pengetahuannya luas dalam memaknai iklan televisi tersebut. Mereka memaknai isi iklan dikaitkan dengan adanya promosi daerah tujuan wisata Nusa Tenggara Timur serta menggalakkan cinta tanah air. Kelompok ini juga sangat kritis terhadap *talent* atau bintang iklan yang dianggap tak sesuai dengan target konsumen.

Sedangkan kelompok pemirsa status ekonomi sosial B, dengan pendapatan antara 2 juta –19 rupiah juta per bulan, memaknai iklan televesi produk minuman "Kuku Bima Energi" versi kolam susu bahwa tayangan iklan televisi tersebut menarik tetapi terlalu panjang durasinya, iklan televisi tersebut membuat tahu manfaat produk minuman "Kuku Bima Energi" , *talent* iklan televisi tersebut (bintang iklan) sangat dikenal. Hal ini mengungkapkan bahwa kelompok pemirsa status ekonomi sosial B, dalam memaknai iklan tersebut lebih cenderung pada pengetahuannya yang kian bertambah tentang manfaat produk minuman "Kuku Bima Energi" . Kelompok ini juga tak mempersoalkan *talent* atau bintang iklan yang ditampilkan dalam iklan tersebut karena mereka sudah sangat mengenalnya. Justru mereka mengeluhkan durasi iklan televisi tersebut yang dianggap terlalu panjang, sehingga mengaburkan tujuan yang sebenarnya dari iklan televisi tersebut yaitu dalam menawarkan produknya.

Lain lagi dengan kelompok pemirsa status ekonomi sosial C, yang pendapatannya kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Mereka memaknai iklan televisi produk minuman "Kuku Bima Energi" versi kolam susu yaitu tayangan iklan tersebut dari segi materi sangat menarik. Iklan televisi tersebut membuat mereka makin percaya pada manfaat produk minuman "Kuku Bima Energi" . *Talent* iklan televisi tersebut (bintang iklan) sangat disukai. Dari pemaknaan iklan televisi tersebut dapat diungkapkan bahwa kelompok ini makin percaya pada produk minuman "Kuku Bima Energi" . Kelompok ini juga sangat tertarik dengan materi iklan televisi tersebut dan *talent* atau bintang iklan yang ada. Mereka tak mempermasalahkan atau tak mau mengkritisi iklan televisi tersebut.

Dari hasil pemaknaan ketiga kelompok informan pemirsa iklan televisi produk minuman

energi “Kuku Bima” versi kolam susu dapat ditarik kesimpulan bahwa iklan televisi tersebut, memang memenuhi tujuan dan daya tarik tertentu, tetapi menimbulkan berbagai interpretasi. Sebagian informan yang berasal dari kelompok B dan C memaknai iklan televisi tersebut tak mengaitkan dengan citra merek (*brand image*) yang ingin dikuatkan seperti yang diutarakan oleh Direktur Utama PT Sido Muncul, Irwan Hidayat, yaitu dengan ikut mempromosikan pariwisata daerah tujuan wisata Nusa Tenggara Timur seperti materi yang ada pada iklan tersebut. Padahal kelompok B dan C atau golongan ekonomi sosial menengah ke bawah adalah sebagai konsumen terbesar (*loyal consumer*) dari produk tersebut. Kelompok ini lebih cenderung memaknai manfaat produk minuman energi “Kuku Bima”. Hanya kelompok A (golongan ekonomi sosial atas) yang memaknai bahwa iklan televisi produk minuman energi “Kuku Bima” tersebut berusaha membangun citra mereknya yang peduli dengan pariwisata Indonesia.

Dengan demikian, strategi komunikasi yang digunakan dalam iklan televisi tersebut kurang tepat untuk mengubah sikap, opini dan perilaku pemirsa. Iklan televisi tersebut kurang bisa menguatkan *brand image*, karena berdasarkan hasil penelitian, hanya sebagian kecil informan (yaitu pada kelompok A) yang memahami maksud pesan iklan dan menimbulkan sikap dan perilaku tertentu setelah melihat iklan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan keragaman makna terhadap iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi”, karena sesuai dengan metode Fenomenologi, pemirsa iklan televisi “Kuku Bima Energi” memiliki beragam interpretasi sesuai dengan *social setting* masing-masing khalayak. Tetapi, walaupun terdapat beragam interpretasi, di benak pemirsa menjurus ke suatu hasil yang menunjukkan iklan televisi “Kuku Bima Energi” baik, karena hampir seluruh informan (terutama pada kelompok B dan C) percaya dengan manfaat produk tersebut.

Dari hasil pemaknaan pemirsa iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu di Jakarta, bahwa iklan televisi tersebut kurang bisa dimaknai sebagai bentuk penguatan *brand image* dalam ikut mempromosikan pariwisata Indonesia di benak pemirsa, maka iklan

televisi tersebut diharapkan hanya melakukan kegiatan *marketing public relations* yaitu memposisikan perusahaan sebagai “*leader*” atau “*expert*”, membangun kepercayaan (*confidence and trust*) konsumen, melibatkan / menggerakkan masyarakat terhadap produk. Menjangkau “*secondary market*”, menekan pasar yang lemah, memperluas jangkauan iklan, mendapatkan dukungan konsumen dengan menjelaskan misi perusahaan, mendorong motivasi tenaga-tenaga penjual (*sales force*), memperoleh dukungan dari para penyalur (pengecer).

Simpulan

Berdasarkan data di lapangan dengan didukung oleh teori-teori (Teori Tindakan Sosial, Fenomenologi, Interaksi Simbolik,) dimana penelitian ini bertujuan mengetahui makna informan pemirsa di Jakarta terhadap iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu dan apakah iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam susu yang dimaknai oleh pemirsa televisi di Jakarta sebagai bentuk turut mempromosikan pariwisata Indonesia dalam penguatan *brand image*, dapat diambil simpulan bahwa pemirsa di Jakarta dalam memaknai iklan televisi produk minuman “Kuku Bima Energi” versi kolam menunjukkan keragaman makna terhadap iklan televisi minuman “Kuku Bima Energi”, karena pemirsa iklan televisi “Kuku Bima Energi” memiliki beragam interpretasi sesuai dengan *social setting* masing-masing khalayak. Tetapi, walaupun terdapat beragam interpretasi, dimaknai pemirsa menjurus ke suatu hasil yang menunjukkan iklan televisi “Kuku Bima Energi” baik, karena hampir seluruh informan (terutama pada kelompok B dan C) percaya dengan manfaat produk tersebut. Namun iklan televisi tersebut kurang bisa dimaknai sebagai bentuk penguatan *brand image* dalam ikut mempromosikan pariwisata Indonesia di benak pemirsa Jakarta.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki saran bagi pihak produsen yaitu PT Sido Muncul, untuk lebih memperkuat *brand image* “Kuku Bima Energi”, hendaknya PT Sido Muncul juga mulai memperhatikan media *below the line*,

karena sebagian besar *loyal consumer* “Kuku Bima Energi” adalah kelas menengah ke bawah, yang gemar menonton televisi tetapi tidak terlalu memahami pesan iklan dan kaitannya dengan asosiasi produk. Jika ingin berusaha menjangkau *secondary market* (kelas menengah ke atas), mungkin bisa digunakan cara-cara yang lain, misalnya berupa *sponsorship* dalam acara yang banyak dihadiri para konsumen kelas menengah ke atas. PT Sido Muncul hendaknya mengevaluasi kembali karena terdapat sebagian informan yang memaknai alur iklan televisi itu terlalu panjang, sehingga menimbulkan terlalu banyak interpretasi, yang dapat melemahkan *brand image*. Walaupun maksud dari iklan tersebut sangat bagus, yaitu ikut memperkenalkan atau mempromosikan pesona alam Nusa Tenggara Timur sebagai daerah tujuan wisata kepada khalayak.

Daftar Pustaka

- Blumer, Herbert, 1986, “*Symbolic Interactionism; Perspective, and Method,*” London : University Of California Press Barkeley Los Angeles.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Cresswell, John W., 1994, *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among*
- Five Tradition*, The United State of America : Sage Publications Inc.
- Garna, Judistira K. Garna, 1999, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung : Primaco Akademika.
- Kuswarno, Engkus, 2009, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, Bandung : Widya Padjadjaran.
- Little John, Stephen W., 2005, *Theories of Human Communication: Eighth edition*, Canada, Thomson Wardsworth.
- Mulyana, Deddy. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : Rosda.
- Nawawi, Hadari, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta : PN Gajah Mada University Press
- Schutz, Alfred, 1967, *The Phenomenology of The Social World*, Evanston : Illinois Northwestern University Press.

Sumber Lain :

- Batam Pos, “*PT Sido Muncul Peduli dengan Pariwisata Indonesia*” , 5 Maret 2010, Hlm. 5.

(TERAKREDITASI B)

I. JENIS NASKAH

Naskah dapat berupa ringkasan hasil penelitian, kajian teori dan konsep. Naskah yang dikirim ke redaksi bersifat orisinal (karya sendiri) dan belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah.

II. SISTEMATIKA

- a. Penulisan judul harus singkat dan mencerminkan isi tulisan.
- b. Nama penulis dicantumkan tanpa gelar akademik, di bawah nama penulis dicantumkan alamat institusi, nomor telp dan alamat email.
- c. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, terdiri atas satu paragraf, dan menggambarkan keseluruhan isi naskah, sekitar 200 kata.
- d. Kata kunci dicantumkan di bawah abstrak, dalam bahasa Inggris, tiga sampai lima kata yang berisi kata-kata yang dianggap penting dalam naskah.
- e. Referensi diutamakan dari jurnal ilmiah.
- f. Struktur naskah :
 1. Hasil penelitian :
 - Pendahuluan
 - Metode penelitian
 - Hasil Penelitian dan Pembahasan
 - Simpulan
 - Daftar Pustaka
 - Lampiran (bila perlu)
 2. Kajian Teori dan Konsep :
 - Pendahuluan
 - Sub topik disesuaikan dengan kebutuhan
 - Simpulan
 - Daftar pustaka
 - Lampiran (bila perlu)

III. FORMAT PENULISAN

- a. Naskah diketik pada kertas kuarto dengan spasi ganda dengan ukuran font 12, jenis huruf times new roman, panjang naskah 15-25 halaman.
- b. Setiap naskah diserahkan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- c. Tabel ditulis tanpa menggunakan garis vertikal.
- d. Tabel dan gambar, diberi nomor judul serta sumber. Tabel diketik satu spasi. Jumlah tabel dan gambar maksimal (5) lima.
- e. Kutipan menggunakan *endnote* dalam paragraf.
- f. Sub topik tidak diberi nomor, dicetak tebal, *Titel Case*.
- g. Daftar pustaka ditulis dengan urutan : nama belakang, nama depan, tahun terbit, judul (cetak miring), penerbit, kota terbit.
Contoh : Mulyana, Deddy, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.

IV. CETAK LEPAS DAN JURNAL LENGKAP

Penulis akan diberi dua eksemplar jurnal lengkap dan 3 (tiga) eksemplar cetak lepas; untuk tambahan, satu eksemplar jurnal dikenakan biaya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Untuk cetak lepas minimal 10 eksemplar dengan biaya @ Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

V. CONTACT PERSON

- a. Christina Rochayanti, HP 0815607701,
email = christinarochayanti@yahoo.com
- b. Puji Lestari, HP 08156874669,
email = pujilestariginting@yahoo.co.id

VI. KONTRIBUSI BAGI NASKAH YANG DIMUAT

Naskah yang dimuat dikenakan biaya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Biaya dikirim ke nomor rekening BNI Cabang UGM Yogyakarta, 0185321320, a.n. Wahyuni Choiriyati, RR, Qq Jurnal Komunikasi.